

MPR PERIODE 2014-2019 TUNAIKAN AMANAT DENGAN SUKSES

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

EMPAT PIJAR MPR

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

EDISI NO.10/TH.XIII/OKTOBER 2019

Musyawarah Mufakat, **BAMBANG SOESATYO TERPILIH** MENJADI KETUA MPR PERIODE 2019-2024

**Pokok-Pokok Haluan Negara
Akan Dirumuskan Oleh MPR
Periode 2019-2024**

24 Nasional
Ragab Pimpinan MPR
Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD

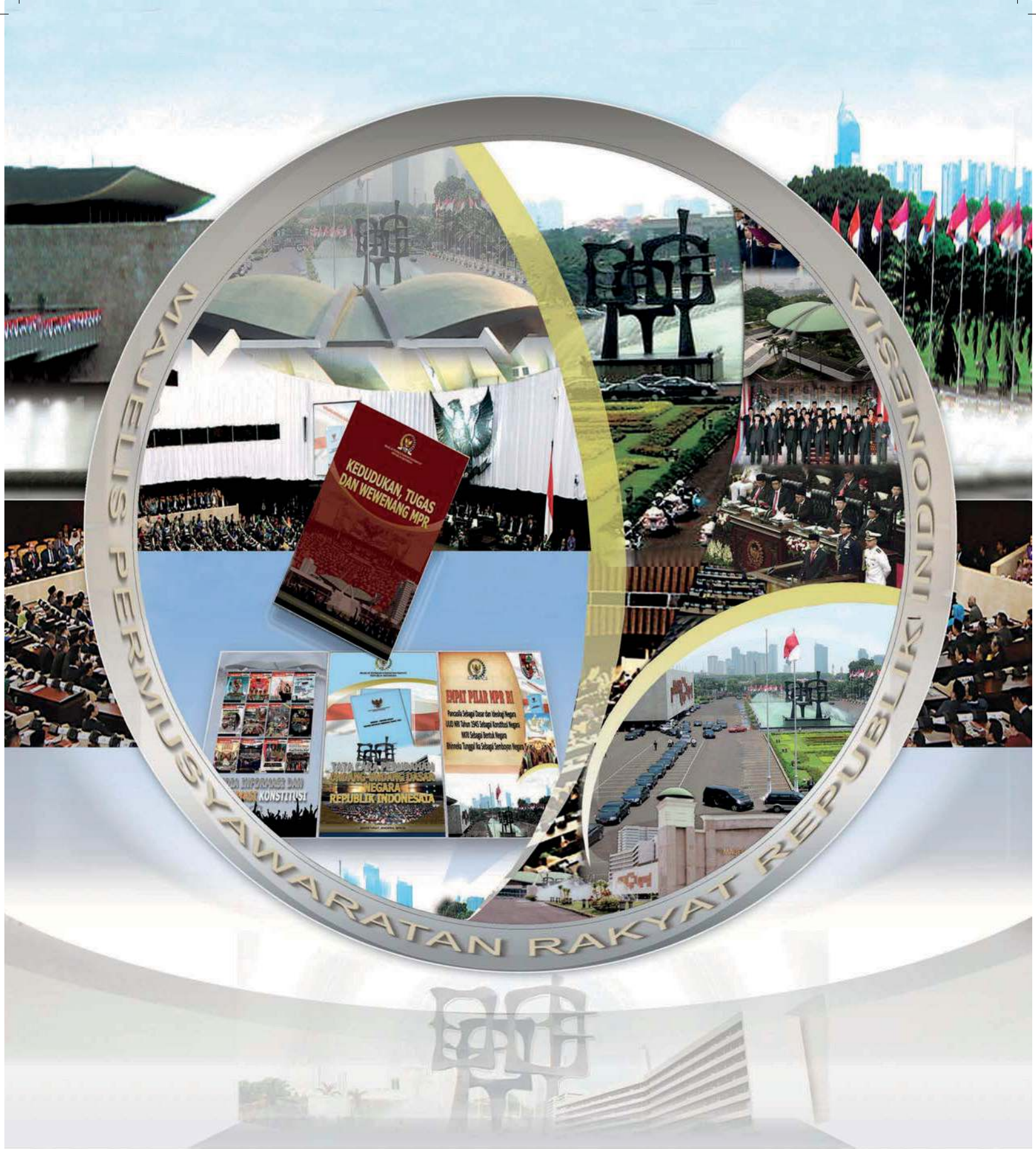
39 Selingan
Sejarah Bandara Indonesia:
Diatas Tanah Tuan Mayor

60 Sosialisasi
Pancasila
Alat Pemersatu Bangsa

ISSN 0854-6371



9 770854 637158



EMPAT PILAR MPR
 PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
 MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

PR Indonesia Awards 2019





EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.10/TH.XIII/OKTOBER 2019



10 MAJELIS UTAMA

Bamsoet Ketua MPR Periode 2019-2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Buktinya, Ketua MPR terpilih secara musyawarah dan mufakat.



26 Nasional

Ragab: Sepakati Perubahan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan MPR



32 Majelis Khusus

Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014-2019



39 SELINGAN Bandara di Indonesia



74 Wawancara M. Nasir Djamil

Pengantar Redaksi	04
Zulkifli Hasan	05
Nasional	20
Aspirasi Masyarakat	47
Diskusi Majelis	48
Festival Konstitusi	50
Gema Pancasila	58
Kolom	65
Ragam	76
Varia MPR	78
Figur	80
Bicara Buku	82



COVER

Edisi No. 10/TH.XIII/Oktober 2019

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Pengantar Redaksi

Pokok-Pokok Haluan Negara

SESUNGGUHNYA sudah sejak lama MPR menangkap keinginan masyarakat untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti pernah dimiliki Indonesia di masa lalu. Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR ke berbagai daerah dan berbagai kalangan masyarakat sejak tahun 2009, keinginan menghidupkan kembali haluan negara itu mulai dan terus mengemuka. MPR pun menangkap aspirasi masyarakat tersebut. Karena itulah MPR pada periode 2009 – 2014 merekomendasikan kepada MPR periode 2014 – 2019 untuk melakukan reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN.

Negara besar dan luas seperti Indonesia memang memerlukan haluan arah pembangunan nasional yang berkesinambungan. Untuk itu harus ada rancangan berbasis haluan negara sekaligus menjadi peta jalan bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Haluan negara ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam melaksanakan wewenang yang diberikan UUD NRI Tahun 1945. Haluan negara inilah yang menjadi rujukan bagi DPR dan pemerintah dalam merumuskan regulasi.

MPR periode 2014 – 2019 telah menindaklanjuti rekomendasi untuk mereformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR dilakukan berbagai pendalaman lewat seminar, focus group discussion, kajian, dan sebagainya. Pendalaman kajian tentang haluan negara itu dilaporkan secara berkala dalam rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD.

Setelah beberapa kali rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi Partai Politik dan Kelompok DPD akhirnya disepakati tentang perlunya haluan negara. Puncaknya,

pada Sidang Tahunan MPR 2018 (16 Agustus 2018), Ketua MPR Zulkifli Hasan mengumumkan pembentukan dua panitia Ad Hoc, yaitu Panitia Ad Hoc I (PAH I) yang diketuai Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan dan Panitia Ad Hoc II (PAH II) yang diketuai Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar. PAH I bertugas mempersiapkan materi pokok-pokok haluan negara, sedangkan PAH II bertugas membahas materi rekomendasi dan perubahan peraturan Tata Tertib (Tatib) MPR.

Dalam Sidang Tahunan MPR 2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan melaporkan perkembangan mewujudkan haluan negara. Semula MPR periode 2014 – 2019 berencana melakukan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memberi kewenangan kepada MPR menetapkan haluan negara. Namun, rencana amandemen terbatas UUD itu terkendala kesibukan politik menghadapi Pemilu Serentak 2019. Padahal usul perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR. Karena itu MPR periode 2014 – 2019 belum bisa melaksanakan amendemen terbatas sampai akhir masa jabatan pada Oktober 2019.

Karena itulah, berkaitan dengan haluan negara ini, MPR periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR periode 2019 – 2024 untuk melakukan pendalaman berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum haluan negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya haluan negara dalam Ketetapan MPR. Berkenaan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, tiga fraksi memberi catatan, selain memungkinkan ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui Undang-Undang. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Muhamad Jaya

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Supriyanto, Sucipto,

Rades Rahardian

REPORTER

Ana Suzana, Mery S. Magdalena,

Yenita Revi, Sugeng Cahyono

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatini

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,

Armansyah, Dhita Fitasari

Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



5 **ZULKIFLI HASAN**
TAHUN **MENGAWAL KONSTITUSI**

Kiprah Ketua MPR RI Dr. (HC) Zulkifli Hasan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Lima Tahun (2014 – 2019) Mengawal Pancasila

Zulkifli Hasan: “Sege nap komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila, kemudian mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Janji Zulkifli Hasan mengawal Pancasila sudah dimulai sejak terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014 – 2019 pada Oktober 2014 silam. Dalam pernyataan setelah dilantik sebagai Ketua MPR pada waktu itu, Zulkifli Hasan menegaskan akan bekerja maksimal mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Tentulah MPR sebagai lembaga yang amat teramat penting untuk mengawal Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI yang bagi kita harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika,” demikian pernyataan Zulkifli kala itu.

Setelah proses persidangan yang panjang, sejak Selasa pagi 7 Oktober 2014 hingga sekitar pukul 04.20 WIB Rabu pagi, 8 Oktober 2014, anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan akhirnya terpilih sebagai Ketua MPR untuk masa jabatan 2014 – 2019. Pemilihan dilakukan dengan sistem pemungutan suara (voting).

Di usung Koalisi Merah Putih (KMP), Zulkifli Hasan tergabung dalam Paket B bersama Mahyudin (Partai Golkar), E.E. Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD) mem-

peroleh dukungan 347 suara mengungguli Paket A yang memperoleh 330 suara. Satu suara abstain. Paket A yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri atas Oesman Sapta Odang (DPD), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Imam Nahrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

Sekitar pukul 05.25 WIB, Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mengambil sumpah Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR RI periode 2014 – 2019 didampingi oleh Wakil Ketua Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Setelah Hatta Ali menandatangani dokumen pelantikan tersebut, Pimpinan MPR sementara Maemunah Umar dari DPD pun menyerahkan secara simbolis palu persidangan MPR.

Dalam sambutan usai diambil sumpahnya, Zulkifli Hasan berjanji akan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan partai. “Tidak ada lagi Paket A atau Paket B. Yang ada hanya Paket Indonesia, Paket NKRI,” ujar pria berkacamata kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 ini.

Sebagai langkah awal mengimplementasikan kerja mengawal Pancasila, Zulkifli mempersiapkan agenda pelantikan presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2014. Bagi Zulkifli Hasan, demi kepentingan nasional dan NKRI, pelantikan presiden dan wakil presiden harus berjalan sukses.

Untuk persiapan pelantikan itu, Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR pun melakukan “roadshow” bersilaturahmi dengan presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih

Jusuf Kalla, calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Bersama Pimpinan MPR lainnya, Zulkifli juga bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Dia juga mengundang mantan presiden BJ Habibie dan mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Hamzah Haz.

Pelantikan presiden dan wakil presiden pun berjalan aman dan sukses. Pimpinan MPR berhasil menyatukan para tokoh dalam pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Zulkifli Hasan telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, dan memperkuat NKRI.

Empat Pilar MPR

Usai pelantikan presiden dan wakil presiden, Ketua MPR dan para wakil ketua MPR menjalankan tugas konstitusional MPR. Sebagai lembaga negara, MPR menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi. Mandat itu sungguh mulia karena terkait dengan norma fundamental negara. MPR diberikan mandat khusus oleh UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk mengawal ideologi Pancasila, konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, MPR mengerahkan seluruh anggota MPR untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagai pengawal ideologi Pancasila, MPR harus memastikan Pancasila tetap menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan



an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara. MPR pun harus menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka itulah MPR terus melakukan internalisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, konstitusi, memperkokoh NKRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan melakukan perjalanan keliling Indonesia untuk menjalankan tugas konstitusional MPR itu. Dia hadir di berbagai acara dan kegiatan kebangsaan dari ujung barat Aceh hingga ujung timur Papua. Dia memenuhi berbagai undangan dari berbagai daerah baik sosialisasi Empat Pilar MPR, ceramah kebangsaan, kuliah umum, dan menjadi keynote speech seminar nasional kebangsaan. Undangan datang dari berbagai kalangan, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan (lintas agama), organisasi profesi, dan lainnya. Tidak terhitung sudah berapa kali Zulkifli Hasan berdiri di podium untuk menyampaikan empat konsensus kebangsaan.

Di ruang kerja, Gedung Nusantara Lantai

9 Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Zulkifli Hasan juga menerima tamu dari berbagai kalangan. Zulkifli senantiasa menjalin hubungan dan silaturahmi dengan berbagai tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh agama (lintas agama), kalangan intelektual, dan lainnya. Kepada semua tamunya, pesan yang disampaikan selalu sama, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI, mendahulukan kepentingan nasional yang lebih besar di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, Zulkifli Hasan secara sederhana menjelaskan nilai-nilai Pancasila, makna konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bagaimana menjaga NKRI, dan melestarikan Bhinneka Tunggal Ika. Dia selalu menyebutkan bahwa jika Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan hebat karena memiliki value. Zulkifli pun kagum dengan pendiri bangsa yang telah menggali dan merumuskan nilai-nilai Pancasila. Itulah value yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dia menjelaskan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna bahwa perilaku manusia harus

berdasarkan keimanan dan disinari cahaya ilahi. Jika seseorang berpegang pada sila pertama, menjalankan ibadah dan perilaku sesuai keyakinannya dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya orang takut melakukan kejahatan korupsi atau lainnya. Setiap perbuatannya selalu disinari oleh cahaya ilahi.

Perilaku sila pertama ini pasti akan melahirkan perilaku sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, jika sila pertama diterapkan maka seseorang akan bersikap memanusiaikan manusia dengan adil dan beradab. Selanjutnya, dua sila itu menjiwai sila ketiga untuk melahirkan perilaku dan etika manusia yang menyejukan, mendamaikan, dan mempersatukan. Segala perbedaan mesti diselesaikan dengan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat bukan dengan main hakim sendiri. Tujuannya, tentu untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh manusia Indonesia sebagai makhluk sosial bukan individu yang berdiri sendiri.

Menjelaskan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman hukum, Zulkifli Hasan menegaskan tidak boleh ada orang yang kelaparan di republik ini. Tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Tidak boleh ada orang yang ditolak rumah sakit karena miskin. Semua ada

di konstitusi. Negara atau pemerintah harus bertanggungjawab menjalankan konstitusi.

Dengan NKRI, Zulkifli mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa melihat latar belakang daerah. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang harus dihormati. Mengutip Kiai Hasyim Muzadi, Zulkifli mengatakan, “kalau beda ya jangan disamakan, tapi kalau sama ya jangan dibeda-bedakan”.

Menjahit Kembali Merah Putih

Kontestasi politik pemilihan gubernur atau kepala daerah dalam Pilkada serentak maupun jelang Pemilihan Umum Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara

MPR mengajak masyarakat Indonesia memahami kontestasi politik itu dalam bingkai persatuan dan NKRI. Namun, tak urung, kontestasi politik dalam Pilkada maupun Pemilu hampir mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa akibat berbagai kesalahpahaman sehingga masyarakat terkotak-kotak. Kontestasi dalam Pilkada maupun Pemilu sempat membelah masyarakat. Untuk itu, Zulkifli berulang kali menyerukan bersatu kembali, merajut persaudaraan, menjahit kembali Merah Putih.

Di mata Zulkifli, agenda besar Indonesia bukan hanya mengejar ketertinggalan di berbagai bidang. Bukan hanya menyelesaikan pekerjaan rumah mensejahterakan

tindakan saling menghormati,” tegasnya di depan anggota MPR.

Menurut Zulkifli, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden haruslah dipahami sebagai kompetisi antar kita, antar saudara, antar sesama anak bangsa. Sehingga apapun hasilnya merupakan kemenangan kita semua sebagai bangsa Indonesia. “Pilihan politik boleh beda, tetapi Merah Putih kita sama, dan tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali Merah Putih,” ajaknya.

Mengawal ideologi dan dasar negara Pancasila, Zulkifli mengingatkan bahwa saat ini terjadi de-ideologisasi Pancasila pasca reformasi. Proses de-ideologisasi itu terlihat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bersamaan) membawa atmosfir baru bagi masyarakat. Meski Pilgub DKI Jakarta dan Pilkada serentak 2018 berjalan aman dan lancar, namun menanam benih-benih ketidakrukunan antar-warga. MPR melihat potensi perpecahan seperti itu. Aroma perpecahan di masyarakat mulai tercium apalagi menjelang Pemilu Serentak pada April 2019).

Zulkifli Hasan mengungkapkan MPR sangat *concern* dengan situasi dan kondisi seperti itu. Sebagai “Rumah Kebangsaan”, MPR memiliki arah politik kebangsaan, yaitu apapun pilihan dalam Pilkada serentak atau Pemilu serentak, kita semua tetap satu bangsa dengan Merah Putih yang sama. “Pilkada dan Pemilu adalah kontestasi politik yang biasa. Pemilu rutin setiap lima tahun sekali. Pilih sesuai hati nurani masing-masing. Jangan memandang beda pilihan adalah lawan yang harus dihabisi,” kata Ketua Umum PAN itu dalam berbagai kesempatan.

ekonomi rakyat. Namun, ada satu agenda kebangsaan yang sungguh serius dan tidak bisa ditunda, yaitu menjahit kembali Merah Putih. Jangan sampai hanya gara-gara kontestasi politik rakyat menjadi terpecah-belah dan terkotak-kotak. Mengawal Pancasila, Zulkifli Hasan menyampaikan pesan persatuan.

Pesan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019 lalu. Zulkifli mengatakan MPR tidak ikut dalam polarisasi kompetisi Pemilu Serentak, khususnya dalam kontestasi Pemilu Presiden. Usaha ini dilakukan agar tidak mengorbankan kepentingan persatuan bangsa hanya demi kontes demokrasi yang merupakan agenda rutin setiap lima tahun. “MPR bersikap bijak dalam menyikapi kompetisi Pilpres untuk tidak mengorbankan kepentingan persatuan bangsa. MPR selalu mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa dalam kehidupan demokratis memerlukan sikap dan

dari nilai-nilai dalam sila Pancasila yang kian hari tergerus dengan fenomena globalisasi, nilai-nilai individualism, liberalisme, dan ekstremisme.

Atas dasar itu, kata Zulkifli, MPR terus berupaya melakukan pemantapan mental dan ideologi bangsa melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 dapat menjalankan upaya pemantapan ideologi bangsa dengan baik.

“Segep komponen bangsa harus memiliki keyakinan tentang kebenaran Pancasila, kemudian mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Selama lima tahun (2014 – 2019), Zulkifli Hasan telah membuktikan janjinya untuk mengawal Pancasila dan menjaga NKRI. □



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



ILUSTRASI: SUSTHANTO



Musyawarah Mufakat,

Bambang Soesatyo Terpilih

Menjadi Ketua MPR Periode 2019-2024

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Buktinya, Ketua MPR terpilih secara musyawarah dan mufakat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TEPAT pukul 21.33 WIB, Kamis (3/10) malam, pada Rapat Paripurna III MPR, anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Begitu ditetapkan sebagai Ketua MPR yang baru, Bamsuet, begitu Bambang Soesatyo biasa disapa, langsung mengucapkan sumpah janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Bersama Bamsuet, juga mengucapkan sumpah janji sembilan Wakil Ketua MPR periode 2019-2024. Mereka adalah Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Arsul Sani (Fraksi PPP) dan Fadel Muhammad

(Kelompok DPD).

Pengambilan sumpah janji ini diawali pembacaan Petikan Keputusan MPR No. 3 Tahun 2019 Tentang Pimpinan MPR Masa Jabatan 2019-2014 oleh Sekretaris Jenderal

MPR RI, Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH. Keputusan MPR tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, dengan sembilan orang Wakil Ketua. Usai pengucapan sumpah janji,





pimpinan MPR sementara menyerahkan memori jabatan dan palu sidang kepada pimpinan MPR Periode 2019-2024.

Terpilihnya Bambang Soesatyo menjadi

Ketua MPR RI periode 2019-2024 merupakan klimaks dari kerja besar MPR, Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019-2014. Setelah

pelantikan 711 anggota MPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019, pemilihan Ketua MPR memang menjadi agenda yang paling menarik. Karena dalam pemilihan Ketua MPR kali ini ada dua calon yang saling berhadapan, yaitu Bambang Soesatyo dan anggota Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sebelum Sidang Paripurna III dengan agenda pemilihan Ketua MPR pada malam itu, fraksi-fraksi parpol dan kelompok DPD sebenarnya telah berkali-kali melakukan musyawarah atau lobi-lobi untuk mencari titik temu. Namun, sampai saat sidang dibuka, belum ada kata sepakat. Artinya, calon masih tetap dua. Dan, kalau salah satu calon tak mau mengalah maka pemilihan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara, voting.

Harapan akan tercapainya kata mufakat

Pimpinan MPR Periode 2019-2014

Ketua MPR RI :	Bambang Soesatyo	(Fraksi Partai Golkar)
Wakil Ketua :	Ahmad Basarah	(Fraksi PDI Perjuangan)
Wakil Ketua :	Ahmad Muzani	(Fraksi Partai Gerindra)
Wakil Ketua :	Lestari Moerdijat	(Fraksi Partai Nasdem)
Wakil Ketua :	Jazilul Fawaid	(Fraksi PKB)
Wakil Ketua :	Syarif Hasan	(Fraksi Partai Demokrat)
Wakil Ketua :	Hidayat Nur Wahid	(Fraksi PKS)
Wakil Ketua :	Zulkifli Hasan	(Fraksi PAN)
Wakil Ketua :	Arsul Sani	(Fraksi PPP)
Wakil Ketua :	Fadel Muhammad	(Kelompok DPD)



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

muncul menyusul intrupsi dari peserta sidang, yang minta agar Sidang Paripurna III dihentikan sejenak guna memberi kesempatan para pihak untuk berunding kembali. Intrupsi itu datang dari Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR El Nino M. Husein Mohi, yang kemudian disusul pula intrupsi serupa dari anggota Fraksi Partai Golkar Idris Laena, dan Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan.

Atas permintaan itu, pimpinan MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe didampingi Hillary Brigitta Lasut, yang memimpin sidang malam itu, menskors sidang selama 1 jam. Dan, waktu enam puluh menit itu ternyata sangat menentukan demokrasi tetap berlaku. Bagaimana tidak, begitu skorsing dicabut, kabar baik langsung disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, melalui pendapat fraksinya.

"Fraksi Gerindra mendukung Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR, namun Gerindra mengedepankan musyawarah mufakat. Karena itu, Fraksi Gerindra setuju mendukung Bamsoet menjadi Ketua MPR," ujar Ahmad Riza Patria yang sontak mendapat

aplus dari para peserta sidang. Partai Gerindra akhirnya mengikuti jejak delapan fraksi yang lain dan kelompok DPD RI yang telah terlebih dulu memberi dukungan kepada Bamsoet.

Pidato Pertama Ketua MPR, Bambang Soesatyo



Usai dilantik menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo selaku ketua MPR didampingi sembilan wakil ketua langsung memimpin Sidang Paripurna I. Dalam pidato pertamanya selaku Ketua MPR, Bambang Soesatyo menjelaskan, berdasar penyempurnaan

Undang-undang MD3 Tahun 2019, Pimpinan MPR periode 2019-2024 terdiri atas satu Ketua dan sembilan wakil ketua. Artinya, MPR mengutamakan semangat kebersamaan dari semua unsur yang ada di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan adanya 10 pimpinan, kata Bamsoet, MPR periode ini mensyaratkan adanya sinergi dari setiap perwakilan. Karena itu, harus ditumbuhkan sikap gotong royong dari tiap-tiap anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, lanjut Bambang Soesatyo, musyawarah mufakat sebagai nilai luhur dalam Pancasila harus dikedepankan dalam setiap pengambilan keputusan di lembaga yang terhormat ini.

"Dengan demikian, MPR hari ini terbuka sebagai ruang hangat untuk mengkaji berbagai gagasan mengenai persoalan bangsa dan Negara," ungkap mantan Ketua DPR RI itu.

MPR adalah lembaga Negara yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Di lembaga ini berhimpun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili partai-partai politik, dan anggota



Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah-daerah seluruh Indonesia.

Karena itu, MPR merupakan Rumah Kebangsaan, tempat untuk membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumah untuk mengamankan

ideologi Pancasila, melaksanakan Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengawal tegaknya kehidupan ber-Bhinneka Tunggal Ika. “Tekad dan semangat untuk melaksanakan ideologi Pancasila tidak boleh pudar,

melainkan harus tetap menyala dan terus kita mantapkan,” tegasnya.

Menurut Bambang Soesatyo, tantangan yang dihadapi MPR semakin berat. Banyak generasi muda tidak lagi mengenal Pancasila. Bahkan ada di antara mereka yang lebih menyukai ideologi lain daripada Pancasila. Sehingga banyak ditemukan adanya tindakan intoleran serta sikap dan perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Ke depan, MPR diharapkan mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengatasi persoalan ideologis di tengah masyarakat. Tugas ini termaktub dalam revisi UU MD3, yakni memasyarakatkan Empat Pilar MPR. Melihat perkembangan dunia global dan pesatnya teknologi informasi, MPR diharapkan menjadi lembaga terdepan memimpin penguatan Empat Pilar Indonesia secara luas.

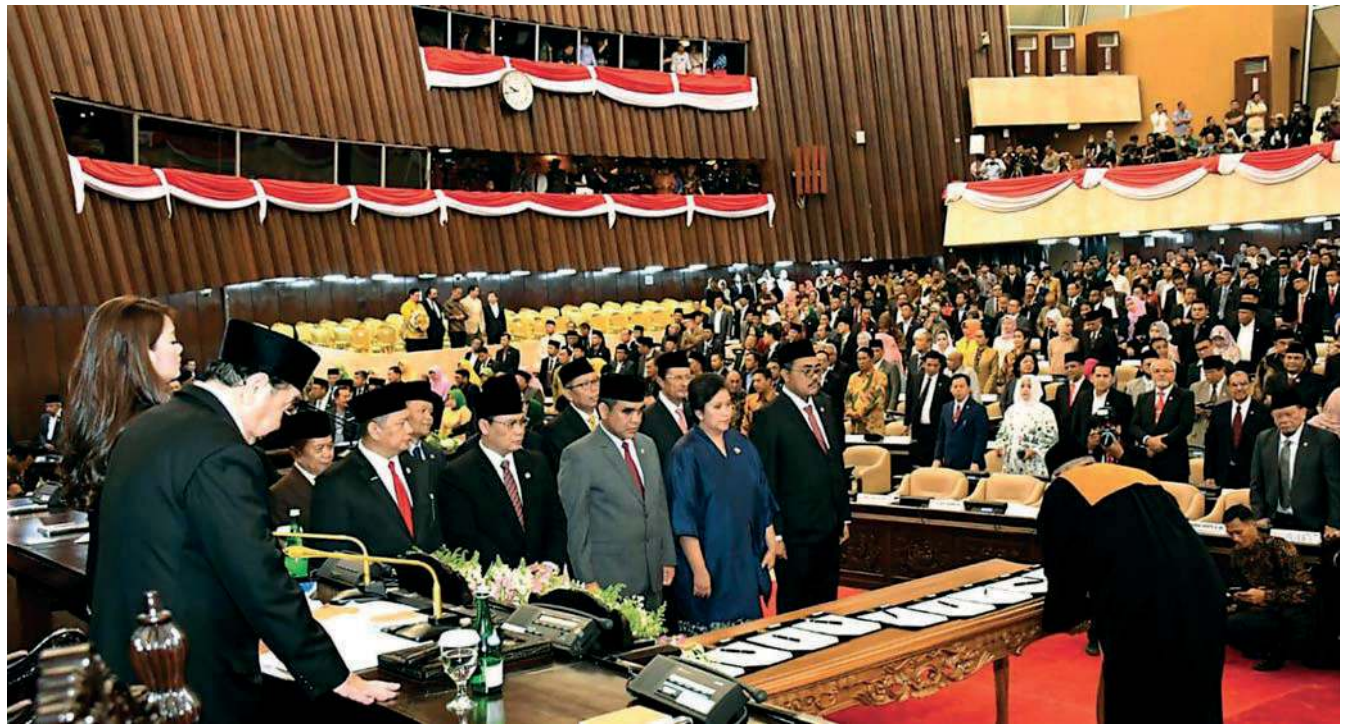
“Oleh karena itu, kami sangat berharap, tugas yang cukup berat ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota MPR, yang juga berperan sebagai agen Empat Pilar di daerah pemilihannya masing-masing,” harap Bambang Soesatyo. □

Tim Majelis

Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR

Ketua Fraksi PDI Perjuangan	: Ahmad Basarah
Ketua Fraksi Partai Golkar	: Zainudin Amali
Ketua Fraksi Partai Gerindra	: Ahmad Riza Patria
Ketua Fraksi Partai Nasdem	: Johnny G Plate
Ketua Fraksi PKB	: Jazilul Fawaid
Ketua Fraksi Partai Demokrat	: Benny K Harman
Ketua Fraksi PKS	: Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi PAN	: Alimin Abdullah
Ketua Fraksi PPP	: Muhammad Arwani Thomafi
Ketua Kelompok DPD	: Intsiawati Ayus

Harapan Terhadap Pimpinan MPR Terpilih



PEMILIHAN Ketua MPR periode 2019-2024 berlangsung sangat dinamis. Sidang MPR beberapa kali diskors untuk melakukan lobi-lobi guna menghindari mekanisme voting atau pemungutan suara. Namun, dengan sikap kenegarawan yang ditunjukkan pihak-pihak yang berbeda pandangan, akhirnya mencapai titik temu. Secara aklamasi semua fraksi dan kelompok DPD menjatuhkan pilihan kepada Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. Berikut ini beberapa komentar dan harapan terhadap pimpinan MPR yang baru:

Jazilul Fawaid

Ketua Fraksi PKB / Wakil Ketua MPR

Perbedaan merupakan hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Dinamika yang terjadi seputar pemilihan Ketua MPR tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Hal tersebut harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi. Apalagi masing-masing pihak yang berbeda pandangan itu tetap

menghormati saling menghormati satu dengan yang lainnya. Lalu, kedua belah pihak berusaha mencari titik temu dan membuat kesamaan, dengan harapan bisa mewujudkan musyawarah untuk mufakat.

Jadi, dinamika yang terjadi itu adalah yang biasa saja. Pokoknya, yang terjadi

dalam pemilihan Ketua MPR adalah sembilan fraksi dan satu kelompok DPD telah berusaha melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, karena ada dua kandidat maka harus ada satu yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, niscaya harus diambil keputusan berdasar



Jazilul Fawaid

suara terbanyak. Tetapi opsi tersebut tidak dikehendaki seluruh Fraksi dan kelompok DPD.

Dan, mengingat keputusan di MPR itu biasa dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, maka kali ini pun dilakukan secara musyawarah mufakat.

Agun Gunanjar Sudarsa

Anggota Fraksi Golkar di MPR

Pasca terbentuknya Pimpinan MPR yang baru, harapan rakyat terhadap kinerja dan tugas-tugas pimpinan serta anggota MPR periode 2019-2024 sangat besar. Banyak

kan agar metode-metode dan model-model sosialisasi lebih inovatif lagi, sesuai dengan kebutuhan target sosialisasi, terutama untuk kalangan generasi muda Indonesia, mulai dari anak usia TK dan PAUD hingga Perguruan Tinggi. Ini harus benar-benar menjadi perhatian, sebab sosialisasi dengan menysar kepada anak-anak usia dini hingga mahasiswa diharapkan akan membentengi mereka dari paham-paham negatif, seperti radikalisme dan lain-lain yang keluar dari kultur budaya bangsa Indonesia.

Selain itu, agar capaian tujuan penyelenggaraan sosialisasi bisa maksimal maka Pimpinan MPR perlu mendorong pemaksimal-

Hermanto

Anggota Fraksi PKS di MPR

Saya menyampaikan apresiasi pemilihan Pimpinan MPR bisa berlangsung secara musyawarah mufakat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terimplementasi dengan baik. Selain itu, juga menunjukkan itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Awal yang sudah bagus ini tentunya mesti dilanjutkan dengan kinerja-kinerja yang bagus pula. Ke depan kita bisa berharap kepemimpinan MPR yang sekarang ini bisa mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia menuju Indonesia sejahtera.



Agun Gunanjar Sudarsa



Hermanto

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tugas yang diamanahkan Undang-undang kepada pimpinan dan anggota MPR yang mesti disempurnakan dan diselesaikan, antara lain soal Rekomendasi dan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Saya harap apa yang menjadi Rekomendasi MPR periode sebelumnya (2014-2019) bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terhadap rekomendasi itu yang harus ditindaklanjuti adalah dalam bentuk melakukan kajian yang banyak melibatkan publik yang memiliki kompetensi, termasuk melakukan sosialisasi terutama pementapan tentang ideologi Pancasila.

Terkait Sosialisasi Empat Pilar MPR yang telah lama digaungkan MPR, saya mengingat-

an capaian dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Saya sangat meyakini dengan komposisi kepemimpinan MPR yang paripurna, di mana semua fraksi memiliki unsur pimpinan, saya rasa antara pimpinan dan anggota akan bisa berbagi tugas dengan baik sehingga tugas-tugas yang diamanahkan negara kepada pimpinan, anggota, serta alat-alat kelengkapannya, seperti Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran, termasuk Komisi Kajian Ketatanegaraan, bisa lebih maksimal. Saya optimistis.

Terkait penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi Empat Pilar adalah tugas MPR yang sangat penting dari sisi kontinuitas serta kualitas. Namun, memang ada beberapa keterbatasan MPR dalam pelaksanaannya sehingga ke depan, MPR bisa melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk bisa mengoptimalkan sosialisasi sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Saya berharap, kepemimpinan MPR sekarang ini terus menjaga kekompakan, tetap bermusyawarah dan tetap bermufakat sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. □

Tim Majelis

Pelantikan Anggota MPR Periode 2019-2024

Sebanyak 711 anggota MPR periode 2019-2024, Selasa (1/10/2019), dilantik menjadi anggota MPR. Pelantikan anggota MPR ini dilakukan, setelah sebelumnya mereka dilantik menjadi anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Dan, acara pelantikan ini termasuk dalam rangkaian acara Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019-2024.

DIBANDING Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2014-2019, Sidang Paripurna MPR tahun ini berjalan relatif lebih tenang. Diawali pelantikan anggota MPR terpilih periode 2019-2024. Sebanyak 711 anggota MPR RI hasil Pemilu serentak 17 April 2019 mengikuti Sidang Paripurna I dengan agenda Pelantikan Anggota MPR.

Prosesi pelantikan anggota MPR ini ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji anggota MPR dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali S.H., M.H. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Pelantikan anggota MPR periode 2019-2024 ini disaksikan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo; Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Hadir pula, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno; dan Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz; dan lainnya.

Sementara anggota keluarga dan para pendukung dari para anggota MPR yang



dilantik hanya bisa menyaksikan kegiatan tersebut melalui layar lebar yang terpasang di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/ DPR/DPD RI. Pelantikan anggota MPR RI ini dilakukan setelah sebelumnya mereka dilantik sebagai anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2014.

Kemeriahan prosesi pelantikan anggota MPR RI periode 2019-2024 sudah tampak sejak pagi hari. Puluhan staff Sekretariat Jendral MPR yang bertugas dalam acara tersebut sudah bersiap sejak pukul 06.30 WIB. Padahal, acara dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Sidang-sidang berlangsung secara maraton sebanyak tiga kali. Sidang pertama, pelantikan anggota DPR dilanjutkan pelantikan anggota DPD, dan diakhiri sidang pelantikan anggota MPR.

Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR periode 2019-2024 ini dimulai pukul 11.00 WIB, dipimpin anggota MPR tertua dan termuda. Anggota MPR tertua adalah Sabam Sirait (83 tahun) dari Kelompok DPD RI, sementara anggota MPR termuda Hillary Brigitta Lasut (23 tahun) dari Fraksi Nasdem.

Mengomentari pelantikan tersebut, anggota MPR Kelompok DPD, Oni Suwрман, mengatakan, pelantikan merupakan prosesi yang sakral dan penting. Namun, lebih penting lagi bagaimana menjalankan amanat yang diberikan, yaitu bagaimana memperjuangkan





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kemajuan daerah melalui jalur DPD. Karena itu, Oni meminta maaf jika selama lima tahun keberadaannya di DPD belum bisa menyentuh seluruh aspirasi daerah yang diwakili. Ia berjanji akan berusaha memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan taraf hidup warganya.

“Yang penting buat saya lurus-lurus saja, jangan sampai terkena masalah. Lakukan dengan optimal apa yang bisa dilakukan. Jangan memaksa diri, apalagi kalau itu menyebabkan kita terkena masalah hukum,”

kata Oni.

Terkait banyaknya aksi demo mahasiswa beberapa hari menjelang sidang-sidang MPR ini, Oni dengan santai mengatakan, itu adalah hal yang wajar. Karena demo merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi, dan diperbolehkan undang-undang. Demo, kata Oni, juga merupakan bagian kritik dari masyarakat, asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara yang memancing kerusuhan.

Sementara anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti mengaku, tenang

menapaki keberhasilannya menjadi anggota MPR. Pasalnya, ia mengaku cukup mendapat pembekalan dari MPR, termasuk bahan-bahan sosialisasi Empat Pilar MPR.

Artis yang biasa dipanggil KD ini berharap, dia bisa mengemban kepercayaan yang diberikan PDI Perjuangan dan masyarakat yang telah memilihnya menjadi anggota dewan pada pemilu lalu.

“Saya akan terus menjalani proses belajar, karena antara politisi dan publik figur di dunia hiburan sangat berbeda,” katanya.



Hillary Brigitta Lasut

Sidang Pembentukan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR

Berselang sehari setelah dilantik menjadi anggota MPR atau Rabu (2/10/2019), anggota MPR yang baru dilantik ini mengikuti Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Agendanya, pengesahan Jadwal Sidang. Sayangnya, Sidang Paripurna II ini berjalan kurang mulus. Sidang terpaksa ditunda selama 30 menit, dari seharusnya pukul 10.00 WIB menjadi 10.30 WIB, karena peserta yang hadir belum memenuhi kuorum.

Setelah 30 menit berlalu, pimpinan sidang sementara termuda, Hillary Brigitta Lasut, menuju meja pimpinan sidang. Dengan percaya diri ia membuka sidang dengan

mengatakan: “Sesuai dengan catatan Sekretariat Jenderal MPR, jumlah peserta yang sudah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 376 orang. Dengan demikian sidang sudah memenuhi kuorum,” katanya seraya membuka sidang.

Namun, sidang sempat ditunda lantaran Hillary memimpin sidang seorang diri. Ia tidak didampingi anggota tertua, Sabam Sirat, dan itu dipersoalkan oleh sebagian anggota. Arya Bima, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, melakukan interupsi mempertanyakan keabsahan pimpinan sidang tersebut. Sesuai kesepakatan Peraturan Tata Tertib MPR, kata Arya Bima, Sidang MPR dipimpin oleh anggota tertua dan termuda. Nyatanya, anggota tertua

sekaligus pimpinan sementara tidak hadir memimpin rapat.

Interupsi Arya Bima itu memantik interupsi lainnya, yang muncul silih berganti. Karena tidak menemukan titik temu, Hillary Brigitta Lasut pun meminta sidang diskors untuk memberikan kesempatan kepada perwakilan partai politik dan kelompok DPD melakukan lobi-lobi.

Lobi yang dilakukan mencapai kesepakatan, untuk pengganti Sabam Sirait sebagai pimpinan tertua sementara maka ditunjuklah Abdul Wahab Dalimunthe, anggota tertua dari Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya Sidang Paripurna berlangsung dipimpin oleh pimpinan MPR sementara Abdul Wahab bersama Hillary Brigitta Lasut.

Sidang Paripurna dengan agenda pengesahan jadwal sidang lagi-lagi sempat diinterupsi beberapa anggota. Namun, jadwal sidang yang sudah disepakati pada rapat gabungan, akhirnya disetujui oleh anggota MPR.

Setelah agenda pertama rampung, sidang dilanjutkan Pembentukan Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD. Pada kesempatan tersebut masing-masing juru bicara Fraksi dan kelompok DPD menyebutkan Nama Fraksi atau Kelompok DPD dan Komposisi Pimpinannya. □

Tim Majelis



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., Sesjen MPR RI

Setjen MPR Siap Berikan Pelayanan Optimal Untuk Anggota MPR Baru



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBANYAK 711 anggota MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD telah dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan 2019 -2024 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Setelah pelantikan ini, Sekretariat Jenderal MPR telah mempersiapkan diri untuk memberi pelayanan maksimal agar anggota MPR yang baru bisa menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan baik.

“Dengan penambahan anggota MPR tentu kita harus mempersiapkan dari segi kuantitas, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, juga terkait dengan anggaran,” kata Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Dr. H. Ma'ruf Cahyono, usai Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019 – 2024. Jumlah anggota MPR pada periode 2014 – 2019 lalu sebanyak 692 orang, terdiri dari 560 orang anggota DPR dan 132 anggota DPD. Kini jumlah anggota MPR periode 2019 – 2024 bertambah menjadi 711 orang.

Menurut Ma'ruf, *supporting* yang maksimal tergantung dari sumber daya organisasinya. “Kita persiapkan dengan baik agar penambahan jumlah anggota MPR menjadi 711 orang tidak mengurangi kualitas pelayanan kita. Pelayanan secara cepat, tepat, dan juga

akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang baik tidak sekadar melayani tetapi harus sesuai dengan asas akuntabilitas,” katanya.

Pelayanan yang optimal kepada anggota MPR, lanjut Ma'ruf, memerlukan *supporting* yang kuat dari Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. “MPR dan Sekretariat Jenderal MPR tidak dibisa dipisahkan. Keduanya harus membangun sinergitas. Sekretariat Jenderal MPR sebagai pendukung memiliki peran vital untuk mendukung tugas-tugas lembaga,” ujarnya.

Ma'ruf menambahkan, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota MPR masa jabatan 2019 – 2024 adalah awal masa jabatan anggota MPR untuk memulai tugas-tugas konstitusionalnya. Anggota MPR terpilih masa jabatan 2019 – 2024 akan melaksanakan wewenang dan tugas MPR yang tidak ringan. Sesuai konstitusi, wewenang MPR di antaranya mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden. “MPR yang sekarang akan melantik presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019,” ucapnya.

Tugas lain MPR periode sekarang adalah menindaklanjuti rekomendasi dari MPR periode 2014 – 2019. “Apa yang direkomendasikan adalah hal-hal yang penting terkait dengan aspirasi masyarakat. Isi rekomendasi yang disampaikan MPR periode 2014 –

2019 sangat mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk penataan sistem ketatanegaraan kita. Rekomendasi itu menjadi pijakan untuk kerja-kerja MPR periode sekarang ini,” imbuhnya.

Anggota MPR yang baru, tambah Ma'ruf, tetap meneruskan sosialisasi Empat Pilar MPR. Sebab pemasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan perintah UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Karena itulah menjadi kewajiban anggota MPR yang sekarang untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR, selain tugas-tugas lain seperti melakukan kajian, penyerapan aspirasi masyarakat. UU memang memandatkan MPR untuk melaksanakan tugas-tugas itu,” jelasnya.

Setelah Sidang Paripurna MPR pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota MPR masa jabatan 2019 – 2024, agenda berikutnya adalah paripurna MPR untuk pembentukan fraksi dan kelompok. Sesuai dengan peraturan Tata Tertib MPR, pemilihan Pimpinan MPR dilakukan bila sudah ada usulan dari fraksi dan kelompok. “Pemilihan Pimpinan MPR bisa dilakukan setelah pembentukan fraksi dan kelompok. Kemungkinan pada Kamis (3/10) dilakukan pemilihan pimpinan MPR,” pungkasnya. □

BSC

Pokok-Pokok Haluan Negara

MPR Periode 2019-2024 Perlu Melakukan Pendalaman

MPR Masa Jabatan 2019 - 2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya Pokok-Pokok Haluan Negara itu dalam Ketetapan MPR.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MENJELANG akhir masa jabatan MPR periode 2014 - 2019, Pimpinan MPR mengadakan rapat gabungan (Ragab) terakhir dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD. Ragab berlangsung pada Senin, 23 September 2019, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta.

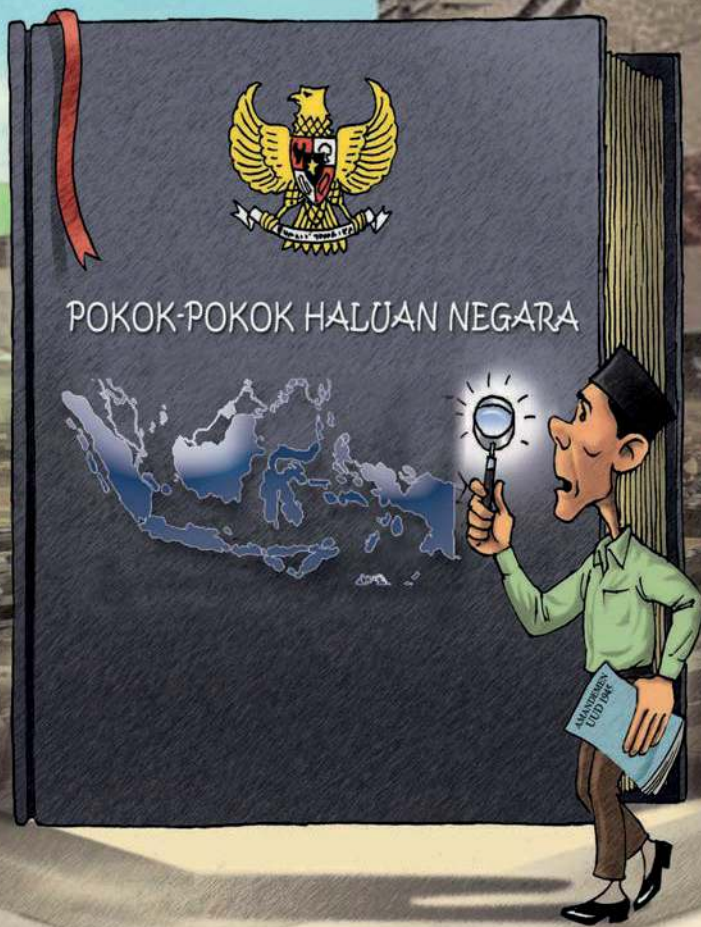
Ragab adalah forum pengambilan keputusan di antara Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD sebelum dibawa ke forum pengambilan keputusan yang lebih tinggi di Sidang Paripurna MPR. Karena itu, forum Ragab terakhir ini menjadi penting sebelum Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2014 - 2019.

Ragab dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua Mahyudin, Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani. Dari pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR hadir Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua Fraksi Partai Golkar), Guntur Sasono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (Ketua Fraksi PKS), Jazilul Fawaid (Ketua Fraksi PKB), Alimin Abdullah (Ketua Fraksi PAN), Bachtiar Aly (Ketua Fraksi Partai Nasdem). Selain itu, juga tampak Pimpinan Badan Sosialisasi MPR, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Badan Penganggaran MPR, dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR.

Agenda Ragab adalah membahas perubahan Tata Tertib MPR, rekomendasi MPR periode 2014 - 2019, dan jadwal acara Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014 - 2019. Kesimpulan Ragab ini adalah menyetujui perubahan Tata Tertib MPR terkait dengan penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. Ragab juga menyetujui rekomendasi MPR terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. Dalam Ragab terakhir inilah diputuskan mengenai "nasib" haluan negara (tepatnya reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN) yang sudah dikerjakan MPR selama 2014 - 2019.

"Ragab merekomendasikan kepada MPR periode 2019 - 2024 tentang perlunya menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini direkomendasikan untuk dilanjutkan oleh MPR yang akan datang (2019 - 2024). Memang ada sedikit perbedaan pendapat untuk memutuskan rekomendasi ini," ujar Zulkifli Hasan usai Ragab.

Bagaimana rekomendasi MPR periode 2014 - 2019 terkait dengan haluan negara? Dalam Pidato Ketua MPR di Sidang Akhir Masa Jabatan 2014 - 2019 rekomendasi terkait haluan negara itu dijelaskan secara



gambang. Inilah rekomendasinya:

“Terhadap materi Pokok-Pokok Haluan Negara, MPR Masa Jabatan 2019 – 2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian MPR Masa Jabatan 2014 -2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukumnya, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan MPR. Khusus berkenaan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui Undang-Undang.”

Bila Pokok-Pokok Haluan Negara ditetapkan melalui Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amendemen (perubahan) UUD NRI



Zulkifli Hasan

Tahun 1945. Perubahan dilakukan terhadap kewenangan MPR, yaitu memberi kewenangan tambahan kepada MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara

dengan Ketetapan MPR. Karena itu sejak lama terdengar wacana amendemen terbatas terkait dengan haluan negara ini. Ketua MPR Zulkifli Hasan sering menyebut amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan haluan negara.

“Melalui pengkajian yang mendalam, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR telah bersepakat untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara melalui perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945,” kata Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Meski demikian, karena usul amendemen tidak dapat diajukan dalam waktu 6 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, maka



Rambe Kamarul Zaman

MPR periode 2014 – 2019 merekomendasikan MPR periode berikutnya untuk melakukan amendemen UUD. “Untuk itu, MPR masa jabatan 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2019 – 2024 untuk mewujudkan gagasan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945,” ujar Zulkifli. Maka lahirlah rekomendasi seperti sudah dikutip di atas dengan tambahan tiga partai politik memberi catatan atas rekomendasi dalam hal haluan negara.

Amendemen Terbatas Atau Undang-Undang?

Isu amendemen UUD sebenarnya sudah muncul sejak lama. Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amendemen, yaitu ada yang menginginkan kembali pada UUD 1945 yang asli, ada yang mengatakan UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen sudah baik sehingga perlu dijalankan, dan ada yang berpendapat perlunya melakukan amendemen ulang UUD NRI Tahun 1945. Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi pada periode 2009 – 2014 merespon masukan dari ketiga kelompok itu dengan membentuk Tim Kerja Kajian Ketatanegaraan. Tim ini kemudian bekerja, salah satunya menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dari serap aspirasi masyarakat itu diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat menginginkan MPR kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara. Dari aspirasi masyarakat itu, dalam Sidang

Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan pada November 2014, MPR periode 2009 – 2014 merekomendasikan tujuh poin untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014 – 2019. Salah satu rekomendasi itu adalah melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Atas rekomendasi itu, 10 fraksi di MPR periode 2014 – 2019 menindaklanjuti dan menyetujui dilakukan amendemen terbatas untuk menghidupkan kembali haluan negara (GBHN). Maka pada Sidang Tahunan MPR 2018 Ketua MPR Zulkifli Hasan mengumumkan pembentukan Panitia Ad Hoc (PAH) I yang bertugas mempersiapkan rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara dan Panitia Ad Hoc II yang bertugas mempersiapkan



Arwani Thomafi

perubahan peraturan Tata Tertib MPR dan rekomendasi.

Namun, PAH tidak bisa bekerja karena ada satu kelompok atau fraksi yang tidak mengirimkan nama anggotanya. Akhirnya Rapat Pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian untuk mengkaji dan mendiskusikan soal haluan negara ini. Hingga akhir masa jabatan MPR periode 2014 – 2019, amendemen UUD belum terlaksana. Karena itu, MPR periode 2014 – 2019 merekomendasikan untuk melanjutkan pendalaman terhadap substansi dan bentuk hukum haluan negara.

Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan, amandemen terbatas menyangkut haluan negara sudah lama dikaji di Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR. Rekomendasi MPR Periode 2014 – 2019 merupakan hasil kajian dari Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR. “Kita rumuskan sedemikian rupa sebagai bahan untuk MPR periode berikutnya. Rekomendasi itu untuk kepentingan bersama. Saya sangat berharap dan yakin MPR periode mendatang (2019 – 2024) akan menindaklanjuti rekomendasi ini,” katanya kepada *Majelis*.

Hasil kajian Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR, lanjut Rambe, merupakan masukan dan pemikiran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Karena itu, rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 sangat penting. “Karena itu sejauhmana rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh MPR mendatang kita akan lihat nanti perkembangannya. Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.

Rambe mengakui, untuk melakukan amendemen terbatas terkait haluan negara ini tergantung dari kesepakatan partai politik. Amendemen terbatas atau perubahan UUD sudah diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. “Sebenarnya tidak ada istilah amandemen terbatas dalam UUD. Karena itu, perlu kesepakatan partai politik dan kelompok DPD tentang amendemen terbatas. Amendemen terbatas mesti melalui konsensus politik agar tidak ada kekhawatiran membuka kotak



Tiffatul Sembiring

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pandora untuk mengubah (pasal) yang lain juga,” jelasnya.

Sejalan dengan Rambe Kamarul Zaman, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, fraksi dan kelompok DPD di MPR sudah menyepakati perlunya haluan negara. Sayangnya MPR masa jabatan 2014 – 2019 belum bisa merealisasikan haluan negara itu. Pasalnya, di antara fraksi dan kelompok DPD masih belum ada kesepakatan terkait dengan bentuk hukum yang akan digunakan: apakah dalam bentuk Ketetapan MPR atau cukup dengan undang-undang.

“Masih ada perbedaan pendapat menyangkut bentuk hukum dari haluan negara. Sebagian menghendaki dalam bentuk Ketetapan MPR. Sebagian lagi berpendapat cukup dengan UU,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Senin (16/9/2019). Oleh karena itu, MPR periode 2014 – 2019 menyiapkan rekomendasi kepada MPR periode selanjutnya untuk mendalami persoalan bentuk hukum tersebut.

“Menyangkut perlunya haluan negara, semua fraksi dan kelompok DPD setuju. Tetapi bentuk hukum dari haluan negara itu masih ada perbedaan pandangan. Selain itu, juga belum ada kesepakatan mengenai bentuk draf sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional,” katanya.

Ketua Fraksi PKS Tiffatul Sembiring ikut serta dalam Rapat Gabungan terakhir antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang memutuskan tentang rumusan rekomendasi MPR periode 2014 – 2019. Ada dua rumusan rekomendasi soal haluan negara. Pertama, haluan negara dimuat dalam bentuk ketetapan MPR atau Undang-Undang. Kedua, haluan negara ditetapkan dengan Ketetapan MPR. “Alternatif pertama ini usulan dari Fraksi Golkar, PKS, dan Demokrat,” katanya kepada *Majelis*.

“Akhirnya Rapat Gabungan memutuskan berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum haluan negara ditetapkan dengan Ketetapan MPR, tapi ditambah catatan dari



Muhammad Toha

tiga fraksi, terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui Undang-Undang. Karena sifatnya rekomendasi, bila tidak dengan Ketetapan MPR maka bisa lewat UU,” imbuhnya.

Tiffatul khawatir kalau dibuka proses amendemen terbatas maka bisa menjadi bola liar. Misalnya, DPD akan meminta penguatan kelembagaan. Artinya, mereka juga bisa memutuskan UU. Selama ini dalam proses legislasi, DPD hanya bisa sampai tahap mengusulkan UU dan membahas UU. Kalau proses amendemen dibuka juga dikhawatirkan PDI Perjuangan dan Gerindra mengusulkan kembali ke UUD 1945 yang asli. Jika kembali ke UUD 1945 yang asli maka resikonya MK dan Komisi Yudisial, serta DPD bisa dibubarkan. “Itulah kita tidak memilih amendemen karena bisa melebar kemana-mana,” katanya.

Menurut Tiffatul, haluan negara dibuat agar arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang tidak zig zag atau berbelok arah. “Karena itu pembangunan perlu perencanaan. Jangan berganti presiden maka berganti visi. Tidak cukup dengan perencanaan 5 – 10 tahun ke depan,” katanya.

Sebaliknya, anggota MPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha lebih cenderung untuk melakukan amendemen terbatas. “Saya lebih cenderung ke amendemen terbatas. Alasannya lebih melibatkan para anggota MPR dan partisipasi masyarakat. Secara normatif sah-sah saja memilih dalam bentuk Ketetapan MPR atau UU. Namun, akan lebih merakyat jika melalui amendemen terbatas,” ujarnya kepada *Majelis*.

Bagi M. Toha, jika terjadi dinamika dan perubahan di masyarakat, perubahan konstitusi adalah sebuah keniscayaan untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “Untungnya perubahan atau amendemen UUD dilakukan dengan *addendum*. Artinya, masih menyertakan naskah aslinya sehingga masyarakat mengetahui proses perubahan UUD sekaligus proses perkembangan ketatanegaraan,” ucapnya. □

Tim Majelis

Seputar Konsep dan Isi Haluan Negara

Pokok-Pokok Haluan Negara antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020 - 2045 dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertanian, dan keamanan.

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sudah lama mengkaji reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Sejak MPR periode 2009 – 2014 mengeluarkan rekomendasi untuk reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, MPR periode 2014 – 2019 melakukan kajian dan pendalaman. Badan Pengkajian MPR mendatangi hampir 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui seminar, *focus group discussion*, dan lainnya. Belum lagi masukan dari berbagai kalangan, seperti pakar, ulama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Pendalaman itu untuk menjawab perlu tidaknya haluan negara, bagaimana model haluan negara, bagaimana produk hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan haluan negara.

Respons partai politik pun cukup positif. PDI Perjuangan, misalnya, beberapa kali mengajukan usul tentang GBHN. Terakhir dalam Kongres V PDI Perjuangan di Bali, pada Agustus 2019, partai berlambang kepala banteng itu *keukeuh* ingin menghidupkan kembali GBHN. Di MPR sendiri, fraksi-fraksi dan kelompok DPD merespon positif aspirasi masyarakat itu. Artinya, tidak ada satu pun fraksi atau kelompok DPD yang keberatan untuk menghidupkan kembali GBHN. Semua fraksi dan kelompok DPD sepakat tentang perlunya mereformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Perjalanan mewujudkan haluan negara pun semakin mengerucut. Dari pendalaman dengan berbagai kalangan, Badan Pengkajian pun menyusun draf haluan negara. Pada Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD Rabu, 24 Juli 2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa MPR telah menyiapkan draf pokok-pokok haluan negara. Draft terkait haluan negara ini sudah diserahkan ke masing-masing-masing fraksi dan kelompok DPD untuk dibahas. "Badan Pengkajian MPR sudah menyiapkan draf.



Zulkifli Hasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Draf-nya sudah jadi. Ini akan disempurnakan. Sekarang sudah dibagi ke masing-masing fraksi," kata Zulkifli usai Ragab pada Juli 2019.

"MPR sudah menghasilkan karya," ujarnya lagi. Sebelumnya, Ketua MPR pun sudah mengungkapkan bahwa MPR periode 2014-2019 tidak hanya berhenti pada rekomendasi, tetapi lebih maju lagi, yaitu sudah berbentuk sebuah "karya". Pada saat Ragab, Zulkifli memperlihatkan karya itu berupa draf pokok-pokok haluan negara. Ia memegang sebuah draf berbentuk seperti sebuah makalah yang agak tebal.

Soal draf ini, Bambang Sadono, anggota DPD yang pernah menjabat Ketua Badan Pengkajian, jauh sebelumnya pernah mengungkapkan soal draf GBHN ini. Dalam suatu kesempatan rapat pleno Badan Pengkajian di Makassar, Sulawesi Selatan, setahun lalu, Bambang mengungkapkan Badan Pengkajian MPR tengah menyiapkan draf isi (materi) haluan negara. Rapat pleno itu untuk memperdalam materi haluan negara dengan mengundang beberapa narasumber, baik dari Bappenas maupun akademisi. Pada saat itu, Bambang menyebutkan rencana

Badan Pengkajian untuk memperkenalkan rancangan materi haluan negara itu kepada publik.

Pertanyaannya, seperti apa materi dan substansi, serta isi haluan negara itu? Bagaimana bentuk dari haluan negara itu? Apakah sama seperti Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Delapan Tahun pada masa Orde Lama? Atau materi dan substansi serta isi yang sama seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru?

Pada masa Orde Lama, Dewan Perencanaan Nasional (Depernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Delapan Tahun, yakni untuk periode 1961 - 1969. Rancangan ini diterima menjadi Ketetapan MPRS sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama. Pada 1963, Presiden Soekarno mengubah Depernas menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selama masa itu, banyak kebijakan pembangunan yang berpusat kepada pandangan politik Bung Karno sebagai pusat kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin

kala itu.

Pada masa Orde Baru lain lagi. Saat itu dikenal istilah GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. MPRS pada awal Orde Baru tidak berhasil menyusun GBHN. Tidak bisa dipungkiri untuk menyusun GBHN memang memakan waktu lama.

Untuk membantu tugas MPR menyusun GBHN, pemerintah memberi bantuan. Dalam sidang-sidang umum MPR sesudah Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru selalu memberi bantuan kepada MPR dalam penyusunan GBHN. Maka, presiden (pemerintah) telah menyiapkan bahan-bahan masukan untuk menyusun GBHN bagi sidang-sidang umum MPR tahun 1973, 1978, 1983, dan 1988. MPR menyiapkan susunan dan rancangan GBHN. Setelah rancangan itu siap maka diajukan ke Sidang Umum MPR. Pada saat itu kita mengenal buku GBHN yang tebal dan berjilid-jilid.

Apakah haluan negara yang sekarang sedang disusun MPR sama seperti GBHN pada masa Orde Baru? Bambang Sadono mengatakan, MPR sudah lama mengkaji soal haluan negara tapi bukan seperti GBHN pada masa Orde Baru. "Istilah GBHN ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita akan mengembalikan GBHN seperti pada masa Orde Baru. Padahal tidak seperti itu,"

kata Bambang ketika menjadi pembicara *focus group discussion* di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam rangka Festival Konstitusi dan Antikorupsi pada 10 September 2019.

Karena kesalahpahaman itu, kata Bambang, ada ahli hukum mengatakan bahwa dengan GBHN maka kembali ke masa Orde Baru, pemerintahan yang antidemokrasi dan otoriter. Akibat istilah itu, ada juga pengamat politik sinis terhadap wacana menghidupkan kembali GBHN. "Ada persepsi GBHN seperti masa Orde Baru. Akan ada evaluasi pelaksanaan GBHN setiap lima tahun dan evaluasi terhadap presiden. Padahal bukan seperti itu," tegas anggota DPD dari Jawa Tengah ini.

Bambang menjelaskan, haluan negara yang sedang disusun MPR isinya sangat singkat. Isinya hanya pokok-pokoknya saja. Isi haluan negara adalah program jangka panjang 25 atau 50 tahun yang akan datang dan bersifat mengikat semua lembaga negara. Haluan negara itu menjadi landasan haluan pembangunan seperti GBHN pada masa lalu atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada saat ini.

Apa yang disebutkan Bambang Sadono agak berbeda dengan "karya" (draf) yang ditunjukkan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Draf yang disusun MPR itu berjudul Pokok-Pokok Haluan Negara. Tebalnya 140 halaman. Isinya terdiri dari tujuh bab, antara lain arah kebijakan pembangunan 2020 - 2045 dalam bidang



Hendrawan Supratikno

ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertanahan, dan keamanan. "Ini masih draf, sedang disempurnakan oleh Badan Pengkajian," kata Hendrawan Supratikno, anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan yang juga pimpinan Badan Pengkajian MPR.

Tertulis dalam pengantar Pokok-Pokok Haluan Negara ini, tidak adanya GBHN telah mengakibatkan tidak adanya rencana pembangunan jangka panjang. Pemilihan secara langsung membuat calon presiden dan wakil presiden leluasa menyampaikan visi, misi, dan program saat berkampanye. Keleluasaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan presiden dan wakil presiden ke masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya.

Masih dalam pengantar, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 tidak menggantikan GBHN di masa lalu. Dan, sejak awal pembahasannya, kehadiran kedua UU memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan GBHN.

Haluan negara ini dianggap perlu sebagai dokumen hukum dan politik bagi penyelenggara pembangunan nasional. Dokumen haluan negara yang nantinya ditetapkan MPR akan menjadi pedoman bagi presiden untuk dijabarkan dalam bentuk pembangunan nasional. □

BSC



Bambang Sadono

Ragab Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD

Sepakati **Perubahan Tata Tertib** Pemilihan Pimpinan MPR



Pimpinan MPR berjumlah 10 orang terdiri dari satu orang ketua dan sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Bakal calon pimpinan MPR diusulkan fraksi dan kelompok DPD disampaikan dalam sidang paripurna.

RAPAT Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi Partai Politik dan Kelompok DPD menyepakati perubahan Tata Tertib MPR Pemilihan Pimpinan MPR berkaitan dengan jumlah 10 Pimpinan MPR. Selain itu, Ragab juga menyepakati rekomendasi berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara untuk dilanjutkan MPR periode 2019 – 2024 melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

Demikian kesimpulan Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD

Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Ragab dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi para Wakil Ketua: Mahyudin, Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani. Ragab juga dihadiri Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Badan Penganggaran MPR, dan Lembaga Pengkajian MPR.

Usai Ragab, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Ragab ini merupakan Ragab terakhir bagi MPR periode 2014 – 2019. Agenda selanjutnya, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan MPR 2014 – 2019 pada 27 September 2019. Dalam Ragab ini dibahas

beberapa agenda, yaitu perubahan Tata Tertib MPR, rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 kepada MPR periode 2019 – 2024, dan agenda Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan. “Ragab menyepakati perubahan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR periode 2019 – 2024,” katanya.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, perubahan Tata Tertib MPR berkaitan dengan Pimpinan MPR sebagai turunan dari UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menyebutkan jumlah 10 Pimpinan MPR, yaitu satu ketua dan sembilan wakil ketua. “Ragab sudah menyepakati perubahan Tata





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tertib MPR soal jumlah Pimpinan MPR itu,” ujarnya.

Zulkifli merinci perubahan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan MPR itu. Pertama, Pimpinan MPR berjumlah 10 orang terdiri dari satu orang ketua dan sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Kedua, bakal calon pimpinan MPR diusulkan fraksi dan kelompok DPD yang disampaikan dalam sidang paripurna. Ketiga, setiap fraksi dan kelompok DPD hanya mengajukan satu calon pimpinan MPR. Keempat, batas waktu pengajuan calon pimpinan MPR ditentukan dalam sidang paripurna MPR. Kelima, dalam hal pengajuan calon pimpinan MPR tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam sidang paripurna, maka mekanisme pemilihan pimpinan MPR tetap dilanjutkan.

“Kalau partainya masih gaduh dan belum

mengajukan calon pimpinan MPR padahal sudah lewat batas waktu, sidang paripurna tetap memutuskan pimpinan MPR dan tidak menunggu lagi. Misalnya, ada satu fraksi yang belum menyerahkan nama calon pimpinan MPR maka akan ditinggal,” jelasnya.

“Dengan rumusan ini, menurut saya, pemilihan Ketua MPR akan dipilih secara musyawarah mufakat, karena yang akan berunding hanya 10 calon pimpinan MPR saja. Saya kira pada saatnya nanti siapa yang dipilih menjadi Ketua MPR secara musyawarah mufakat. Itulah Majelis Permusyawaratan sehingga bisa menjadi contoh untuk lembaga lainnya,” sambung Zulkifli.

Selain perubahan Tata Tertib MPR, lanjut Zulkifli, Ragab juga menyepakati mengenai rekomendasi untuk MPR periode 2019–2024.

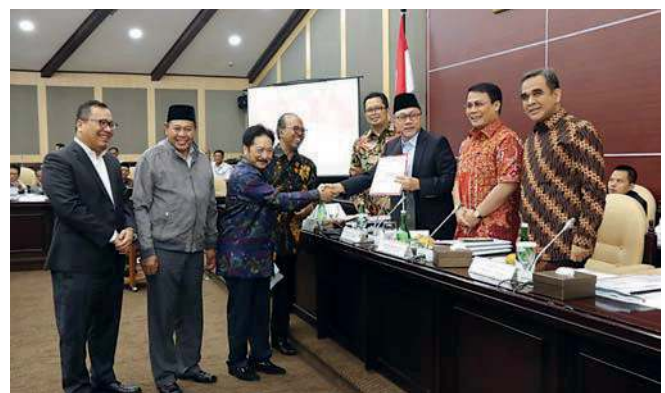
“Ragab memutuskan rekomendasi itu, salah

satunya adalah perlunya menghadirkan pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini direkomendasikan untuk dilanjutkan oleh MPR periode yang akan datang (2019 – 2024) melalui amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945,” ungkapnya.

Zulkifli mengakui, dalam hal rekomendasi ini masih ada sedikit perbedaan pendapat. “Tapi itulah bagusya MPR, semua bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” tuturnya.

Ragab juga membahas agenda Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan pada 27 September 2019. Agenda sidang antara lain pengesahan Tata Tertib MPR, persetujuan rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 kepada MPR periode 2019 – 2024, dan penyampaian kinerja MPR. □

BSC



Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta

Anggota DPR dan DPD Terpilih Ikuti Pembekalan Empat Pilar MPR

Pembekalan Empat Pilar MPR ini menjadi penting guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan tugas majelis.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar kegiatan pembekalan Empat Pilar MPR untuk anggota DPR dan DPD sekaligus juga anggota MPR terpilih masa jabatan 2019 – 2024. Pembekalan berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Jakarta, selama dua hari 28 – 29 September 2019. Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka secara resmi pembekalan kepada anggota anggota MPR terpilih di Gedung Nusantara IV, Sabtu malam (28/9/2019).

Mengawali pengantarnya, Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada anggota DPR dan DPD sekaligus anggota MPR terpilih untuk masa jabatan 2019 – 2024. “Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara dan saudari sebagai anggota DPR dan anggota DPD terpilih sekaligus anggota MPR RI masa jabatan 2019 – 2024. Selamat datang di Rumah Kebangsaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya.

Zulkifli mengatakan pertemuan anggota DPR

dan anggota DPD terpilih dalam pembekalan Empat Pilar MPR ini menjadi momentum untuk mengemban amanah rakyat dan cita-cita konstitusi sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. “Momentum ini menjadi semangat baru untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian dalam tugas konstitusionalnya sebagai anggota majelis,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. “Karena itu mewujudkan demokrasi adalah tanggungjawab majelis sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR bertanggungjawab memujudkan demokrasi konstitusional,” tuturnya.

Zulkifli mengakui demokrasi konstitusional seperti tertuang dalam cita-cita ideal Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD belum sepenuhnya terwujud. “Menjadi kewajiban kita untuk mengawal transisi demokrasi menuju

demokrasi konstitusional sesuai tugas dan kewenangan majelis,” katanya.

Kepada anggota MPR terpilih, Zulkifli mengingatkan sebagai pejabat publik harus memberikan keteladanan. “Anggota MPR sebagai pejabat publik yang dihasilkan dari proses politik harus memberikan keteladanan, pendidikan politik, dan demokrasi yang santun, cerdas, elegan, bijaksana dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, pembekalan MPR menjadi penting guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan tugas majelis,” tegasnya.

Pembukaan Pembekalan Empat Pilar MPR dihadiri Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, dan anggota MPR terpilih masa jabatan 2019 - 2024. Dalam pembekalan kepada anggota MPR terpilih ini selama dua hari, 28 – 29 September 2019, anggota MPR terpilih mendapat beberapa materi pembekalan.



Materi pembekalan di antaranya sejarah, kedudukan, wewenang dan tugas MPR sebelum dan sesudah reformasi; tantangan MPR dalam kajian ketatanegaraan Indonesia; pengenalan Empat Pilar MPR; strategi komunikasi penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR; UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR; Implementasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945; Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bhinneka Tunggal Ika; dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban administrasi anggota MPR periode 2019–2024.

Narasumber pembekalan adalah Hidayat Nur Wahid, Agun Gunandjar Sudarsa, Ahmad Basarah, Bachtiar Aly, Yasonna H Laoly, Zainur Tauhid Sa'adi, Rambe Kamarul Zaman, Ahmad Muzani, Almuzamil Yusuf, Ahmad Farhan Hamid, dan Sesjen MPR Ma'rif Cahyono.

Kewenangan Tertinggi

Usai dibuka secara resmi, penyampaian materi dimulai dengan pemaparan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tentang sejarah, kedudukan, wewenang dan tugas MPR sebelum dan sesudah reformasi. Dalam paparannya, Hidayat mengatakan, meskipun MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi

negara, MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi terkait dengan mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik presiden dan wakil presiden.

“Kalau tidak ada MPR dan tidak ada sidang anggota MPR maka presiden dan wakil presiden tidak dapat dilantik. Kalau tidak ada MPR dan tidak ada sidang MPR maka UUD tidak bisa diubah atau ditetapkan,” katanya.

Hidayat mengungkapkan, MPR sesudah reformasi merupakan MPR yang melucuti kewenangannya dari lembaga tertinggi menjadi lembaga negara saja. “Kalau lembaga-lembaga yang lain berebut untuk mendapat tambahan kuasa dan kewenangan, justru MPR pada masa reformasi melucuti kewenangannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara saja,” ujarnya.

Dari tahun 1972 – 1998, lanjut Hidayat, MPR betul-betul sebagai lembaga tertinggi negara. Saat itu pimpinan MPR sekaligus pimpinan DPR. MPR sebagai lembaga tertinggi melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR memilih presiden dan wakil presiden, MPR juga membuat GBHN karena itu presiden menjadi mandataris MPR, MPR meminta pertanggungjawaban presiden, MPR mem-

punyai hak membuat ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat lembaga politik manapun karena MPR adalah lembaga tertinggi negara.

Namun, reformasi membawa banyak perubahan. Salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan atau amendemen UUD. Dengan perubahan UUD ini kewenangan MPR berkurang. MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. MPR tidak membuat GBHN. “Tapi MPR tetap diberi kewenangan tertinggi terkait dengan UUD dan pelantikan presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan UUD,” jelas Hidayat.

“Karena itu MPR menjadi lembaga yang teramat penting. Anggota MPR berada di lembaga yang mempunyai kewenangan dan tugas-tugas penting,” sambungnya.

Salah satu tugas MPR adalah memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. “Ini adalah perintah UU. Dan, sampai saat ini sudah 32,8% warga Indonesia yang mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR,” ujarnya. □

BSC



Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Kontekstualisasi Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

Perguruan Tinggi memiliki andil penting dalam membentuk Nation and Character lewat wawasan kebangsaan. Dimulai dengan menyiapkan tenaga pendidik berkarakter Pancasilais



DIHADAPAN hampir 5000 (lima ribu) mahasiswa baru Universitas Islam Malang (Unisma), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menekankan pentingnya kontekstualisasi wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Hal ini sebagai upaya merespon tantangan zaman yang berubah dengan cepat.

“Tantangan bangsa mengalami perubahan. Perang terkini menggunakan model *soft power*. Cuci otak dengan memanfaatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, hingga teknologi informasi,” kata Basarah di Unisma Malang Jawa Timur, Ahad (1/9/2019).

Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing. Mulai dari ekstrimisme agama, paham kebebasan, informasi palsu (hoax), hingga ujaran kebencian. Sebagai pengguna internet dan media sosial, tentu saja generasi muda menjadi sangat rentan dan mudah terpapar oleh berbagai propaganda tersebut.

“Tidak jarang generasi muda menelan mentah-mentah informasi tersebut dan turut menyebarkannya, tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi” ujar Basarah yang juga dosen paska sarjana Unisma.



“Nah bagaimana kita menggunakan internet untuk memperkuat wawasan kebangsaan kita? Ini menjadi tantangan kita bersama sebagai sebuah bangsa” ujar Basarah.

Terhadap fenomena tersebut Perguruan Tinggi, menurut Basarah, memiliki andil penting dalam membentuk Nation and Character lewat wawasan kebangsaan. Hal ini bisa dimulai dengan menyiapkan tenaga pendidik yang berkarakter Pancasilais. Pengetahuan yang disampaikan tenaga pendidik akan membentuk pola pikir. Pola pikir akan membentuk keyakinan dan perilaku. Perilaku yang diulang terus akan menjadi karakter.

Kemudian optimalisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila dalam Kegiatan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. “Diperlukan dukungan dan peran pemerintah untuk memanfaatkan kerja sama dengan organisasi kemahasiswaan, seperti ekstra universitas Kelompok Cipayung untuk terlibat membunikan Pancasila di setiap kampus,” tegas Basarah

Terakhir, Basarah juga mengapresiasi kiprah Unisma dalam lanskap pendidikan nasional. Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (NU) terbesar di Indonesia ini dinilai mampu memadukan nilai-nilai Islam moderat dengan semangat toleransi dan kebhinnekaan.

“Harapan kita semoga Unisma terus istiqomah menebar Islam damai, mempropagandakan Islam wasathiyah atau moderat dengan membawa semangat toleransi dan kebhinnekaan,” ujar Basarah. □

Delegasi Panitia Rapimnas KAMMI

Hidayat Nur Wahid: Kembalinya GBHN Semakin Nyata

Fraksi-Fraksi Parpol dan Kelompok DPD di MPR menyetujui adanya haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional.

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan delegasi Panitia Rapimnas II Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tahun 2019. Pertemuan antara Hidayat Nur Wahid dan delegasi KAMMI tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Lantai 9 Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Pada kesempatan tersebut, delegasi Panitia Rapimnas II KAMMI Tahun 2019 dipimpin ketua umumnya, Irfan Ahmad Fauzi.

Kepada Wakil Ketua MPR, Irfan Ahmad Fauzi meminta kesediaannya untuk membuka Rapimnas II KAMMI pada akhir September nanti. Selain itu, Irfan juga menyampaikan beberapa persoalan yang saat ini menjadi perhatian KAMMI dan akan dibahas pada saat Rapimnas II nanti. Antara lain soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), revisi UU KPK, dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, serta wacana kembalinya GBHN dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjawab permohonan tamunya, Hidayat belum dapat memastikan bisa hadir pada Rapimnas II KAMMI 2019 nanti. Peralannya, pada akhir September, baik MPR maupun DPR menghadapi jadwal yang padat. Mulai dari sidang paripurna MPR Akhir Masa Jabatan anggota MPR 2014-2019, hingga pelantikan anggota MPR masa jabatan 2019-2024.

Menyangkut rencana menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, Hidayat mengatakan, rencana tersebut semakin mengerucut dan menuju pada kenyataan. Peralannya, ketiadaan GBHN pasca reformasi menyebabkan ketiadaan keberlanjutan pembangunan. Padahal pembangunan Indonesia bukan hanya untuk masa lima tahun, tapi juga jangka panjang. Karena itu, haluan negara sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

"Indonesia ini terlalu luas, tidak mungkin hanya menggantungkan visi misi Presiden. Apalagi jika Presiden terpilih tidak sampai mendapatkan suara mayoritas. Dikhawatirkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terlalu banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi," ujar Hidayat.

Saat ini, menurut Hidayat, mayoritas fraksi di MPR telah setuju untuk menghadirkan kembali sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Ganjalannya terletak pada seberapa besar perubahan UU NRI Tahun 1945, agar rencana kembalinya GBHN itu bisa direalisasikan. Tetapi menyangkut GBHN semua sudah sepakat.

Menyangkut revisi UU tentang KPK, Hidayat mengingatkan agar perubahan tersebut memiliki satu tujuan, yaitu penguatan terhadap KPK. Jangan sampai UU tentang KPK diubah, karena adanya keinginan untuk

melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Namun, Hidayat juga memberikan catatan yang mesti dialamatkan kepada KPK sendiri. Antara lain, KPK harus lebih berhati-hati dalam menetapkan status tersangka, karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Akibatnya, seorang tersangka bisa terus menjadi tersangka hingga ia meninggal dunia.

"Ada orang yang tetap menjadi tersangka dan tidak pernah disidangkan juga jadi catatan yang kurang baik. Selain itu, KPK harus bisa membuktikan bahwa lembaga tersebut tidak terbang pilih dalam menjalankan tugasnya," kata Hidayat. □

MBO



Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 2014-2019

MPR Periode 2014-2019 Tunaikan Amanat Dengan Sukses

Selama lima tahun masa bakti (2014-2019), MPR di bawah pimpinan Zulkifli Hasan mampu menunaikan amanat dengan sukses sampai masa bakti berakhir.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JUMAT, 27 September 2019, sekitar pukul 08.00 WIB, satu persatu anggota MPR periode 2014-2019 memasuki ruang sidang Gedung Nusantara, di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Pagi hari itu, sesuai agenda, mereka hadir dan mengikuti Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019. Sementara para pimpinan MPR, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta para Wakil Ketua MPR Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Basarah juga sudah bersiap-siap untuk segera memimpin sidang paripurna ini.

Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 menurut jadwal dibuka pukul 09.00 WIB. Dan, tepat pukul 09.00, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang memimpin sidang didampingi para Ketua MPR yang hadir mengetok palu seraya menyatakan sidang dibuka. Namun, berdasar catatan di daftar

hadir, jumlah anggota yang hadir belum memenuhi kuorum. Lalu pria asal Lampung ini menawarkan kepada peserta sidang apakah sidang tetap dilanjutkan atau diskors. Peserta sidang setuju diskors. "Satu jam atau setengah jam?" tanya Zulkifli Hasan. Akhirnya, disepakati sidang diskors selama setengah jam atau 30 menit.

Detik demi detik, menit demi menit berlalu, dan setelah jarum jam menunjukkan waktu skors telah memasuki 30 menit, Zulkifli Hasan mencabut skors dan membuka kembali sidang paripurna. Dan, anggota MPR yang hadir ternyata telah memenuhi kuorum. Dalam memimpin sidang paripurna ini, Zulkifli Hasan didampingi Mahyudin, Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, Ahmad Muzani, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Septa.

Dalam kata pengantar sidang, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penyelenggara-

an Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan MPR periode 2014-2019 ini dalam rangka penyampaian Laporan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas, serta Kinerja Pimpinan MPR. "Melalui sidang ini, Pimpinan MPR menyampaikan laporan kinerjanya selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan", ungkap Zulkifli Hasan.

MPR Masa Jabatan 2014-2019, lanjut Zulkifli Hasan, telah melaksanakan mandat yang diberikan secara baik. Seluruh anggota MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang terprogram secara baik. Badan Sosialisasi tanpa mengenal lelah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metoda, seperti *training of trainers*, *outbound* Empat Pilar bagi mahasiswa,



bela negara melalui kemah Empat Pilar, sosialisasi untuk memenuhi undangan, dan lain sebagainya.

Sampai dengan September 2019, kinerja MPR dalam melaksanakan mandat undang-undang sungguh sangat menggembirakan. Dari survei yang dilakukan MPR bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi menunjukkan, tingkat keterpaparan masyarakat oleh kegiatan sosialisasi Empat Pilar mencapai 32,8% penduduk Indonesia atau telah mencapai sekitar 87 juta orang. Lalu, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara mencapai angka 99,8%.

Masih dari hasil survei, menunjukkan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai sumber hukum tertinggi mencapai 97,8%. Mengenai

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 99,1% masyarakat mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia, dan bahkan menyatakan siap dan bersedia membela negara dari berbagai ancaman. Dan, lebih menggembirakan lagi, mengenai *Bhinneka Tunggal Ika*, sebanyak 99,8% masyarakat Indonesia berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati sesama warga bangsa, walaupun berbeda suku, agama, dan keyakinan.

“Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR perlu dijaga keberlanjutannya agar keterpaparan masyarakat semakin luas, serta masyarakat terus meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, ujarnya Zulkifli Hasan.

Selanjutnya Zulkifli Hasan menjelaskan,

sebagai bagian dari memasyarakatkan Pancasila, sejak MPR di bawah kepemimpinan Bapak Taufiq Kiemas (almarhum), setiap 1 Juni, MPR menyelenggarakan Peringatan Pidato Bung Karno. Peringatan Pidato Bung Karno ini merupakan upaya memberikan pemahaman sejarah kepada warga negara yang merupakan bagian dari usaha menempatkan bangsa dalam konteks perubahan zaman yang terus berlangsung, sehingga sumber-sumber sejarah akan dapat dijadikan sebagai pemersatu dan pengikat identitas bangsa di tengah perkembangan hubungan dunia internasional.

Setiap warga Negara, kata Zulkifli Hasan, harus mengetahui gambaran sejarah negara, sehingga negara berkewajiban untuk sejauh mungkin memperkenalkan visi kesejarahan dan memberikan gambaran tentang sebuah sejarah nasional yang dapat

dipahami dari generasi ke generasi. “Melalui penegasan kesejarahan nasional, identitas bangsa akan terus terpelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, ucapnya.

Komiten kebangsaan itu, menurut Zulkifli Hasan, ingin diwujudkan oleh MPR melalui penyelenggaraan peringatan Hari Lahir Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah bagian dari ikhtiar MPR untuk menggantungkan asa, agar setiap anak bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tempat berpaling dan merujuk.

Zulkifli Hasan lebih lanjut menjelaskan, dalam kurun waktu 2009-2014, Pimpinan MPR telah menyelenggarakan lima kali acara Peringatan Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945, dalam rangka hari Pancasila. Pada periode inilah lahir gagasan agar dalam rangkaian

disisihkan dalam ruang hampa, dan diabaikan sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Padahal sesungguhnya, dan seharusnya, Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa sudah selayaknya senantiasa mengisi ruang publik dan benak setiap warga negara.

“Pada Peringatan Pidato Bung Karno, 1 Juni 2016 di Bandung, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Lahirnya Keputusan Presiden yang menetapkan 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila telah mengakhiri perdebatan tentang kapan sebenarnya Pancasila dilahirkan oleh pembentuk negara”, ucapnya. Lahirnya keputusan itu dianggap sebagai panduan

kan oleh para pendiri bangsa adalah suatu dokumen hukum yang khas. UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang.

Hari Lahir MPR setiap tanggal 29 Agustus juga selalu kita peringati dalam kerangka untuk meneguhkan perjalanan sejarah perkembangan ketatanegaraan, dan MPR dalam sistem ketatanegaraan yang telah melampaui beberapa periode. Dan, pada setiap periode terdapat ciri tersendiri yang kesemuanya menunjukkan kedudukan, peran, dan fungsi MPR dalam praktik



peringatan Hari Lahir Pancasila dilakukan kegiatan ‘napak tilas’ sejarah perjuangan Bung Karno. Sebagai kegiatan untuk melanjutkan tradisi napak tilas tersebut, Pimpinan MPR Masa Jabatan 2014-2019 menyelenggarakan acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 pada 2015 di Blitar, dan pada 2016 di Gedung Merdeka, Bandung. “Pada peringatan Pidato Bung Karno di Blitar, sekaligus diluncurkan gerakan *Ini Baru Indonesia*”, tegasnya.

MPR menggagas gerakan ini, sebut Zulkifli Hasan, sebagai upaya untuk mendorong implementasi dan revitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara yang sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini lahir dari keprihatinan, betapa dewasa ini nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ke-Indonesiaan mulai sering ditinggalkan,

atau pedoman resmi tentang Pancasila dengan maksud agar segenap komponen bangsa dapat memahami dan memaknai nilai-nilai falsafah Pancasila sesuai maksud para pembentuk negara.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengungkapkan, hal lain yang selalu dijadikan momentum untuk menghargai dan mengingatkan pada sejarah bangsa, MPR senantiasa memperingati Hari Konstitusi setiap 18 Agustus. Peringatan ini telah digagas oleh MPR periode 2004-2009 di bawah kepemimpinan Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., yang kemudian Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menetapkan tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi.

Melalui Peringatan Hari Konstitusi kita melakukan refleksi sekaligus merenungkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masih ada kegiatan pimpinan MPR lainnya. Lalu Zulkifli Hasan menyebutkan, sesuai ketentuan yang diatur di dalam Tata Tertib, Pimpinan MPR berwenang mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas. “Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, Pimpinan MPR telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya”, ungkapnya, seraya menyatakan, forum pertemuan itu mempunyai nilai strategis. Kemudian, pimpinan MPR juga melakukan kunjungan kerja ke daerah, kunjungan kerja ke wilayah perbatasan, kunjungan kerja ke industri strategis, dan penerimaan delegasi. □

AWG

Hasilkan Dua Keputusan Strategis



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBELUM menguraikan laporan kinerja MPR selama 5 tahun, Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai pimpinan Sidang Paripurna MPR Masa Akhir Jabatan 2014-2019 meminta persetujuan kepada peserta sidang untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Sesuai keputusan Rapat Gabungan MPR pada 23 september 2019, bahwa sebelum penyampaian Laporan Pelaksanaan Wewenang dan Tugas serta Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2014-2019 dilakukan penetapan keputusan MPR, yaitu Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR dan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Dalam Rapat Gabungan itu seluruh Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati Rancangan Perubahan Tata Tertib dan Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Mengenai Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-

2019, khususnya berkenaan dengan Pokok-pokok Haluan Negara, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, selain untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui undang-undang.

Mengikuti ketentuan pasal 90 Tata Tertib MPR, Zulkifli Hasan minta persetujuan peserta sidang terhadap Rancangan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR dan Rancangan Keputusan MPR tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR pada 23 September 2019. "Apakah dapat disetujui?," ujar Zulkifli Hasan, yang disambut serentak peserta dengan kata: "setuju." Dan, tanpa ragu lagi, Zulkifli Hasan langsung mengetok palu sidang sebanyak 2 kali. "Terima kasih", ujarnya. Dengan demikian dua rancangan keputusan itu sah menjadi Peraturan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR.

Terkait Peraturan Tata Tertib MPR, Zulkifli Hasan menuturkan, itu merupakan langkah dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan sebagai implikasi dari adanya perubahan UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Dengan tata tertib yang baru, MPR masa jabatan 2019-2024 dapat langsung menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya", ujarnya.

Dalam Peraturan Tata Tertib MPR, Bab V Bagian Kedua, Pasal 19 ayat (1), Pimpinan MPR berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari: 1 (satu) orang ketua dan 9 (sembilan) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Untuk memilih Ketua MPR, menurut peraturan itu seperti diatur dalam ayat (6), calon Pimpinan MPR yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bila ayat (6) tidak mencapai mufakat maka pemilihan Ketua MPR selanjutnya mengacu pada Tata Cara Pemilihan Ketua MPR, Pasal 21 ayat (1). Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut: a. pemungutan suara; b. penghitungan suara; dan c. penetapan hasil penghitungan suara.

Terkait Rekomendasi MPR, pria asal Lampung itu menjelaskan, dalam Rapat Gabungan seluruh Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati Rancangan Perubahan Tata Tertib dan Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019. Mengenai Rancangan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, khususnya yang

berkenaan dengan Pokok-pokok Haluan Negara, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, selain memungkinkan untuk ditetapkan dalam Ketetapan MPR, juga terbuka kemungkinan untuk diputuskan melalui undang-undang.

Sementara Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 ditetapkan sebagai salah satu wujud tindak lanjut MPR terhadap rekomendasi MPR sebelumnya, serta bagian dari pelaksanaan tugas menindaklanjuti hasil kajian ketatanegaraan dan penyusunan rekomendasi terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah.

Dalam Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 tercantum: Pasal 1. Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Masa Jabatan 2014 – 2019 meliputi: a. Pokok-Pokok Haluan Negara; b. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah; d. Penataan Sistem Presidensial; e. Penataan Kekuasaan Kehakiman; f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara; g. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Soal haluan negara, dijelaskan dalam Pasal 2. Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf a, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019 berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, termasuk membangun konsensus politik yang memungkinkan ditetapkannya dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan catatan terdapat pandangan dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara juga dimungkinkan ditetapkan dalam bentuk undang-undang.

Sedang Pasal 3. Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 melanjutkan kajian lebih mendalam. Untuk Pasal 4. Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf g, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya.

Dari dua Keputusan MPR, yakni Peraturan Tata tertib dan Rekomendasi MPR 2014-2019, Zulkifli Hasan menyebut, “dua keputusan MPR yang telah ditetapkan, merupakan hal yang sangat strategis dan menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Kinerja MPR masa jabatan 2014-2019”. □

AWG



MPR Raih BMN Awards dan Opini WTP 5 X Berturut-turut

MPR mendapatkan apresiasi BMN Awards sehingga aset-aset MPR sudah dilakukan penataan yang lebih terbuka, transparan, dan memiliki akuntabilitas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kedua penghargaan yang diterima MPR, yakni penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014 – 2018 dan Barang Milik Negara (BMN) Awards.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berhasil terus-menerus memperbaiki pengelolaan BMN dengan menganugerahkan penghargaan pengelolaan BMN atau BMN Award 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada 39 K/L, salah satunya lembaga MPR, yang memiliki kinerja terbaik dalam lima kategori BMN Awards. Lima kategori tersebut yakni: (1). utilisasi BMN; (2). kualitas pelaporan BMN; (3). sertifikasi BMN berupa tanah; (4). peningkatan tata kelola berkelanjutan (continuous improvement); dan

(5). kerjasama tata kelola antar K/L (peer collaboration).

Apresiasi penghargaan WTP lima kali berturut-turut dan BMN Award disampaikan Menkeu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 dengan topik: "Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju" di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurut Sekretaris Jenderal MPR, Dr. H. Ma'ruf Cahyono, BMN Awards dari Kementerian Keuangan itu menunjukkan reformasi birokrasi di MPR, khususnya di bidang pengelolaan BMN berjalan semakin baik. "Di samping kita memperoleh penghargaan WTP lima kali berturut-turut yang artinya pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, kita juga meraih BMN Awards yang berarti pengelolaan, laporan, dan administrasi barang milik negara juga berjalan baik," katanya.

Dengan mendapat BMN Awards, lanjut Ma'ruf, MPR telah mendukung reformasi birokrasi di bidang pengelolaan aset. Secara nasional

pengelolaan aset sedang menjadi prioritas utama. "MPR mendapatkan apresiasi BMN Awards sehingga aset-aset MPR sudah dilakukan penataan yang lebih terbuka, transparan, dan memiliki akuntabilitas. Bagaimanapun aset-aset negara itu merupakan sesuatu yang amat penting," jelasnya.

Ma'ruf menambahkan, data-data BMN merupakan salah satu alat monitoring untuk mengambil kebijakan. "Dengan data BMN yang tertib dan akurat kita bisa menilai secara riil aset yang kita miliki. Sehingga BMN sebagai sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintah bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien," ujarnya.

BMN yang tertib dan akurat serta akurat tabel di MPR, lanjut Ma'ruf, juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemerintah yang sedang melakukan penertiban aset nasional di Indonesia. "Setjen MPR memberi dukungan besar dengan mengikuti kebijakan pemerintah untuk menertibkan aset-aset nasional," pungkasnya. □

BSC

USU Juara Pertama Lomba Debat Konstitusi MPR

Dalam debat itu, Universitas Sumatera Utara yang bersikap kontra terhadap wacana presiden dan wakil presiden hanya memegang jabatan 7 tahun dan satu kali masa jabatan berhasil mempertahankan argumentasinya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

UNIVERSITAS Sumatera Utara menjadi pemenang pertama Lomba Debat Konstitusi MPR. Sedangkan Universitas Andalas yang menjadi lawan debat keluar sebagai juara kedua. Grand final Lomba Debat Konstitusi berlangsung di Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Sebelumnya, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menjadi juara ketiga. Lawan debatnya Universitas Mulawarman sebagai juara keempat. Sedangkan pemenang pembicara terbaik dalam Debat Konstitusi adalah Raudhatul Jannah dari Universitas Syiah Kuala.

Pada grand final itu juga diumumkan pemenang untuk Lomba Academic Constitutional Drafting dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Sistem Ketatanegaraan. Untuk kategori naskah terbaik Academic Constitutional Drafting diraih Universitas Gajah Mada.

Sedangkan juara pertama Lomba Academic Constitutional Drafting direbut Universitas Diponegoro. Juara kedua Universitas Gajah Mada, dan juara ketiga Universitas Indonesia.

Untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah, juara

pertama diraih oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Marco Hardiyanto (Universitas Indonesia). Juara kedua Rima Lestari dan Nurafni Kusumawardhani Affandi (Universitas Padjajaran). Juara ketiga Safira Noor Ramadhanty dan Krisnamurti Ardianto (Universitas Airlangga).

Pokok perdebatan dalam grand final Lomba Debat Konstitusi adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 7 tahun dan hanya satu kali masa jabatan.

Dalam debat itu, Universitas Sumatera Utara yang bersikap kontra terhadap wacana presiden dan wakil presiden hanya memegang jabatan 7 tahun dan satu kali masa jabatan berhasil mempertahankan argumentasinya.

Tim Universitas Sumatera Utara dalam argumentasinya menegaskan, sudah menjadi ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa presiden dipilih secara langsung. Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ini merupakan mekanisme yang ideal. Bila selama lima tahun pertama presiden dan wakil presiden kurang memuaskan maka

rakyat akan menjatuhkan punishment untuk tidak memilih pada periode berikutnya.

Alasan lainnya adalah tidak ada urgensi untuk membatasi satu kali masa jabatan presiden. Masa jabatan selama 7 tahun akan merugikan, karena jika kinerja presiden tidak bagus rakyat harus menunggu selama 7 tahun untuk bisa mengganti presiden. Pembatasan satu kali masa jabatan bisa mengurangi motivasi presiden agar bisa terpilih kembali.

Juri Lomba Debat Konstitusi, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan, dalam proses debat konstitusi yang sudah berlangsung dua hari ini baik sikap pro dan kontra bukan untuk mencari benar atau salah, baik atau buruk. "Tidak ada benar atau salah secara akademik, dan tidak ada baik dan buruk secara etik. Pada akhirnya semua adalah soal pilihan," katanya.

Menurut Ma'ruf, MPR dan dewan juri mengapresiasi para peserta Lomba Debat Konstitusi yang cerdas dan kritis dan telah mampu melakukan evaluasi pada sistem tata negara, konstitusi dan pelaksanaan konstitusi. "Ini adalah masukan yang berharga untuk MPR," ujarnya.

Sesuai ketentuan UU MD3 pada Pasal 5, lanjut Ma'ruf, gagasan dan pemikiran dalam Debat Konstitusi ini adalah bentuk dari aspirasi masyarakat. Peserta Lomba Debat Konstitusi merupakan SDM Unggul sesuai tema HUT ke 74 Kemerdekaan Indonesia, yaitu: Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. "Kekritis dan kemampuan melakukan analisis historis, sosiologis, filosofis, mudah-mudahan bisa disumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara," harapnya.

Juri dalam Debat Konstitusi ini adalah Rambe Kamarulzaman (Ketua Fraksi Partai Golkar MPR), Maria Farida (Mantan Hakim Konstitusi), Prof. Ratno Lukito (pakar hukum tata negara), Rully Chairul Azwar (Ketua Lembaga Pengkajian), Ma'ruf Cahyono (Sesjen MPR), Yana Indrawan (Kepala Pusat Pengkajian MPR). □

BSC

Sejarah Bandara Indonesia

SOEKARNO - HATTA JAKARTA



Bandara Di Atas Tanah Tuan Mayor

Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda membangun dunia kedirgantaraan di Batavia (Jakarta). Di atas hamparan tanah milik Mayor Martin - yang kemudian dikenal kawasan Kemayoran – dipilih sebagai bandara baru. Disebut bandara baru, karena sebelumnya sudah ada Lapangan Terbang Cililitan, atau sekarang dikenal Bandara Halim Perdana Kusumah. Di Kemayoran banyak terjadi peristiwa penting terkait dengan Perang Dunia II. Di tahun 1940 sudah digelar Air Show untuk memperingati kelahiran Ratu Belanda. Di sini pula lahir cikal bakal Maskapai Garuda.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Gubernur Jenderal Pieter Both

PADA tahun 1620-an, Batavia merupakan sebuah wilayah yang masih banyak hamparan ladang, sawah, hutan, dan tanah-tanah kosong. Pada masa itu, daerah yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa dan kemudian berganti Jayakarta ini sudah dikuasai oleh VOC. Untuk mengurus usaha dagang di kawasan Hindia Belanda, pemerintah kolonial membentuk satu pemerintahan administrasi di bawah Gubernur Jenderal Pieter Both.

Pria kelahiran Amersfoort, Belanda, itu awalnya adalah seorang Laksamana Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Selepas bertugas di kesatuan, dia ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Dan, dia adalah gubernur jenderal pertama di Hindia Belanda. Mandat utama sebagai orang nomor satu penguasa koloni adalah monopoli perdagangan. Selama menjadi gubernur jenderal, Both dinilai. Ia mampu melakukan perjanjian perdagangan dengan pusat-pusat perdagangan dan kekuasaan di Maluku. Tak hanya berhasil dalam upaya memonopoli perdagangan, namun Both juga mampu mengusir Spanyol dari Tidore.

Upaya monopoli sebagaimana tugas yang diberikan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda tidak hanya menjadi watak pemerintahan Negeri Orange dan VOC, namun juga menular kepada orang-orang Belanda yang ada di wilayah jajahannya. Salah satunya pada Komandan Tentara VOC, Mayor Isaac de l'Ostal de Sain-Martin. Sebagai orang yang memiliki kekuasaan, pria

berdarah Perancis itu menguasai ratusan hektar tanah yang ada di Batavia. Tanah itu tersebar dekat Weltevreden, Ancol, Krukut, dan Cinere.

Sebagai penguasa tanah yang luasnya ratusan hektare membuat dia terkenal di seantero Batavia, sehingga masyarakat menyebut kawasan di dekat Weltevreden sebagai tanah Tuan Mayor. Sehingga apabila orang ke sana menyebutnya pergi 'Ke' Mayor-an. Dari sinilah konon nama Kemayoran asal muasal dari situ. Tapi, ada versi yang menyebut soal nama Kemayoran tersebut. Pada 1929, pemerintah kolonial Belanda membangun asrama militer di dekat Weltevreden. Asrama itu dikhususkan bagi perwira menengah berpangkat Mayor. Jadi, dari asrama militer khusus untuk para mayor itulah muncul nama Kemayoran.

Pada 1924, pemerintah kolonial memiliki lapangan terbang yang berada di kawasan Cililitan (Jakarta Timur). Lapangan terbang itu bernama *Vliegveld Tjililitan* (Lapangan Terbang Cililitan). Pada masanya, lapangan terbang yang sekarang menjadi Bandar Udara Halim Perdana Kusumah sudah melayani penerbangan internasional. Buktinya pada 1924, bandara ini sudah didarati pesawat Fokker yang terbang secara estafet dari Amsterdam. Peristiwa ini disebut sebagai penerbangan pertama internasional di Hindia Belanda.

Meski sudah memiliki lapangan terbang, pemerintah kolonial terus mengembangkan dunia kedirgantaraan. Ada proyek baru, yakni pembangunan lapangan terbang dengan pilihan tempat berada di Kemayoran. Pilihan jatuh di sana, sebab pada 1934



Vliegveld Tjililitan (Lapangan Terbang Cililitan)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



daerah itu masih berupa hamparan sawah, rawa, ladang, serta penduduknya tidak sepadat tahun-tahun berikutnya. Alasan kedua memilih Kemayoran, karena daerah ini berada sekitar 1 km dari laut (Laut Jakarta), sehingga ideal atau cocok dengan standar keamanan lapangan-lapangan terbang.

Cangkulan pertama pembangunan lapangan terbang Kemayoran ini terjadi pada 1934. Bandar udara itu memiliki rancangan dua landasan pacu yang bersilangan, yakni landasan pacu utara-selatan (17-35) dengan ukuran 2.475 x 45 meter, dan landasan pacu barat-timur (08-26) dengan ukuran 1.850 x 30 meter. *(Karena landasan pacu yang dibangun saat itu sangat*

mayoran. Pada 6 Juli 1940, pesawat milik KNILM (*Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij*), DC-3 Dakota dengan registrasi PK-AJW yang diterbangkan dari Lapangan Terbang Cililitan mendarat di Kemayoran. Esoknya, pesawat itu lepas landas terbang menuju Australia.

Untuk mengelola Bandar Udara Kemayoran, pemerintah mempercayakan pada KNILM. Saat peresmian, beragam ukuran pesawat milik KNILM mendarat di bandar udara itu, seperti pesawat Douglas DC-2 Uiver, Douglas DC-3 Dakota, Fokker F.VIIb 3m, Grumman G-21 Goose, de Havilland DH-89 Dragon Rapide, dan Lockheed L-14 Super Electra. Dua bulan setelah itu, penghuni Kemayoran bertambah

Pada masanya, Kemayoran tidak hanya berfungsi sebagai tempat penerbangan sipil dan *air show*, namun juga pernah digunakan sebagai pangkalan militer, itu terjadi ketika Perang Pasifik, Perang Dunia II. Ketika perang, bandar udara itu menjadi tempat *wira-wiri* pesawat tempur dan pendukungnya, seperti Martin B-10, Martin B-12, Koolhoven F.K.51, Brewster F2A Buffalo, Lockheed L-18 Lodestar, Curtiss P-36 Hawk, Fokker C.X, dan Boeing B-17 Flying Fortress.

Karena keberadaan Bandar Udara Kemayoran diendus oleh lawan Sekutu, Jepang, maka bandar udara ini dijadikan sebagai pangkalan pertahanan. Untuk itu, ketika Jepang menyerbu Indonesia,



Bandar Udara Kemayoran



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

modern, sehingga pada 1960-an, ketika Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) —sekarang TNI AU — di bawah pimpinan Marsekal Omar Dhani, menjadikan Bandara Kemayoran itu sebagai pangkalan angkatan udara. Alasannya, bandara itu bisa didarati pesawat jet canggih buatan Uni Soviet). Pastinya juga dibangun terminal keberangkatan dan kedatangan para penumpang. Terlihat di gambar-gambar yang beredar, bangunan terminal sepanjang sekitar 100 meter dengan tiga lantai.

Setelah pembangunan berproses, akhirnya pada 8 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran diresmikan. Tapi, selama dua sebelum bandar udara itu dibuka, di sana diadakan uji coba kedatangan dan keberangkatan pesawat ke dan dari Ke-

dengan kedatangan Douglas DC-5 dan Sikorsky S-43 Baby Clipper.

Sebagai bandar udara baru, pengelola seperti tancap gas untuk mempromosikan Kemayoran. Buktinya, untuk memperingati ulang tahun Ratu Belanda, Wilhemina, pada 31 Agustus 1940, di tempat itu digelar *air show* atau pameran kedirgantaraan. Dalam acara pertama kali digelar di Indonesia atau bahkan Asia, selain pesawat milik KNILM juga dipamerkan pesawat milik penggemar olahraga dirgantara yang bernaung di *Aeroclub*. Pesawat olahraga kedirgantaraan itu seperti Buckmeister Bu-131 Jungmann, de Havilland DH-82 Tigermoth, Piper J-3 Cub, dan Walraven 2. Walraven 2 merupakan pesawat yang pernah melakukan penerbangan Batavia - Amsterdam pada 27 September 1935.

Kemayoran merupakan objek penting yang hendak dikuasai. Dalam penyerbuan yang terjadi pada 9 Februari 1942, pesawat-pesawat tempur Jepang mampu menggasak pesawat tempur Sekutu. Akibatnya, dua DC-5, dua Brewster, dan satu F.VII milik Sekutu luluh lantak. Agar kerugian yang dialami pemerintah Belanda tidak banyak maka pesawat-pesawat milik KNILM segera diselamatkan dengan diterbangkan ke Australia. Setelah itu, Maret 1942, Jepang menguasai dan menduduki Kemayoran.

Ketika bandar udara itu dikuasai Jepang maka pesawat-pesawat berlambang matahari naik turun di Kemayoran. Sejumlah pesawat yang pernah mendarat dan tinggal landas di bandar udara itu adalah Mitsubishi A6M Zero, Showa/Nakajima L2D, Nakajima

Ki-43 Hayabusa, Tachikawa Ki-9, dan Tachikawa Ki-36.

Ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu — sebagai akibat kalah dalam Perang Dunia II yang diawali dijatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki — maka penguasaan terhadap Kemayoran pun berganti. Kemayoran bukan lagi dikuasai oleh Jepang, namun oleh Sekutu dan *Nederlandsch Indië Civil Administratie* (NICA). Oleh karena pesawat KNILM masih berada di Australia maka Kemayoran saat itu banyak dilandasi oleh pesawat milik Sekutu, seperti Supermarine Spitfire, North American B-25 Mitchell, North American P-51 Mustang. Tak hanya pesawat pembom ada di Kemayoran dalam masa peralihan itu, tapi pesawat penumpang semacam Douglas DC-4, C-54 Skymaster, Douglas DC-6, dan Boeing 377 Stratocruiser juga melakukan operasionalnya.

Meski Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun pengoperasian bandara seperti halnya tetap berada di bawah pengelolaan KLM, maskapai milik Belanda. Untuk melayani penerbangan domestik di Indonesia, pada 1 Agustus 1947, KLM membentuk anak perusahaan yang bernama KLM-IIB (*KLM Interinsulair Bedrijf*). Maskapai ini mempunyai bisnis melayani penerbangan ke daerah-daerah di Indonesia.

Pesawat yang dimiliki oleh KLM-IIB adalah pesawat bekas milik KNILM dan Skuadron XX KNIL.

Anak perusahaan KLM ini seperti halnya tanpa saingan sehingga terus berkembang. Sasaran penerbangannya tidak hanya kota-kota di Indonesia, namun juga sampai Singapura, Penang (Malaysia), dan Manila (Filipina). Pada masanya jumlah penumpang pesawat sudah melimpah. Tahun 1949 jumlah penumpang mencapai 23.000 orang dan 1000 ton kargo. Anak perusahaan inilah yang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

selanjutnya menjadi cikal maskapai penerbangan Indonesia, Garuda. Pada 28 Desember 1949, KLM-IIB dinasionalisasikan dan menjadi Garuda Indonesia. Nasionalisasi terjadi, karena Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

Pasca pengakuan kedaulatan membuat berbagai macam usaha yang dikelola oleh

Belanda diserahkan kepada Indonesia. Untuk mengurus Kemayoran, pemerintah menyerahkan kepada Djawatan Penerbangan Sipil. Sesuai perkembangan zaman dan agar pengelolaannya lebih fokus, profesional, dan mampu memberi keuntungan maka pada 1960 dibentuklah Perusahaan Negara Angkasa Pura. Perusahaan BUMN untuk mengurus Kemayoran, dan pemerintah menyokong pendanaan sebesar Rp 15 juta. Karena semakin meningkatnya kesibukan Kemayoran maka pada masa itu

pemerintah terus menambah dan memodernisasi pelayanan, seperti dengan mengalihkan bangunan terminal, bangunan penunjang lain seperti *runway*, *taxiway*, *apron*, hangar, dan peralatan operasional.

Sebagai bandara internasional dan domestik, pada 1970-an Kemayoran sangat kewalahan dalam mengatasi pergerakan penumpang dan pesawat. Agar beban Kemayoran berkurang, pada 10 Januari 1974, pemerintah menjadikan Bandar Udara Halim Perdana

Kusumah, yang sebelumnya Lapangan Terbang Cililitan, sebagai bandar udara kedua untuk melayani penerbangan sipil. Padatnya Kemayoran tercatat pada 1980-an dengan kesibukan mencapai 100.000 penerbangan per tahun, dengan kapasitas penumpang mencapai empat juta orang. □

AWG/dari berbagai sumber

Karena Tintin, Kemayoran Minta Dilestarikan

Sebagai bandar udara internasional, Kemayoran banyak disinggahi orang-orang penting. Mulai dari kepala negara, kepala pemerintahan, artis dunia seperti Charlie Chaplin, komikus Herge dan lainnya. Kisah komikus Tintin saat transit di bandara menjadikan dorongan agar Kemayoran dijadikan cagar budaya. Di lokasi yang bersebelahan dengan Sunter itu, sekarang banyak berdiri apartemen elit.

BAGI penggemar komik serial Tintin tentu tahu bagaimana cowok dengan gaya rambut jambul itu berpetualang. Sebagai seorang wartawan, Tintin juga seorang detektif. Dalam membongkar rahasia sebuah misteri atau kejahatan

bersama anjingnya yang bernama snowy, Tintin keluar masuk ke berbagai Negara, sehingga komik itu ada yang berjudul *Tintin di Tibet*, *Tintin di Amerika*, *Tintin di Soviet*, dan *Tintin di Kongo*.

Sebagai komik yang digemari banyak

orang di negeri ini, terutama remaja, ada pertanyaan mengapa penulis komik, Herge, tidak membuat petualangan ciptaannya itu mencari, memburu, dan membongkar kejahatan atau misteri di Indonesia, sehingga komiknya berjudul *Tintin di Indonesia*. Herge

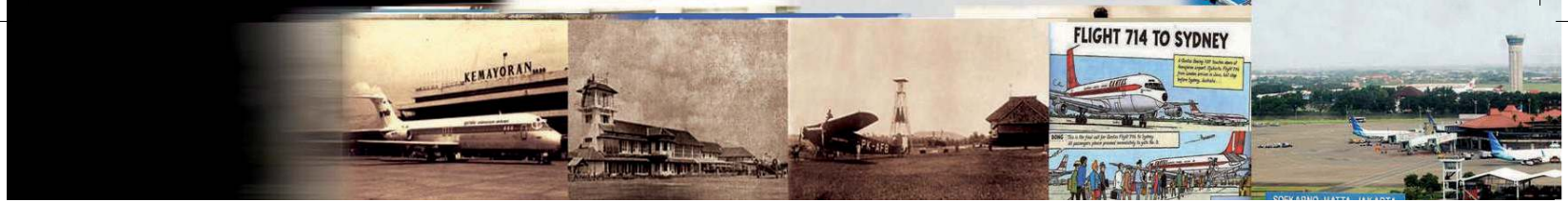


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sudah tiada sehingga pertanyaan itu tidak bisa dijawab.

Meski tidak ada petualangan Tintin di Indonesia, namun Herge menceritakan sepenggal adegan Tintin bersama Kapten Haddock dan Proffesor Calculus saat transit di Bandar Udara Kemayoran ketika hendak ke Australia. Dalam seri petualangan dengan judul *Penerbangan 714* sebenarnya lebih banyak obrolan 'srimulatan' antara Calculus dan Haddock. Calculus setelah melihat sebuah tulisan di dinding terminal dengan kalimat *Kemajoran (Djakarta) International Airport*, dengan suara lantang di hadapan Tintin dan Haddock berkata: "Lihat ini Kemayoran, kita di Jakarta atau bukan?".

Sepenggal kisah Tintin itu rupanya memberi kesan yang sangat mendalam bagi penggemar Tintin di Indonesia, terutama di Jakarta. Cerita yang terus dibaca dan diulang-ulang akhirnya membawa kesan seolah-olah memang Tintin benar-benar pernah ke Kemayoran (Jakarta). Padahal sosok Tintin adalah semata rekaan Herge.

Dari sinilah maka komunitas penggemar Tintin selalu peduli terhadap bekas bangunan-bangunan yang pernah difungsikan untuk mendukung operasional penerbangan. Komunitas itu berharap agar pemerintah merawat bangunan-bangunan yang ada, salah satunya menara. Pasalnya, bangunan-bangunan itu menghiasi petualangan Tintin.

"Kami berharap dijadikan cagar budaya", ujar salah satu penggemar Tintin.

Selepas dinyatakan berhenti beroperasi, pukul 00.00 WIB, 31 Maret 1985, fungsi Bandar Udara Kemayoran dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat pesat. Meski sudah tidak ada lagi pesawat yang naik dan turun di sana, namun di tempat itu masih digunakan untuk hal-hal yang terkait penerbangan, seperti test terbang pesawat buatan IPTN, CN-235; dan gelaran *Air Show 1986* yang meriah dan terbesar di Asia.

Selepas dua kegiatan itu, entah karena pengembangan kawasan kota dan membisniskan lahan yang ada, maka pemerintah pada 1985 mengeluarkan keputusan terbentuknya Badan Pengelola Kompleks Kemayoran. Dari sinilah selanjutnya di Kemayoran tumbuh subur perumahan elit, apartemen, dan hotel serta sarana pendukung lainnya.

Kemayoran dalam perkembangannya tidak hanya menjadi tempat pemukiman, namun juga menjadi tempat pameran. Pekan Raya Jakarta yang biasanya digelar di Monas, selanjutnya dipindah ke Kemayoran. Pindahannya ke area baru tersebut sangat dimungkinkan, sebab ruang yang ada mampu menampung ratusan ribu orang. Menjadi arena gelaran pameran dari dalam dan luar negeri semakin masif setelah Kemayoran berdiri Gedung Jakarta International Expo. □

AWG/dari berbagai sumber



Soekarno-Hatta, Tak Sekadar Bandara

Sebagai bandar udara pengganti Kemayoran, Soekarno-Hatta mampu berkembang mengikuti pertumbuhan penumpang dan volume penerbangan. Bandar udara yang dirancang hingga empat terminal itu juga kerap dijadikan pameran kreasi seni.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWAL 2018 merupakan salah satu penanda semakin meningkatnya layanan bandar udara. Pada 2 Januari 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Kereta itu mempunyai trayek Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Bati Ceper, Duri, dan BNI City/Dukuh hingga Bekasi. Dengan beroperasinya kereta berwarna putih itu diharapkan tidak ada lagi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. “Karena semua terintegrasi”, ujar Joko Widodo.

Dengan beroperasinya kereta bandara membuat Soekarno-Hatta tidak kalah dengan bandara-bandara di kota-kota besar lainnya yang sudah lebih dahulu memiliki jaringan *rail*. Dengan beroperasinya kereta bandara juga akan menaikkan tingkat bandara-bandara di Indonesia setara dengan bandara di negara maju. Dengan menggunakan kereta bandara diharapkan perjalanan akan semakin efisien, karena antarterminal juga

sudah dihubungkan dengan Kalayang, kereta ringan.

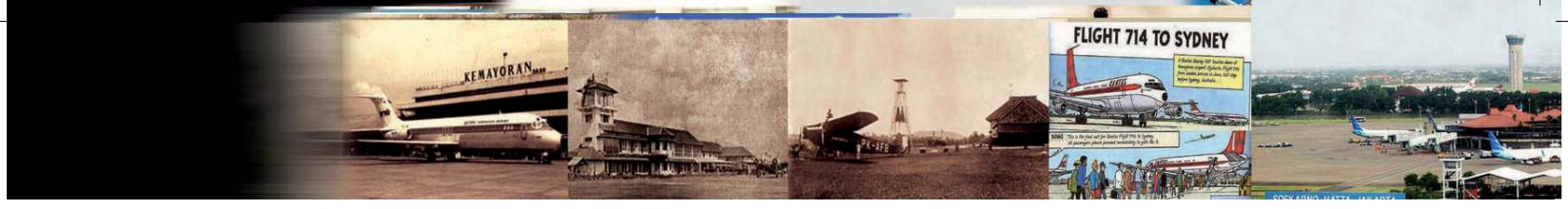
Soekarno-Hatta dibangun untuk menggantikan Bandar Udara Kemayoran. Di tahun 1970-an pemerintah sudah memprediksi bahwa Kemayoran tidak akan mampu mengatasi kenaikan jumlah penumpang dan semakin tingginya volume penerbangan. Selain faktor itu, posisi Kemayoran yang terlalu dekat dengan Bandar Udara Halim Perdana Kusumah yang berfungsi sebagai basis pertahanan udara, mempunyai resiko tersendiri.

Untuk itu dilakukan studi kelayakan di mana lokasi baru yang bisa dibangun bandara pengganti Kemayoran. Studi kelayakan bisa berjalan berkat bantuan USAID. Dari studi itu, akhirnya ditemukan delapan lokasi yang strategis untuk membangun bandara. Kedelapan lokasi tersebut adalah Kemayoran, Malaka, Babakan, Jonggol, Halim, Curug, Tangerang

Selatan, dan Tangerang Utara (Cengkareng). Memilih Kemayoran dan Halim tentu tidak mungkin, sebab di sana sudah ada lapangan terbang. Setelah ditimbang-timbang akhirnya ada dua pilihan, Cengkareng dan Jonggol. Dari dua pilihan itu, akhirnya pilihan jatuh kepada Cengkareng. Sedang Jonggol sebagai pilihan kedua atau cadangan bila ada hal-hal tertentu terjadi.

Ketika Cengkareng ditetapkan sebagai pilihan, perencanaan pembangunan pun dimulai. Mulai dari tender, studi kelayakan landasan pacu dan bangunan terminal, pembebasan lahan, dan studi banding dengan bandar udara kota besar, seperti Schipol Amsterdam Belanda. Pembangunan bandara baru itu diakui banyak melibatkan pihak asing, termasuk Perancis.

Pembangunan bandar udara yang baru jangan dibayangkan sekali hela langsung terwujud, seperti Bandar Udara Soekarno-Hatta saat ini, dari Terminal I hingga Terminal



III Ultimate, namun prosesnya dibangun terminal demi terminal. Pembangunan yang sudah dirancang di awal tahun 1970-an dan pembangunan fisik pada Mei 1980, akhirnya membuahkan Terminal I. Terminal I mulai beroperasi April 1985. Terminal ini dapat menampung penumpang sebanyak 9 juta dalam setahun.

Seiring perkembangan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan transportasi yang cepat, pembangunan di Bandara Soekarno-Hatta mengikutinya. Setelah Terminal I dirasa tidak mampu menampung penumpang dan kuantitas penerbangan, selanjutnya dibangunlah Terminal II. Terminal yang beroperasi pada 1992 itu kapasitasnya mampu menampung dua kali lipat penumpang Terminal I.

Pengelola bandara terus berusaha untuk

mengimbangi semakin meningkatnya jumlah penumpang. Untuk itu pembangunan terminal baru terus dilakukan. Terakhir adalah Terminal III Ultimate. Terminal ini berada di sisi timur-utara bandara. Beda bangunan gedung Terminal Ultimate dengan Terminal I dan II adalah pada desainnya. Apabila terminal sebelumnya bergaya gabungan arsitektur lokal, maka Terminal Ultimate berdesain modern kontemporer.

Terminal seperti rumah kaca itu memiliki luas selebar 422.804 meter persegi. Luas itu terbagi menjadi luas bangunan sekitar 331.101 meter persegi, tempat parkir 85.878 meter persegi, dan bangunan VVIP 6.124 meter persegi. Kapasitas terminal terbaru ini mampu mengantarkan 62 juta penumpang pertahun.

Sebagai terminal paling baru maka fasilitas yang ada pun tercanggih, menggunakan teknologi seperti yang digunakan bandar udara kota-kota besar dunia, seperti mesin penanganan bagasi otomatis atau Baggage Handling System (BHS), mesin check in, mesin pendeteksi bahan peledak, yakni BHS level 5, CCTV yang terdapat di 500-600 titik, WiFi dengan kecepatan 50 MBPS, Fully Intelligence Building Management System (IBMS) dengan teknologi otomatis ramah lingkungan, teknologi pencahayaan sesuai kondisi cuaca, dan rain water system yang menyaring air hujan jadi air bersih.

Sebagai terminal yang paling luas, terlalu capek kalau menuju ke Gate 28 dari Gate 14 atau 15 dengan jalan kaki. Untuk itu pengelola menyediakan *golf car*. Alat angkut ini melayani

penumpang yang enggan jalan kaki menuju ke *gate* yang terlalu jauh atau untuk menuju pintu keluar kedatangan.

Terminal Ultimate dibangun tidak hanya sekadar untuk menghantar dan menyambut penumpang semata. Tempat ini juga dirancang untuk tempat karya seni. Lihat saja di bagian keberangkatan, di selasarnya, sering dipajang karya seni, seperti mobil antik dan kreasi lainnya. Tak jauh dari bagian *check in* juga banyak instalasi seni. Kemudian bila kita tiba di Soekarno-Hatta, di lorong menuju pintu keluar, di dinding-dinding-nya terdapat mural.

Instalasi seni tidak hanya di dalam terminal, di luar terminal kita juga bisa menatap hal serupa. Saat masuk ke gerbang utama bandara, terlihat Patung Garuda. Dipilih Patung Garuda, sebab burung itu merupakan lambang negara. Patung itu mempunyai tinggi 20 meter. Dan, tak kalah penting dari instalasi seni di sana adalah adanya patung Soekarno-Hatta.

Bandara diberi nama kedua tokoh besar itu, menurut Presiden Soeharto, karena sesuai dengan jasa-jasa keduanya. Patung Soekarno-Hatta, kali pertama berada di pintu gerbang bandara yang sekarang ditempati Patung Garuda. Namun, patung yang diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2007 akhirnya dipindah ke bundaran dekat Terminal Ultimate. Alasannya, bundaran itu strategis, dilalui setiap kendaraan yang hendak ke Terminal Ultimate. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Jangan Bandingkan dengan Changi

Indonesia memiliki ratusan bandar udara. Terdapat di Kota Provinsi, Kabupaten/Kota, dan bahkan di pulau terluar. Statusnya juga beragam, ada yang berstatus bandara internasional, domestik, militer, dan juga gabungan. Beda dengan Singapura, hanya memiliki Changi. Jadi, tak tepat bila dibanding-bandingkan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BEBERAPA bulan waktu lalu, bahkan hingga hari ini, di media sosial terutama *facebook*; *facebooker* mengunggah foto diri saat berada di Jewel Changi Airport, Singapura. Di bagian perluasan Bandara Changi itu menjadi hal menarik untuk dipamerkan kepada *facebooker*, sebab di sana ada air terjun buatan dengan ketinggian 40 meter. Air terjun buatan, *rain vortex*, terbesar di dunia itu didesain untuk menghadirkan kesan bahwa airport bukan sekadar bandara, namun juga sebagai tempat wisata. Saat berada di Changi dan ingin menatap air terjun itu, gampang, sebab berada di lintasan Terminal I, II, dan III.

Rasanya hambar atau sekadarnya bila hanya dibangun air terjun. Untuk lebih menikmati suasana yang ada, di sekitar lokasi juga dibangun restoran dengan aneka kuliner, mulai dari rasa lokal hingga masakan antarbangsa. Disebut ada 80 restoran yang siap mengisi perut dan melepas dahaga sambil menikmati *rain vortex*.

Dengan hadirnya Jewel Changi Airport membuat masyarakat dunia semakin berdecak kagum pada bandara milik pemerintah Singapura itu. Sebelumnya bandara ini memang terkenal sebagai

bandara tersibuk, termegah, aeropolis. Meski penumpang membludak dan volume penerbangan yang tinggi, namun semua terkendali dengan baik sehingga jarang terjadi delay, kemacetan di udara, dan problem penerbangan lainnya. Dari sinilah Changi sering diganjar oleh lembaga penerbangan dunia sebagai bandara terbaik. Skytrax pernah menghadiahi Changi sebagai bandara terbaik mengalahkan Bandara Icheon Korea Selatan dan Schiphol Amsterdam Belanda.

Lebih mencengangkan ketika Changi mengeluarkan data penumpang yang ada pada 2018. Dari 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, China, Thailand, Australia, India, Hong Kong, Jepang, Filipina, dan Vietnam, ternyata orang Indonesia paling banyak mengunjungi bandara itu. Jumlahnya mencapai 8,19 juta.

Dari sinilah terkadang kita membandingkan Changi Airport dengan bandara yang ada di Indonesia. Mirisnya menyebut bandara di Negeri Singa itu lebih baik dibanding dengan bandara-bandara yang ada di Indonesia.

Benarkah Changi lebih bagus dengan apa yang kita miliki? Untuk membandingkan,

jangkan cepat-cepat menilai sebab kondisi dua negara berbeda. Singapura yang luasnya tak lebih besar dari luas Provinsi Jakarta hanya memiliki satu bandara, sehingga segala kemampuan yang ada di sana dicurahkan ke satu-satunya bandara itu. Anggaran transportasi udara semuanya ditujukan ke Changi.

Nah di sinilah bedanya, bila Singapura memiliki 1 bandara, Indonesia memiliki 26 bandara internasional, 258 bandara domestik, dan 8 bandar udara khusus militer. Di antara bandara internasional dan domestik itu juga ada yang menjadi basis pertahanan militer dan kepolisian. Semua bandar udara itu tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Banyaknya bandar udara di Indonesia yang dibangun, karena negeri ini memiliki wilayah yang sangat luas sehingga diperlukan sarana transportasi yang cepat. Meski memiliki jalur darat, namun keinginan untuk menggunakan sarana transportasi yang cepat, pesawat terbang, tetap tinggi. Karena itu, di setiap kabupaten dan atau kota dibangun bandar udara. Lihat saja antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang merupakan dua daerah yang bersinggungan, namun kedua wilayah itu memiliki bandar udara masing-masing, Blimbingsari dan Noto Hadinegoro. Dari waktu ke waktu, bandar udara di Indonesia akan terus tumbuh. Disebut di Buleleng Bali, Kediri Jawa Timur, serta daerah lainnya juga akan dibangun bandar udara.

Tentu mengurus satu bandara dengan mengurus 300-an bandara beda tantangan dan kesulitannya. Mengurus satu bandara lebih mudah apalagi semua daya dicurahkan ke sana. Maka, kiranya tak tepat membandingkan bandar udara di Indonesia dengan Changi. □

AWG/dari berbagai sumber

Prof. Ratno Lukito

Pakar Hukum UIN Sunan Kalijaga

Apresiasi Terhadap Program Lomba Konstitusi MPR

SELAMA mengikuti dan menjadi juri ajang lomba MPR, seperti Academic Constitutional Drafting, Debat Konstitusi, dan Karya Tulis Ilmiah, saya merasa ini adalah kegiatan yang sangat berkualitas. Kenapa berkualitas, sebab perlombaan ini menjadi arena sampai sejauh mana mahasiswa bisa menyerap ilmu-ilmunya di bangku kuliah.

Saya melihat perkembangan penguasaan keilmuan mahasiswa saat dan pasca perlombaan tersebut sangat luar biasa. Ini akan menjadi tolak ukur kami para pengajar, sampai sejauh mana ilmu itu terserap dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses transfer ilmu ke anak didik.

Saya rasa, kegiatan perlombaan berkualitas seperti itu mesti ditingkatkan lagi, dan diperluas, dan bukan hanya MPR saja yang melakukannya. Ini penting demi terasahnya kualitas keilmuan mahasiswa Indonesia, dan mesti mendapat dukungan semua pihak, terutama pemerintah dan dunia pendidikan, baik negeri dan swasta. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Rusdy

Petani warga Kabupaten Sambas

Pejabat Mesti Lebih Sering Turun Kebawah

SAYA adalah petani penggarap yang mendapatkan bantuan sertifikat tanah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Bagi rakyat kecil, petani seperti saya, itu sudah sangat istimewa. Baru kali ini saya mendapatkan kemudahan sebagai petani dan dipermudah mendapatkan sertifikat, serta tanah untuk produksi.

Saya tidak peduli siapa pemimpinya, yang penting dia itu harus empati dan turun ke bawah, ke rakyat, lihat bagaimana kondisinya, apa yang dibutuhkan, saya rasa itu. Rakyat di desa-desa masih banyak yang perlu bantuan guna meningkatkan kehidupan mereka.

Saya rasa ke depan, pemerintah pusat dan daerah mesti banyak bekerjasama secara harmonis untuk membangun kesejahteraan petani dan rakyat kecil secara merata di seluruh Indonesia. Pemerintah mesti memperluas program ini, bukan hanya tanah tapi juga akses pendidikan, pekerjaan, investasi, rumah, dan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. □

DER

Agar Pembangunan Terarah, Perlu Haluan Negara

Keinginan menghidupkan kembali haluan negara model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terdengar nyaring di MPR. Haluan negara diperlukan sebab selama ini pola pembangunan yang ada dianggap terjadi secara sporadis dan tak berkesinambungan. Dengan adanya panduan pembangunan nasional diharapkan pembangunan dilakukan setahap demi setahap dan berkesinambungan. Meski demikian perlu dipikirkan lebih jauh dampak amandemen kelima, sebab bisa mengubah struktur tata negara. Berikut pendapat dua anggota MPR mengenai hal ini.

Andi Akmal Pasluddin Anggota MPR Fraksi PKS

Presiden Boleh Berganti, Haluan Negara Tetap



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan daerah sebenarnya mempunyai peran yang sangat besar. Namun dengan adanya perubahan UUD Tahun 1945 membuat posisi MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Meski demikian, sampai hari ini MPR merupakan lembaga dengan kewenangan tertinggi. Hanya MPR yang bisa mengubah undang-undang dasar.

Mengenai bagaimana ke depan apakah MPR mempunyai kewenangan untuk menetapkan haluan negara ala Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR periode 2014-2019 sudah melakukan berbagai kajian, seperti diskusi dengan berbagai perguruan

tinggi, kelompok masyarakat, kelompok profesi. Mereka rata-rata menginginkan agar negara kembali mempunyai GBHN.

Kalau kita amati, GBHN dijadikan panduan oleh pemerintah, mulai dari 1969 sampai dengan 1997. Pada masa reformasi, haluan negara ini dianggap tidak diperlukan lagi. Setelah menangkap aspirasi dari kampus dan berbagai kelompok masyarakat maka diinginkan adanya GBHN. Haluan negara ini perlu agar bangsa ini mempunyai arah dan pedoman yang jelas. Mengapa demikian? Adanya Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, salah satu efeknya adalah sistem perencanaan pembangunan nasional tidak terintegrasi dengan baik.

Meski ada Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, namun pada kenyataannya ternyata tidak cukup dan tidak mempunyai legitimasi yang kuat. Ini bisa terjadi karena undang-undang dibuat oleh DPR dan pemerintah, sementara seharusnya kalau ingin mempunyai legitimasi yang kuat, semestinya MPR yang harus membuat haluan negara. MPR dirasa mempunyai legitimasi kuat, sebab lembaga ini merupakan representasi dari rakyat dan daerah, gabungan anggota DPR dan DPD. Dampak dari Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah tidak ada yang namanya sistem perencanaan pembangunan dari pusat ke daerah.

Tidak adanya haluan negara, presiden dan kepala daerah dalam merancang pembangunan, jalan masing-masing. Presiden mempunyai visi misinya sendiri, demikian pula gubernur, bupati, dan walikota. Jadi, bila Presiden dan kepala daerah tidak ada jaminan bisa memimpin selama 10 tahun, maka pembangunan yang ada tidak akan berkesinambungan. Sistem perencanaan pembangunan akan berubah-ubah.

Nah, kalau kita memiliki pedoman haluan negara, GBHN, yang memiliki jangka waktu menengah dan panjang akan menjadi panduan bagi siapapun yang jadi Presiden dan kepala daerah. Inilah salah satu masukan dari masyarakat yang aktif dijangar oleh wakil rakyat selama keliling Indonesia

untuk menyerap aspirasi.

Bila kajian tentang haluan negara sudah selesai dan rekomendasinya juga sudah ada maka langkah yang diperlukan adalah *political will*, kemauan politik di DPR, dan anggota DPD melakukan perubahan kelima.

Agar bisa menjadi produk hukum bahwa GBHN menjadi pedomannya bagi pemerintah. Kita harus berikan catatan bahwa sebenarnya GBHN juga berfungsi sebagai implementasi Pancasila.

Jadi Presiden dan kepala daerah bisa

berganti, tetapi panduannya sudah ada. Ini penting ditegaskan karena setiap pergantian lima tahun, mereka mempunyai *ego* masing-masing. Selama memimpin ada yang hanya fokus infrastruktur, kemudian lainnya. □

AWG

Didi Irawadi Syamsuddin Anggota MPR Fraksi Demokrat

Dibutuhkan Namun Perlu Kajian Mendalam

ADA plus dan minus mengenai upaya menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan pembangunan nasional model GBHN. Positifnya adalah ingin memaksimalkan peran MPR dalam arah pembangunan agar ke depan pembangunan lebih terarah dan jelas. Keinginan menghidupkan kembali haluan negara bisa jadi karena melihat 4 tahun ada banyak program yang berkaitan dengan janji kampanye yang mungkin tidak optimal. Untuk itu, MPR ingin memaksimalkan masalah ini.

Kami masih terus melakukan pengkajian yang mendalam, karena manakala perubahan kelima memang nantinya diluncurkan, diimplementasikan, tentu akan banyak hal yang perlu pengkajian lebih dalam lagi. Meski banyak wakil rakyat selama ini keliling seluruh Indonesia menanyakan ke kampus-kampus dan kelompok masyarakat di mana banyak dukungan untuk menghidupkan kembali GBHN, tetapi menurut hemat saya masih tetap perlu ada pengkajian lebih dalam lagi.

Saat era Orde Baru dan Orde Lama pasti berbeda dengan sekarang, tetapi sekali lagi tentu perlu pengkajian lebih jauh, karena implikasinya akan sangat luas manakala perubahan kelima nantinya diwujudkan. Banyak hal yang harus dikaji lebih jauh, misalnya apakah kewenangan MPR itu akan kembali seperti masa lalu, atau apakah ada batasan-batasan lain.

Bila kembali seperti masa lalu, jadi pertanyaan, selama ini Pemilihan Presiden secara langsung, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, apakah akan dikembalikan



sepenuhnya ke tangan MPR? Ini akan menimbulkan implikasi yang sangat signifikan di dalam perjalanan demokrasi di negeri kita ke depan.

Saya kira walaupun sudah ada kajian, namun masih tetap perlu diadakan uji publik lebih jauh. Kawan-kawan di MPR, di Lembaga Pengkajian, sudah banyak menerima masukan tetapi untuk bisa meluncurkan lebih jauh, perubahan kelima, andai gagasan ini hendak diwujudkan saya kira harus diadakan pedalaman lebih jauh, setahun atau dua tahun ke depan, dan jangan tergesa-gesa karena masyarakat masih membayangkan yang namanya GBHN adalah masa Orde Baru dan di mana kewenangan MPR di kala itu luar biasa.

Implikasi macam ini tentu harus dikaji lebih jauh, karena ini akan mengubah segala struktur kenegaraan, misalnya akan terjadi

penambahan kewenangan bagi DPR dan MPR, pengurangan kewenangan kepada eksekutif, dan hal-hal seperti harus dikaji. Walaupun pengkajian sudah dilakukan tapi harus lebih jauh lagi. Perlu diadakan uji publik. Lebih banyak lagi pakar dilibatkan sehingga langkah yang baik dan niat yang baik ini kalau kelak diluncurkan perubahan kelima benar-benar siap.

Namun manakala masih ada keraguan maka saya kira kita jangan tergesa-gesa, apalagi implikasinya akan mengarah ke sistem parlementer. Jadi, saya kira banyak hal yang harus didalami lagi, karena selama ini rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah maupun pendek biasanya ada di dalam visi-misi dan program kampanye masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden. Saya kira harus ada pengkajian lebih jauh. □

AWG

Diskusi Panel

Evaluasi Pelaksanaan

UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi memiliki kaitan erat dengan antikorupsi. Apabila masyarakat khususnya, generasi muda umumnya, bisa memahami nilai-nilai konstitusi maka nilai-nilai itu akan menjadi rambu-rambu untuk mencegah perilaku korupsi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di UGM, Yogyakarta, 10 – 11 September 2019. Festival Konstitusi dan Antikorupsi ini merupakan kelanjutan dari festival yang sudah diselenggarakan sebelumnya di Universitas Hasanuddin

Makasar (2016), Universitas Indonesia (2017), Universitas Sumatera Utara (2018).

Beberapa kegiatan diselenggarakan dalam Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di UGM Yogyakarta, antara lain: diskusi panel, pameran konstitusi dan antikorupsi, dan puncak acara berupa penandatanganan deklarasi dan talkshow.

Pada hari pertama Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019, Selasa (10/9/2019), MPR

menggelar diskusi panel dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma’ruf Cahyono membuka secara resmi diskusi panel ini. Narasumber diskusi panel adalah Bambang Sadono (anggota Badan Pengkajian MPR), Prof. Dr. Kelian (Guru Besar Filsafat UGM), Prof. Dr. Ratno Lukito (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).



Dalam pengantar diskusi panel, Ma'ruf Cahyono mengatakan, MPR diberi tugas untuk melakukan kajian dan evaluasi. Setidaknya ada tiga hal yang dievaluasi dan dikaji MPR. *Pertama*, apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan Pancasila. *Kedua*, apakah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan. *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari konstitusi.

Ma'ruf menjelaskan, gagasan dan pikiran untuk penataan sistem ketatanegaraan sudah ada sejak MPR periode 2009 - 2014. Gagasan dan pemikiran itu tertuang dalam rekomendasi MPR periode 2009 - 2014. Misalnya, pemikiran tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD. "Perubahan harus berlandaskan Pancasila dan kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD, masih tetap dengan sistem presidensial, dan tidak mengubah NKRI," katanya.

Juga pemikiran untuk melakukan re-

formulasi perencanaan sistem pembangunan nasional model GBHN. "Ini juga merupakan aspirasi masyarakat. Suara terbanyak menghendaki adanya haluan negara. Aspirasi itu muncul dari suara rakyat, bukan dari MPR. Survei menunjukkan 85% mengatakan perlunya GBHN," katanya.

Terkait dengan tema diskusi panel ini, Ma'ruf menyebutkan, banyak implementasi atau pelaksanaan UUD yang harus dikaji karena ada hal-hal ideal dalam UUD belum dilaksanakan. "Apakah UUD telah diimplementasikan dengan baik sesuai konsepnya. Apakah dalam kenyataannya UUD sudah kita lakukan dan implementasikan," ujarnya.

Maka, kata Ma'ruf lebih lanjut, perlu dilihat sejauhmana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. "UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution atau konstitusi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat," imbuhnya.

Untuk itu dia berharap, dari diskusi panel

ini lahir gagasan dan pemikiran analitis terkait dengan tema evaluasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. MPR melalui Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR akan menelaah secara akademik gagasan dan pemikiran itu.

"Ini bagian-bagian pikiran masyarakat, pikiran akademik, sehingga tatanan negara tidak hanya baik di sistem tatanegara, tidak hanya baik dalam konstitusinya, tapi juga baik dalam pelaksanaannya," pungkasnya.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Sementara anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono yang berperan sebagai narasumber diskusi ini meyakini, amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN tidak akan melebar kemana-mana. Sebab, untuk melakukan amendemen UUD sudah diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa untuk perubahan UUD harus disebutkan secara jelas pasal yang akan diubah,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

alasan perubahan pasal, dan bagaimana perumusan perubahan pasal. “Jadi tidak mungkin melebar kemana-mana,” ucapnya.

Apakah mungkin dilakukan perubahan UUD untuk memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN? “Tergantung kekuatan di MPR. Kalau DPR dengan jumlah anggota 575 orang setuju MPR diberi kewenangan menetapkan GBHN, ya pasti bisa,” jawab Bambang.

Bambang menyebutkan, semua fraksi di MPR sudah setuju untuk menghidupkan kembali GBHN. Sekarang tergantung pada pimpinan partai. “Kalau pimpinan partai oke maka sudah selesai,” imbuhnya.

Terkait GBHN, Bambang mengungkapkan, MPR sudah lama mengkaji reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Tapi bukan berarti seperti GBHN pada masa

Orde Baru. “Istilah GBHN ini menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita akan mengembalikan GBHN seperti pada masa Orde Baru. Padahal tidak seperti itu,” ujarnya.

Karena kesalahpahaman itu, kata Bambang, ada ahli hukum yang mengatakan bahwa dengan GBHN maka kembali ke masa Orde Baru, pemerintah anti demokrasi dan otoriter. Ada juga pengamat politik yang menyebut, GBHN sebagai haluan fatamorgana.

“Ada persepsi GBHN seperti masa Orde Baru. Seperti akan ada evaluasi pelaksanaan GBHN setiap lima tahun dan evaluasi terhadap presiden. Padahal bukan seperti itu,” kata anggota DPD dari Jawa Tengah ini.

Bambang menjelaskan, di MPR masih ada perbedaan pendapat mengenai apakah GBHN diatur melalui Ketetapan MPR atau

melalui Undang-Undang. Akhirnya diputuskan bahwa Haluan Negara yang sifatnya makro dan berjangka panjang, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara ditetapkan melalui Ketetapan MPR. “Yang diputuskan MPR adalah Haluan Negara,” tuturnya.

Haluan Negara itu isinya sangat singkat, hanya sekitar 10 halaman. Isi Haluan Negara adalah program jangka panjang 25 atau 50 tahun yang akan datang dan bersifat mengikat semua lembaga negara. Haluan Negara itu akan menjadi landasan haluan pembangunan, seperti GBHN pada masa lalu atau pembangunan jangka pendek dan menengah.

Kesalahpahaman yang lain, lanjut Bambang, adalah istilah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Menurut Bambang, lembaga tertinggi negara hanyalah istilah fungsional dan soal tafsir. “Kesimpulan yang sudah kita sepakati adalah MPR bukan sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan lembaga dengan kewenangan tertinggi, karena mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan UUD,” katanya.

Memberi kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN tidak berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga tertinggi pada waktu lalu, jelas Bambang, karena MPR memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. Sekarang kewenangan itu sudah tidak ada sehingga tidak mungkin MPR menjadi lembaga tertinggi negara. □

BSC



Talkshow

Konstitusi dan Antikorupsi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HARI kedua atau puncak kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 diadakan acara talkshow dengan tema: “Ukir Jejak Integritasmu, Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi” di Grha Sabha Pramana, Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). Tampil dalam talkshow ini Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma’ruf Cahyono, Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua MK Prof. Dr. Aswanto, dan Rektor UGM Prof. Panut Mulyono.

Dalam talkshow yang diikuti ribuan mahasiswa UGM, Ma’ruf Cahyono mengungkapkan, konstitusi memiliki kaitan erat dengan antikorupsi. Apabila masyarakat khususnya, generasi muda pada umumnya, bisa memahami nilai-nilai konstitusi maka nilai-nilai itu akan menjadi rambu-rambu untuk mencegah perilaku atau tindakan korupsi.

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) sangat penting. Konstitusi tidak hanya menjadi landasan yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga

mengandung ideologi dan jatidiri bangsa. “Dalam konstitusi ada ideologi dasar negara Pancasila yang menjadi jatidiri bangsa,” katanya.

Karena itulah generasi muda dan para mahasiswa harus memahami konstitusi dan Pancasila. “Generasi muda harus paham dan tahu konstitusi, serta mempunyai kesadaran berkonstitusi,” ujarnya seraya menambahkan, generasi muda adalah orang-orang yang memiliki optimisme harus paham konstitusi dan terdepan dalam memahami konstitusi.

Menurut Ma’ruf, MPR dengan visi sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat senantiasa terus melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Bukan hanya internalisasi nilai-nilainya, tapi juga normanya. Saya kira ada kaitan antara konstitusi dan pemberantasan korupsi. Sebab, dengan memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara baik maka dengan sendiri-

nya perilaku koruptif tidak akan mungkin terjadi,” tegasnya.

MPR, lanjut Ma’ruf, melakukan berbagai cara dan metode sosialisasi Empat Pilar MPR untuk memberi pemahaman ideologi negara dan konstitusi agar generasi muda memiliki orientasi menuju bangsa yang religius, humanis, nasionalis, demokratis dan adil. “Kita terus memberi pemahaman konstitusi, khususnya kepada generasi milenial, agar memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita menasar generasi muda dengan berbagai cara,” jelas Ma’ruf sambil menyebutkan beberapa cara itu, antara lain menggelar lomba Debat Konstitusi, Lomba Academic Constitutional Drafting, Lomba Karya Ilmiah Sistem Ketatanegaraan.

“Dengan cara internalisasi nilai-nilai dan pemahaman konstitusi merupakan upaya ke depan untuk mencegah perbuatan korupsi. Ini bisa menjadi satu instrumen untuk meminimalisir bahkan menghilangkan sama sekali pikiran-pikiran di kalangan generasi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

muda untuk melakukan perilaku koruptif," imbuhnya.

Dalam talkshow itu, Ma'ruf sempat membacakan sebuah puisi "Masih Indonesiakah Kita..." yang mengingatkan pada nilai-nilai luhur bangsa. "... Ketaatan

menjadi sebuah kesadaran. Kejujuran menjadi harga diri dan kehormatan. Itulah Indonesia yang sesungguhnya..." begitu penggalan puisi yang dibacakan terkait dengan antikorupsi.

Kepada para mahasiswa Ma'ruf berpesan

agar ikut bertanggungjawab merawat jati diri bangsa dan untuk meningkatkan kompetensi agar bisa memiliki daya saing dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan global. □

BSC

Pameran Perpustakaan

Stand MPR Diserbu Pengunjung

RANGKAIAN kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di Kampus UGM Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (10/9/2019) dibuka secara resmi oleh Rektor UGM Prof. Dr. Panut Mulyono, M.Eng., D. Eng., IPU., dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*. Selanjutnya, Rektor UGM bersama Sesjen MPR RI Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., dan Sekjen MK Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH., secara bersama-sama menggunting pita sebagai pertanda diresmikannya kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi tersebut.

Acara itu berlangsung di Gedung Pertemuan Graha Sabha Pramana Kampus UGM Yogyakarta. Usai menggunting pita, ketiga pejabat penting di tiga lembaga negara dan institusi pendidikan tinggi ini langsung meninjau stan Pameran Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara. Pertam kali dikunjungi adalah stan KPK. Di sini Rektor UGM, Sesjen MPR, dan Sekjen MK mengisi buku tamu dan menyaksikan isi



pesan-pesan pengunjung yang tertulis pada secarik kertas yang tertempel di kertas kartun yang diberi label Pohon Harapan.

Setelah meninjau stan KPK, ketiga pejabat penting dari dua lembaga negara dan satu pimpinan perguruan tinggi ini selanjutnya menuju stan MPR yang letaknya berdamp-

pingan dengan stan lembaga anti rasuah tersebut. Di sini, mereka diterima oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah didampingi staf Biro Humas. Di stan MPR, selain mendapat penjelasan tentang lembaga MPR, mereka bertiga juga memanfaatkan kesempatan foto bersama dengan latar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

belakang backdrop MPR Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

Tidak berhenti sampai di situ, ketiganya kemudian meninjau stan MK yang letaknya berseberangan dengan stan MPR di lantai 1 Grha Sabha Pramana itu. Di samping kanan stan MK terdapat stan Penerbit Rajawali Pers. Di sini dipajangkan beberapa contoh cover buku milik MK. "Penerbit Rajawali Pers memang banyak menerbitkan buku-buku MK," ujar seorang penjaga stan. Dan, sebelum kembali ke tempat untuk mengikuti acara selanjutnya, Talkshow, bertema Era UGM di MK, ketiganya mampir di stan UGM.

Pameran dan talkshow adalah dua

kegiatan yang masuk dalam rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi. Kegiatan lain yang diselenggarakan dalam dua hari (10 dan 11 September 2019) adalah Diskusi Panel membahas evaluasi pelaksanaan Konstitusi, penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi 2019. Tapi, di antara serangkaian kegiatan itu pameran perpustakaan termasuk yang paling menarik perhatian pengunjung.

Stan MPR, misalnya, sebelum pameran dibuka secara resmi sudah diserbu oleh para pengunjung. Di stan MPR selain mendapatkan buku-buku Empat Pilar, termasuk buku Komik Empat Pilar, para

pengunjung juga mendapat Majalah *Majelis* secara cuma-cuma. Tak kalah menariknya, stan MPR juga membuka kuis untuk para pengunjung. Caranya, pengunjung diberi pertanyaan seputar Empat Pilar, dan bagi yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan diberikan hadiah berupa merchandise yang menarik.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah menyatakan, MPR memang menyiapkan pameran ini dengan tujuan, salah satunya agar generasi muda pada umumnya dan mahasiswa khususnya mengetahui informasi tentang lembaga negara MPR. "Apa pun yang dikerjakan oleh MPR tak lepas dari



tugas dan kewenangannya sebagai lembaga MPR,” jelas Siti Fauziah di tengah kesibukannya menjawab pertanyaan pengunjung pameran.

“Stan MPR memang cukup menarik, dihiasi dengan banyak buku. Meski dekorasinya minimalis tapi cukup menunjukkan bahwa MPR itu adalah lembaga negara yang sangat penting, dan memiliki peran penting pula untuk konstitusi Indonesia, “ begitu komentar Gubriel Vebry Leonardo, mahasiswa Fakultas Hukum UGM 2019.

Salah satu bahan pameran yang paling menarik, menurut putera kelahiran Banyuwangi, Jawa Tengah, itu adalah buku komik. Meski dia mengaku tak sempat membuka buku komik tersebut, tapi dari desain luarnya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dia menilai cukup menarik. Dari segi tema, mahasiswa berusia 18 tahun itu menilai, buku komik yang dia saksikan sekilas di

pameran itu memang tidak terlalu dewasa, tapi cukup variatif. □

SCH

Yogyakarta, 10-11 September 2019

Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Pekan Konstitusi 2019

PADA puncak acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di Graha Sabha Pramana, Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (11/9/2019), salah satu agendanya adalah penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Pekan Konstitusi 2019. Pekan Konstitusi yang berlangsung 24-30 Agustus 2019 di Jakarta itu merupakan agenda tahunan MPR dalam rangka memperingati Hari Konstitusi. Dan, Pekan Konstitusi ini diisi kegiatan Lomba Academic Constitutional Drafting dan Lomba Debat Konstitusi.

Untuk 2019 ini Pekan Konstitusi diikuti oleh lebih dari 100 mahasiswa, berasal dari 26 perguruan tinggi di Indonesia. Keluar sebagai pemenang Lomba Debat Konstitusi masing-masing: Juara I. Universitas Sumatera Utara (USU), II. Universitas Andalas Padang, III. Universitas Syiahkuala Aceh, dan IV. Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Sementara gelar juara untuk Lomba Academic Constitutional Drafting diraih oleh:



Juara I. Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, II. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan III. Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Khusus untuk UGM

Yogyakarta, selain meraih juara II Lomba Academic Constitutional Drafting, juga menerima penghargaan naskah terbaik dalam Lomba Academic Constitutional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Drafting.

Hadiah untuk para pemenang Lomba Pekan Kostitusi 2019 inilah yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., pada acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di Yogyakarta itu. Penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis kepada tiga pemenang, yakni: Juara I Lomba Debat Konstitusi diwakili oleh mahasiswa USU, Febry Indra Gunawan; Juara I Lomba Academic Constitutional Drafting diterima oleh mahasiswa Undip, Farid Ibrahim; dan pemenang Lomba Academic Constitutional Drafting kategori naskah terbaik diwakili mahasiswa UGM, Jery Hutagalung.

Tidak kurang dari 3000 pasang mata menyaksikan peristiwa tersebut. Ruang pertemuan di lantai 2 Grha Sabha tak mampu menampung pengunjung, hingga meluber ke balkon. Di antara mereka itu terdapat tamu kehormatan, yaitu: Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Ketua KPK Agus

Rahardjo, Wakil Ketua MK Dr. Aswanto, dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono beserta para mahasiswa dan sivitas akademi UGM. Serta puluhan siswa-siswi SLTA juga tampak di antara para pengunjung itu.

Lembaga negara MPR memang menjadi bagian dari penyelenggara acara Festival Konstitusi & Antikorupsi 2019 bekerjasama dengan KPK, MK, dan UGM sebagai tuan rumah. Festival ini mengusung tema: "Ukir Jejak Integritasmu Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi." Meski kegiatan ini sudah berlangsung sejak sehari sebelumnya (Selasa, 10/9/2019), tapi kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pada hari kedua (Rabu, 11/9/2019) dan sekaligus puncak acara.

Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, selaku tuan rumah, menjelaskan bahwa Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 ini telah dimulai sejak kemarin, Selasa (10/9/2019). Diawali dengan berbagai kegiatan, antara lain: Diskusi Panel bertema Evaluasi

Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, Talkshow, serta Pameran Perpustakaan diikuti oleh MPR, KPK, MK, dan UGM. Sementara hari kedua, selain penyerahan hadiah kepada juara lomba Pekan Konstitusi juga diisi kegiatan penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi. Naskah Deklarasi Anti Korupsi ini ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua MK Aswanto, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, dan Rektor UGM Prof. Panut Mulyono, disaksikan Sultan Hemengku Buwono X.

Dan, Festival Konstitusi dan Anti Korupsi ini ditutup oleh acara talkshow bertema: "Ukir Integritasmu Wujudkan Budaya Konstitusi dan Antikorupsi." Acara ini dipandu oleh presenter kondang Valerina Daniel, dengan narasumber: Agus Raharjo, Ma'ruf Cahyono, Aswanto, dan Prof. Panut Mulyono. Dengan berakhirnya talkshow yang disimak ribuan mahasiswa UGM ini maka usai sudah seluruh rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019. □

SCH

Siti Nurjanah, S.Pd., M.Pd.

Sahabat Bagi **Anak** Berkebutuhan Khusus



PEREMPUAN ini memiliki hati yang halus, bisa jadi lebih halus dibanding rata-rata kaum hawa lainnya. Air matanya sangat gampang bercucuran, terlebih saat indera penglihatannya tersentuh oleh peristiwa yang menyayat perasaan. Praktis, ia tak bisa melihat orang lain menderita, apalagi jika penderitaan itu dialami orang-orang berkebutuhan khusus. Jika hal itu terjadi, dengan cepat ia akan turun tangan, karena memang ia tidak bisa membiarkan peristiwa itu lewat begitu saja tanpa campur tangannya.

Banyak kisah yang bisa menggambar bagaimana Siti Nurjanah, pengajar di SLB BC Wiyata Dharma 3 Ngaglik Sleman, Yogyakarta, ini tidak bisa diam atau pura-pura tidak tahu jika matanya menatap kondisi yang membuat hatinya miris. Salah satunya terjadi beberapa tahun lalu, tepatnya saat perempuan kelahiran Yogyakarta, Sabtu Wage, 17 Juli 1982, atau bertepatan dengan 25 Ramadan 1402, ini hendak berangkat mengajar.

Saat itu, Nur — begitu dia biasa disapa — melihat seorang gadis remaja bertelanjang, tanpa sehelai benangpun menutupi tubuhnya. Gadis itu berjalan terhuyung menyusuri jalan searah laju sepeda motor yang dikendarai Siti yang hendak menuju ke sekolah. Melihat peristiwa itu, Nur pun berhenti. Ia bergegas memarkir motornya di bahu jalan. Dan, dia segera mengetuk pintu rumah salah satu warga di sana, untuk meminta kain sekedarnya guna menutupi tubuh telanjang gadis remaja itu.

Nah, saat hendak menutupi tubuh gadis nahas itu perasaan Nur semakin hancur. Gadis muda yang saat itu ada dalam jangkauan tangannya, ternyata adalah salah satu murid di sekolahnya. Murid

tersebut mengalami Tuna Grahita yang lumayan akut. “Kamu kenapa kok sampai telanjang? Di mana bajumu?,” kata anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Suratman dan Maryati ini mengulang dialog dengan muridnya.

Jawaban sang murid benar-benar membuat tubuh Nur terasa lunglai. “Saya dibawa ke kandang kambing, di sana banyak laki-laki,” begitu ucap sang murid. Dan, ternyata, ia diperkosa oleh beberapa orang secara bergilir. Kemudian meninggalkannya begitu saja tanpa rasa iba sedikitpun. Nahas bagi gadis remaja itu, setelah tiga bulan sejak peristiwa tersebut dia hamil dan kemudian melahirkan.

Peristiwa yang lain terjadi pada salah seorang siswanya yang juga penderita tuna grahita dan epilepsi. Merasa anaknya sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung, orangtua si anak memindahkan sekolahnya ke sekolah umum. Tetapi, di sekolahnya yang baru itu si anak mendapat perlakuan tak semestinya. Tidak ada satupun siswa yang mau berdekatan dan berteman dengan anak tersebut. Yang menyedihkan, anak tersebut selalu di-bully, dibilang bisa menularkan penyakit yang dideritanya. Baik ketularan tuna grahita maupun epilepsi.

Akibat bully tersebut si anak semakin sering pingsan. Dan, itu membuat pihak sekolah selalu menghubungi orangtuanya, mengabarkan kondisi anak mereka. “Ternyata orang tuanya tidak mampu melihat kenyataan yang dihadapi anaknya, kemudian anaknya dikembalikan ke sekolah kami. Saat baru-baru pindah sang anak masih sering pingsan, bila mengingat perlakuan teman-temannya di sekolah reguler,” cerita Nur.

Tak cukup sampai di situ, cerita lain yang juga sempat dialami Siti Nurjanah setelah menghabiskan 17 tahun waktunya mengajar anak-





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

anak berkebutuhan khusus. Ceritanya, salah satu siswa dengan kecerdasan di bawah rata-rata memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yaitu suka merokok dan minum-minuman keras. Setelah dipelajari, kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dari ayahnya. Ayah anak tersebut berprofesi sebagai buruh bangunan. Dengan alasan untuk menjaga kesehatan, ayah anak tersebut selalu mabuk-mabukan. Dan, kebiasaan ayahnya tersebut ditiru oleh anaknya, termasuk kebiasaan merokok.

“Saya minta bantuan kepada ibunya agar menjauhkan anaknya dari rokok dan minuman. Selain itu, anaknya saya pantau melalui WhatsApp. Syukur, melalui cara ini saya bisa mendekati dan mengontrolnya agar bisa meninggalkan kebiasaan buruk, merokok rokok dan mabuk-mabukan,” ungkap Siti Nurjanah.

SLB A Yaketunis

Ibarat sayur dan garam, sebagai guru di SLB, Siti Nurjanah sudah mengikhlaskan dirinya untuk selalu membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Sejak remaja, naluri untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah terbangun. Bahkan, Nur sudah mengenal dan dekat dengan anak-anak berkebutuhan khusus sejak ia kecil. Maklum, ibunya adalah guru di SLB khusus tuna netra, SLB A Yaketunis. Karena itu, Nur merasa dekat dan bisa menyelami perasaan anak-anak berkebutuhan khusus. Kesadarannya membantu anak berkebutuhan khusus makin terlihat saat ia memutuskan mengambil jurusan Pendidikan SLB di bangku kuliah S1 dan S2.

Keikhlasan Siti membina anak berkebutuhan khusus tak lepas dari pengamatannya bahwa perhatian terhadap anak-anak ini masih jauh dari mencukupi. Buktinya, hanya segelintir orang yang mau membantu para tuna netra menyeberang jalan. Pada saat yang sama, masih banyak anak-anak penderita tuna grahita diajak mengemis. Dan, hanya sedikit orang yang bisa membantu penderita tuna rungu saat mereka menanyakan sesuatu. “Mereka ini anak-anak kita juga, mereka bisa dididik karena mereka memang memiliki potensi. Sayangnya, masih banyak orangtua yang ragu terhadap anak-anak mereka sendiri,” kata Siti Penuh keprihatinan.

Siti mulai terjun di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus sejak 2002. Saat itu ia menjadi pengajar di SLB Karna Manohara, sebuah sekolah bagi anak-anak penderita tuna rungu. Tahun 2008,

karena diangkat menjadi PNS, Siti pun mendapat tugas untuk mengajar di SLB BC Wiyata Dharma 3 Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga sekarang.

Sebagai guru, Siti berusaha dekat dengan semua siswanya, termasuk grup WhatsApp anak-anak itu. Ia juga mengedepankan pendekatan personal setiap kali membantu anak didiknya menghadapi persoalan yang menimpa mereka. Karena itu, Siti tidak pernah mengenal jam kerja. Seluruh waktunya, ia dedikasikan bagi semua siswanya. Minimal untuk terus memantau perkembangan anak didiknya melalui aplikasi WhatsApp. □

MBO



Bandung, Jawa Barat

Pancasila **Alat Pemersatu** Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN anggota Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam (Himi Persis) yang datang dari berbagai daerah, pada 31 Agustus hingga 2 September 2019, bertempat di Bandung, Jawa Barat, mengikuti Muktamar IX Himi Persis. Serangkaian acara digelar dalam muktamar itu, termasuk di antaranya Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada puncak acara, 2 September 2019, para peserta muktamar mendapat kesempatan mengikuti acara Sosialisasi Empat Pilar MPR. Materi sosialisasi yang bertema: 'Mengkohkan Pilar Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045' disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).

Dalam ceramahnya, HNW mengingatkan agar generasi muda jangan melupakan sejarah perjalanan bangsa. Saat ini, lanjut HNW, banyak warga masyarakat melupakan sejarah bangsa. "Padahal

Presiden Soekarno berpesan, Jasmerah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah", ujarnya.

Dari ketidaktahuan masyarakat tentang sejarah bangsa inilah, menurut HNW, ada upaya menempatkan umat Islam berada pada posisi yang tidak mempunyai peran. "Seolah-olah tak ada hubungan antara Indonesia dengan umat Islam", tuturnya. "Sementara banyak generasi muda yang tak tahu relasi antara Islam dan Indonesia", tambahnya.

Selanjutnya, HNW memaparkan, peran umat Islam dalam sejarah perjalanan bangsa demikian besar. "Para tokoh umat Islam sebagai pendiri bangsa adalah orang yang terdidik, cerdas, dan terpelajar", ungkapinya. "Karena kehebatan mereka itu sehingga bisa menyelamatkan bangsa", tambahnya. Ia mencontohkan, H. Agus Salim merupakan orang yang menguasai banyak bahasa dan pernah menjadi diplomat.



Jadi, kata HNW, banyak perjuangan tokoh Islam untuk NKRI. Ia menyebut tokoh Persis, Mohammad Natsir, yang mempunyai andil besar dalam menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia. Belanda, menurut HNW, tak ingin bangsa ini kokoh bersatu. Untuk itu Belanda membentuk RIS (Republik Indonesia Serikat). Pembentukan RIS ini dilihat oleh Natsir sebagai sebuah penyimpangan dari cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu, selaku ketua Fraksi Masyumi di DPR RIS, Natsir mengeluarkan Mosi Integral dan disampaikan ke Parlemen pada 3 April 1950. "Mosi yang menginginkan Indonesia kembali menjadi NKRI didukung Soekarno, Hatta, dan politisi

lainnya", ujar HNW lebih lanjut, "Karena Mosi Integral Moh. Natsir ini, bangsa ini akhirnya bersatu kembali di dalam wadah NKRI."

Kiprah para tokoh umat Islam dalam memperjuangkan dan membentuk Indonesia itu, Hidayat Nur Wahid berharap, menjadi inspirasi bagi generasi muda, termasuk generasi Himi Persis. Keterlibatan para tokoh umat Islam dalam sejarah bangsa juga diharapkan sebagai modal bagi umat Islam untuk terus mendukung dan berkontribusi pada bangsa dan negara.

HNW mengajak Himi Persis untuk ikut memberi kontribusinya pada bangsa dan negara sesuai kekhasan masing-masing.

"Seperti yang dilakukan oleh Natsir sebagai orang Persis", tegasnya.

Sementara Pengurus Persis, Dr. Nurmawan, dalam kesempatan itu menyebut Muktamar IX Himi Persis sebagai momen yang strategis di tengah persoalan yang ada. "Intinya, seluruh komponen bangsa perlu bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada", paparnya. Dia sepatutnya dengan apa yang dikatakan oleh Hidayat Nur Wahid bahwa Persis harus bisa melahirkan tokoh sekaliber Natsir. "Saya melihat Himi Persis mampu menopang bangsa ini untuk ke depan", ucapnya. □

AWG

Pleno Bansos MPR

Sidang Pleno Kedua Terakhir Sebelum Berakhirnya Masa Jabatan

DIPENGUJUNG bulan Agustus, tepatnya pada 31 Agustus, Badan Sosialisasi menyelenggarakan rapat pleno untuk mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR selama tahun anggaran 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Rapat pleno yang berlangsung di Hotel Eastparc Yogyakarta itu diikuti oleh 28 dari 45 anggota Badan Sosialisasi MPR. "Karena sudah memenuhi kuorum maka rapat pleno ini saya buka," kata Ketua Badan Sosialisasi MPR Dr. Ahmad Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Setelah menyampaikan pengarahannya sebagai pengantar rapat, selanjutnya Basarah menyerahkan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Badan Sosialisasi, Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, MSi. Di dampingi Wakil Ketua Badan Sosialisasi, Prof. Dr. Bachtiar Aly, rapat pleno ini membahas satu per satu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode. Dari sana tergambar, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada 2019 sampai dengan 30 Agustus rata-rata sudah mencapai di atas 90%, bahkan beberapa kegiatan sudah 100%. Untuk kegiatan yang belum selesai diharapkan segera dirampungkan atau dilaksanakan.

Perlu diketahui, Badan Sosialisasi MPR mengoordinasikan 11 kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode, meliputi: Sosialisasi oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan; Sosialisasi Kepala Tokoh Masyarakat; Training of Trainers (ToT) Sosialisasi Empat Pilar MPR; Sosialisasi untuk memenuhi undangan/ permintaan instansi/ ormas; Sosialisasi di Kabupaten/Kota; Sosialisasi kepada Mahasiswa dengan Metode Outbound; Sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota; Kemah Empat Pilar; Pendidikan Kebangsaan/ Bela Negara; Sosialisasi Kepada Masyarakat Tertentu; dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui metode Cerdas Cermat tingkat SLTA se-Indonesia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rapat pleno ini menyepakati, 20 September 2019 adalah target waktu untuk semua kegiatan harus sudah diselesaikan. Mengingat pada 27 September 2019, MPR akan menyelenggarakan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2014-2019. Itu berarti, masa bakti pimpinan dan anggota MPR periode 2014-2019, termasuk juga pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi MPR periode 2014-2019, akan berakhir. Jadi rapat pleno kali ini, menurut Basarah,

adalah rapat pleno kedua terakhir. Karena setelah ini akan ada satu rapat pleno lagi, yang akan diselenggarakan sebelum tanggal 27 September 2019, atau sebelum berlangsungnya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 2014-2019.

Basarah menyatakan, untuk rapat pleno terakhir Badan Sosialisasi MPR nanti — yang direncanakan sebelum tanggal 27 September—merupakan rapat pleno perpisahan. Buat para pimpinan dan anggota Badan



Sosialisasi MPR yang akan mengakhiri masa jabatannya telah menyiapkan cinderamata dan sertifikat. “Mudah-mudahan itu akan menjadi memori kita bersama, terutama untuk teman-teman yang telah mengambil keputusan untuk istirahat,” ujar Basarah seraya menyebut beberapa anggota Badan Sosialisasi MPR periode 2014-2019 yang

telah memutuskan untuk istirahat.

Tapi, Basarah menyatakan, untuk teman-teman yang memilih untuk istirahat tak perlu khawatir karena dalam rancangan Tata Tertib, MPR menyiapkan “rumah” berupa lembaga Alumni MPR dan juga “rumah” di Lembaga Pengkajian (Lemkaji)—dan lemkaaji ini rencananya akan berubah menjadi Komite

Kajian Ketatanegaraan. Basarah berharap, kedua lembaga itu akan menjadi sarana untuk wadah bersilaturahmi, dan terus menjalin komunikasi. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan, tempat bangsa Indonesia bermusyawarah, kita harapkan tidak akan putus silaturahmi,” katanya. □

SCH

Badan Sosialisasi MPR

Mengakhiri Masa Baktinya dengan Meninggalkan Legacy



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ini rapat pleno terakhir dan sekaligus rapat pleno perpisahan pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi MPR periode 2014-2019. Akhir September 2019 ini masa jabatan pimpinan dan anggota MPR RI periode 2014-2019— termasuk pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi MPR 2014-2019— segera berakhir. Untuk selanjutnya tugas-tugas sosialisasi Empat Pilar MPR dilanjutkan oleh anggota MPR RI periode 2019-2024.

“Akhirnya kita harus berpisah, karena perpisahan adalah bagian dari pertemuan,” ungkap Ketua Badan Sosialisasi MPR, Dr.

Ahmad Basarah, dalam kata pengantarnya ketika memimpin Rapat Pleno Badan Sosialisasi MPR di Hotel Sovereign, Kota Denpasar, Bali, Ahad siang (22/9/2019). Rapat pleno itu dihadiri lima pimpinan Badan Sosialisasi, dan 34 dari 45 orang jumlah anggota Badan Sosialisasi.

“Tanpa terasa kita telah hampir lima tahun bersama-sama menjalankan tugas mulia sebagai anggota Badan Sosialisasi MPR. Banyak yang telah kita lakukan dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan yang emban oleh MPR,” ujar Basarah. Disebut tugas tambahan, karena tugas Sosialisasi

Empat Pilar MPR adalah amanat yang diberikan undang-undang di luar kewenangan konstitusional MPR yang meliputi: mengubah dan menetapkan UUD, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan, mengangkat Presiden dan atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar dimulai sejak MPR periode 2009-2014 yang kemudian dilanjutkan oleh anggota MPR periode sekarang (2014-2019), menurut Basarah, banyak hal yang telah dilakukan. Salah satunya mengangkat kembali nama



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR sebagai lembaga negara, karena pasca amendemen UUD Tahun 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, nama lembaga MPR nyaris tak terdengar di masyarakat.

Maka, sejak adanya kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR, masyarakat luas – terutama yang mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR RI – menjadi memahami bahwa ada lembaga negara yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. “Bayangkan kalau tak ada sosialisasi, bisa saja anak yang mendapat tugas di sekolahnya, bila ditanya tentang MPR maka mereka tidak akan mengerti,” kata Basarah.

Kita bersyukur, MPR tidak lagi sendirian dalam membina mental ideologi bangsa. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengindahkan surat pimpinan MPR yang

berkali-kali dikirim, di mana isinya menjelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan membangun mental ideologi bangsa adalah tugas eksekutif. Maka, lanjut Ahmad Basarah, Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), kemudian pada 28 April 2018 ditingkatkan menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Maka, sekarang ada dua lembaga negara bertanggung jawab dalam pembinaan mental ideologi bangsa. *Pertama*, Badan Sosialisasi MPR dengan payung hukumnya UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kedua, BPIP dengan payung hukumnya Prepres No. 7 Tahun 2018. Dan, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI bidang Hubungan Antarlembaga Negara, Ahmad Basarah menyatakan, telah menjalin komunikasi dan

koordinasi dengan BPIP mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.

Mengenai metode sosialisasi, menurut Basarah, akan diatur dengan sebuah MOU antara BPIP dengan Pimpinan MPR yang baru nanti. “Kita belum tahu siapa Ketua MPR yang baru nanti, mudah-mudahan adalah orang yang dapat menindaklanjuti kerjasama MPR dengan BPIP,” harap Basarah. Tapi, secara prinsip sudah disepakati bahwa untuk narasumber kegiatan pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP dapat mengambil dari MPR, dan sebaliknya kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR dapat mengambil narasumber dari BPIP.

Selain itu, Basarah juga memaparkan bahwa MPR periode ini telah meninggalkan beberapa legacy penting kepada bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya tentang hari lahir Pancasila. Berkat kesepakatan para pimpinan fraksi dengan pimpinan MPR periode 2009-2014 bangsa Indonesia sudah menyudahi polemik tentang hari lahir Pancasila. Pada 2012 seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan MPR RI telah membuat konsensus bahwa di Indonesia cuma ada satu Pancasila, tidak ada dua, atau tiga.

Jadi, Pancasila yang dimaksud adalah dasar negara yang prosesnya dimulai dari Pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI, yang kemudian mengalami pengembangan dalam naskah Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, dan mencapai konsensus final pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Kesemuanya itu merupakan satu kesatuan proses lahirnya Pancasila. Dan, atas dasar itulah Presiden Jokowi menerbitkan Kepres No. 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Usai mendengarkan pemaparan oleh Basarah selaku Ketua Badan Sosialisai MPR, acara dilanjutkan pembagian cinderamata kepada para pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi MPR yang segera mengakhiri masa baktinya. Cinderamata itu berwujud plakat berbentuk Maket MPR dan pada maket itu tertera nama penerimanya. Selain itu, setiap anggota Badan Sosialisasi yang telah menjalankan tugas mulianya dalam membangun mental ideologi bangsa juga mendapat sertifikat. Dan, rapat pleno diakhiri foto bersama. □

SCH





Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI

Bung Karno di Balik Penemuan Makam Imam Bukhari

NAMA Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, begitu sangat legendaris bagi masyarakat Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah pecahan Uni Soviet yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kepopuleran nama Presiden Soekarno di sana berkaitan dengan kisah ditemukannya makam Imam Bukhari, seorang perawi nabi yang sangat termasyur di kalangan umat Islam. Tidak banyak yang tahu, Soekarno-lah orang yang meminta pemerintah komunis Soviet agar menemukan makam tersebut. Berkat jasa Soekarno maka saat ini kompleks makam Imam Bukhari yang terletak di desa Hartang, sekitar 25 kilometer dari Samarkand itu telah menjadi salah satu obyek wisata umat Islam seluruh dunia.

Kebesaran nama Soekarno tidak hanya di seluruh penjuru Indonesia, namun juga menggema di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani, tegas, kharismatik, dan tidak mudah diatur oleh bangsa manapun. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia, kisah kepahlawan Bung Karno juga dirasakan umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Uzbekistan.

Kisah tersebut bukanlah cerita fiksi. Saat rombongan delegasi MPR RI pertama kali menginjak-kaki di Bandar Udara Internasional Tashkent, Ibukota Uzbekistan, nama Soekarno-lah yang pertama kali disebut ketika delegasi memperkenalkan diri berasal dari Indonesia. Salah satu yang langsung menyebut nama Soekarno ketika berjumpa dengan delegasi yang akan menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat Indonesia yang ada di Uzbekistan itu adalah Elyas, seorang mahasiswa berusia 21 tahun.

Elyas mengatakan, nama Soekarno sangat melekat dalam ingatan masyarakat Uzbekistan, karena Bung Karno dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari. Elyas dan pemuda Uzbekistan mengetahui nama Soekarno dan jasanya dari orang tua mereka dan juga dengan membaca buku-buku yang diterbitkan di Uzbekistan.

Sejarah Soekarno bisa dekat dengan bangsa Uzbekistan dimulai ketika paska Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ketika itu, Pemerintah Soviet mengundang Presiden Soekarno untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow. Soekarno sadar, sebagai Presiden Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin negara-negara Non Blok harus bersikap netral terhadap Blok Timur maupun Blok Barat. Tapi di sisi lain, Soekarno menyadari bahwa Indonesia butuh dukungan Soviet untuk melegitimasi eksistensi negara-negara Non-Blok dan kesepakatan yang telah dicapai dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Selain itu, Soekarno menyadari bahwa Indonesia juga membutuhkan dukungan Soviet untuk menghadapi berbagai upaya negara-negara Barat yang masih terus berusaha menjajah dan menguasai kembali Indonesia. Sementara, Soekarno maffhum bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam sehingga tidak mungkin Indonesia akan ikut blok timur yang dipimpin oleh negara komunis Soviet.

Situasi itu diatasi oleh Soekarno dengan sangat cerdas. Bung Karno mengajukan syarat atas rencananya memenuhi undangan Pemerintah Soviet itu. Syaratnya, Soekarno minta dicarikan/ditemukan makam Imam Bukhari, seorang perawi Nabi Muhammad SAW yang amat termasyur itu. Kata Soekarno kepada Presiden Soviet, "Aku sangat ingin menziarahinya".

Menurut Israil, muazin Masjid Imam Bukhari, menjelang kedatangan Bung Karno pada 1956, kondisi makam tidak terawat dan berada di semak belukar. Pemerintah Soviet akhirnya membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Soekarno. Dan, ketika tiba di pemakaman itu, Soekarno melakukan penghormatan terhadap Imam Bukhari. Caranya, begitu turun dari mobil yang mengantarnya, Soekarno langsung melepas sepatu kemudian berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam.

"Presiden Soekarno merangkak menuju makam lalu memanjatkan doa dan dilanjutkan solat, serta membaca Alquran," terang Israil.

Keterangan itu diperkuat oleh Muhammad Maksud, penjaga makam Imam Bukhari. Bahwa atas jasa Presiden Soekarno, kompleks makam Imam Bukhari kini dipugar hingga terlihat sangat megah seperti saat ini. Sehingga, kompleks makam seluas 10 hektar itu menjadi obyek wisata bagi umat Islam di dunia, setelah makam Nabi Muhammad SAW di Madinah.

Sementara itu, Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang juga ketua delegasi saat mengunjungi makam Imam Bukhari (Sabtu, 14/9/2019) mengatakan, kunjungannya bersama delegasi adalah untuk melanjutkan silaturahmi yang pernah dilakukan oleh Presiden pertama RI, Soekarno, di tahun 1956 dan 1961, saat berkunjung ke Samarkand, serta menyampaikan amanah Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga puteri Presiden Soekarno yang berpesan agar bangsa Indonesia menghormati Imam Bukhari sebagai seorang perawi Nabi Muhammad SAW yang hadis-hadisnya menjadi rujukan umat Islam sedunia.

Basarah berharap, hubungan baik antara Uzbekistan dan Indonesia, baik pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uzbekistan maupun masyarakat Indonesia dengan masyarakat Uzbekistan yang mayoritas beragama Islam.

"Hubungan kedua negara dapat ditingkatkan dengan kerjasama kebudayaan dan pariwisata, salah satunya menjadikan makam Imam Bukhari sebagai destinasi wisata religi masyarakat muslim Indonesia. Sebaliknya makam tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, seperti Wali Songo, juga dapat menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan ke Indonesia, selain destinasi wisata lainnya seperti Bali, Pulau Komodo dan lainnya," pungkas Basarah

Delegasi MPR yang ikut menyertai Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke Uzbekistan antara lain Zainut Tauhid (PPP), Bachtiar Aly (Nasdem), Hamka Haq (PDI Perjuangan), M. Toha (PKB), Safrudin (PAN), Deding Ishak (Golkar), dan Adrianus Garu (DPD RI). □

PSB Klaten

Yang Benar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., membuka pagelaran Wayang Kulit dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan masyarakat desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Acara tersebut berlangsung di Lapangan Sosrobaung, Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Sabtu malam (7/9). Prosesi pembukaan pegelaran wayang kulit itu ditandai penyerahan tokoh Semar oleh Wakil Ketua MPR kepada dalang Ki Jatmiko Anom Saputro.

Hadir pada acara tersebut, anggota MPR Fraksi PKS Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Msi., Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan Sesjen MPR Drs. Purwadi, serta Kepala Dinas Kominfo, dan Plt. Kabag Kesra

Kabupaten Klaten Drs. H. Amin Mustofa, M. Si. Selain itu, hadir pula Camat Kecamatan Kebonarum, Sutopo, S.Ip., M.Si., dan Kepala Desa Basin H. Mustafa Kamal.

Cuaca cerah disertai cahaya bulan nan terang turut berkontribusi terhadap suksesnya pelaksanaan pagelaran wayang kulit tersebut. Ribuan warga masyarakat terus berdatangan sejak petang hingga malam. Demikian juga para pedagang yang menjajakan berbagai macam dagangan. Mulai dari makanan dan minuman hingga pakaian, serta sepatu dan sandal.

Pementasan wayang kulit yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan masyarakat Desa Basin itu mengetengahkan lakon 'Semar Mbangun Jiwa.' Lakon tersebut

dipilih karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan mengenai penyebutan istilah Empat Pilar MPR RI. Itu dilakukan, karena sebelumnya terjadi kesalahan penyebutan istilah sosialisasi, baik oleh pembawa acara maupun tokoh masyarakat, dalam menyampaikan sambutan pada acara tersebut. Dulu, kata Hidayat, saat pertama kali disosialisasikan pada 2005 pada masa Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Waktu itu memakai istilah Sosialisasi Putusan MPR. Tapi pada kepemimpinan MPR periode berikutnya, 2009-2014, dikembangkan menjadi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa



dan Bernegara. Di tengah jalan penggunaan istilah tersebut dilarang oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dengan persetujuan pimpinan Mahkamah Konstitusi, MPR mengubah istilah tersebut menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika semboyan negara. "Itulah istilah yang benar, dan diizinkan oleh MK, sehingga digunakan sampai sekarang," jelas Hidayat.

Wayang Kulit dipakai sebagai salah satu

metode sosialisasi, kata Hidayat, karena kesenian ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya di pulau Jawa. Dengan begitu diharapkan, materi sosialisasi yang diselipkan di tengah pementasan wayang kulit dapat dicerna dan diterima masyarakat luas. Apalagi, saat ini wayang sudah diterima sebagai kesenian tradisional bangsa Indonesia yang harus dipertahankan di tengah peradaban dunia.

"Yang patut diingat, Pancasila bukan semata dihafal. Hafal sila-sila Pancasila, itu baik. Tapi lebih baik lagi jika dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan Sesjen MPR, Drs. Purwadi, mewakili Kepala Biro Humas MPR dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan sejak 2005. Namun, penggunaan wayang kulit sebagai salah satu metode sosialisasi baru diselenggarakan pada 2012.

"Tujuannya agar materi sosialisasi lebih gampang diterima dan dicerna oleh masyarakat umum. Kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," kata Purwadi. □

MBO

PSB Cianjur

Sosialisasi Empat Pilar MPR Semarak Di Cianjur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INDONESIA adalah negara yang terdiri dari daerah-daerah dengan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang sangat besar dan unik. Keberagaman budaya dan nilai-nilai itu bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi juga merupakan kekayaan bangsa.

Cianjur, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, yakni: 'Ngaos, Mamaos, Maenpo'. Ketiga seni budaya tersebut disebut juga sebagai Tiga Pilarnya Cianjur.

Tiga nilai tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang menjadi dasar masyarakat Cianjur selama kurang lebih tiga abad, sejak Cianjur berdiri sampai sekarang. Filosofi dari Ngaos, Mamaos, Maenpo

merupakan karakter dasar masyarakat Cianjur sejak dulu.

Ngaos adalah tradisi mengaji yang menjadikan Cianjur begitu kental dengan nuansa keagamaan. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa yang menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan. Sedangkan, Maenpo adalah seni beladiri Pencak Silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan.

Secara filosofis ketiga nilai tersebut pada hakekatnya adalah simbol dari rasa keberagaman, kebudayaan, dan kerja keras yang direpresentasikan dalam gelar budaya dan kesenian berupa tradisi mengaji, seni tempang Cianjuran, dan seni beladiri Pencak Silat.

Nilai-nilai budaya dan budaya Cianjuran itulah yang kemudian diangkat oleh MPR dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode Pagelaran Seni Budaya (PSB). Bekerjasama dengan Perempuan Bangsa Kabupaten Cianjur, pagelaran itu berlangsung di Taman Kreatif Joglo, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2019). Acara ini dihadiri oleh anggota MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa, para pimpinan dan anggota DPC Perempuan Bangsa Cianjur, serta ratusan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Neng Eem mengatakan, masyarakat Cianjur mesti bangga dengan nilai-nilai budayanya sendiri, karena menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia, menjadi bagian dalam Pancasila. Dan, di dalam budaya Cianjur itu terdapat nilai-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nilai Islam yang sangat menghormati persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan perbedaan seperti yang diajarkan Nabi Besar Muhammad SAW.

“Nilai-nilai tersebut sangat penting, sebab negara Indonesia dibentuk karena konsensus atau kesepakatan bersama antara semua elemen bangsa yang berbeda-beda, tidak ada mayoritas dan minoritas, semuanya sama

dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Kepada masyarakat yang menyaksikan pagelaran, Neng Eem mengungkapkan bahwa Pagelaran Seni Budaya Ngaos, Mamaos dan Maenpo dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR adalah upaya MPR dalam menjaga kelestarian budaya daerah Indonesia, sesuai amanat Undang-undang.

“Kami berharap kegiatan ini bermanfaat untuk rakyat dan semakin mempertebal kecintaan kepada Tanah Air,” ucapnya.

Pagelaran yang berlangsung selama satu hari itu mendapat sambutan meriah masyarakat sekitar. Apalagi seni dan budaya yang dipersembahkan itu memang sangat akrab dan disukai masyarakat sekitar. □

DER

PSB Lampung

MPR Berkontribusi Melestarikan Warisan Nenek Moyang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PIMPINAN Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Alimin Abdullah, memuji setinggi langit kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pagelaran Seni Budaya Nasional, khususnya wayang kulit. Menurut

Alimin, bahasa yang dipakai dalam dialog wayang merupakan bahasa yang dimengerti dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat memudahkan dalam penyampaian

materi sosialisasi.

“Materi yang disampaikan adalah nilai-nilai Empat Pilar, tapi masyarakat antusias mengikutinya, karena bagi mereka sosialisasi melalui pagelaran wayang adalah



hiburan yang susah ditemukan,” kata Alimin Abdullah.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi asal Lampung itu saat membuka pagelaran seni budaya wayang kulit dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR di lapangan sepakbola Jalan VII, Dusun 4, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu malam (14/9).

Pertunjukan wayang tersebut mengentengahkan lakon *Noroyono Winisudo* yang dibawakan oleh dalang Ki Joko Purwanto. Hadir pada acara tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR RI, Siti Fauziah SE, MM.

Sosialisasi dengan metode wayang kulit, menurut Alimin, sangat mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan pagelaran wayang kulit termasuk metode sosialisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Karena merasa terhibur maka masyarakatpun rela mengikuti acara tersebut, meski harus begadang hingga pagi hari,” kata Alimin.

“Ke depan, MPR harus dapat menambah porsi sosialisasi melalui wayang kulit. Metode ini jelas langsung berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat terhibur, tujuan sosialisasi juga tercapai,” kata Alimin lagi.

Selain menghibur, kata Alimin, sosialisasi melalui wayang kulit ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Karena turut menjaga dan melestarikan warisan seni budaya yang ditinggalkan nenek moyang.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas MPR Siti



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fauziah menyampaikan terima kasih karena apresiasi dan partisipasi masyarakat sangat besar dalam mendukung kegiatan wayang ini. Bu Titi, begitu dia biasa disapa, mengaku, penonton pada acara tersebut merupakan salah satu yang terbesar, di antara perhelatan wayang yang pernah diselenggarakan selama ini.

“Saya dengar, pagelaran wayang yang terakhir diselenggarakan di sini pada 2011, semoga kegiatan ini bisa menghapus kerinduan masyarakat terhadap seni wayang. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapat tuntunan dan tontonan, serta materi tentang sosialisasi,” kata Siti Fauziah.

Lakon *Noroyono Winisudo* menceritakan kisah keberanian Raden Noroyono menghadapi pasukan raksasa yang hendak merebut kekuasaan para dewa di Kahyangan. Saat itu, raja raksasa di negara Dworowati Purwo bernama Prabu Yudwo

Kolo Kresno mengerahkan balatentaranya menyerang Kahyangan Suroloyo.

Dalam peperangan tersebut, para dewa terdesak mundur. Melihat gelagat yang kurang baik, Batara Guru dan Batara Narada bersepakat menunjuk Raden Noroyono, kesatria dari Banjar Patoman, untuk melawan Prabu Yudwo Kolo Kresno. Berbekal Kereta Jolodoro dan Bende Ponco Janyo, Raden Noroyono berhasil memukul mundur dan membunuh Prabu Yudwo Kolo Kresno.

Berkat kemenangannya itu Raden Noyorono pun diwisuda menjadi raja di negara Dworowati Purwo, dengan gelar Prabu Sri Batara Kresno. Sejak itu Dworowati Purwo menjadi negara yang ayem tentrem, subur, makmur berkat kepemimpinan raja yang juga titisan dewa Batara Wisnu, yaitu Prabu Sri Batara Kresno. □

MBO

PSB Kabupaten Magetan

Memasyarakatkan Empat Pilar di Kaki Gunung Lawu



SENI budaya tradisional *Reog, Jaranan, dan Ledhug* dalam sejarah perjalanannya termasuk jenis kesenian yang sangat digandrungi oleh masyarakat, termasuk warga masyarakat “Kota Kaki Gunung” Magetan, Jawa Timur. Namun, di era globalisasi ini, kesenian tradisional agaknya mulai terpinggirkan. Salah satu indikasinya, sekarang ini kesenian tradisional yang hidup di berbagai daerah di Indonesia sudah jarang dipentaskan di muka umum.

Melihat kondisi demikian, MPR yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR ke seluruh elemen masyarakat Indonesia berusaha untuk mengangkat kembali

kesenian tradisional ini agar tetap lestari di tengah masyarakat. Itulah sebabnya MPR memasukkan Pagelaran Seni Budaya Nasional sebagai salah satu metode dari sekian banyak metode yang dilakukan oleh MPR dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

Sosialisasi Empat Pilar MPR lewat pagelaran seni budaya telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa. Pada Sabtu (21/9/2019), Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR menggelar pagelaran seni budaya tradisional di Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Bekerjasama dengan Yayasan Ar Raulah

Desa Tinap, MPR menggelar kesenian reog, jaranan, dan ledhug.

Ternyata pagelaran seni budaya tradisional ini disambut gembira oleh warga masyarakat yang datang dari pelosok desa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Di antara ratusan warga masyarakat itu tampak hadir Bupati Kabupaten Magetan, Dr. Drs. Suprawoto, SH., M.Si.; Wakil Bupati Kabupaten Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, M.Pd.; Anggota DPRD Kab. Magetan, H. Soim; dan pejabat di lingkungan Pemkab Magetan lainnya.

Selain itu, juga hadir Ketua Yayasan Ar Raulah, Dra Hj. Retno Djumhariati, MM.; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Lembaga, dan Layanan Informasi Biro Humas MPR RI, Muhamad Jaya; serta Muspika Kecamatan Sukomoro dan para tokoh masyarakat Desa Tinap, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., selaku panitia pelaksana pagelaran seni budaya tradisional ini menyatakan, MPR punya alasan memilih seni budaya tradisional sebagai salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR. Siti Fauziah kemudian memberi alasan bahwa seni budaya tradisional masih sangat digemari oleh warga masyarakat. Di samping itu, seni budaya tradisional mengandung tuntunan, selain sebagai tontonan yang menarik.

Lebih dari itu, lanjut Siti Fauziah, memilih pagelaran seni budaya tradisional sebagai metode sosialisasi Empat Pilar MPR, juga sebagai upaya MPR untuk ikut melestarikan seni budaya tradisional sebagai bagian dari seni budaya nasional. "Kami berharap, pagelaran seni budaya tradisional ini dapat memperkuat rasa kebhinnekaan sesama

anak bangsa yang sudah terbangun selama ini," pinta Siti Fauziah.

Selanjutnya, pagelaran seni budaya tradisional di Desa Tinap ini dibuka secara resmi oleh Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., mewakili pimpinan MPR RI. Peresmian ditandai pemukulan gong oleh Guntur Sasono didampingi oleh: Bupati Kabupaten Magetan; Wakil Bupati; Kepala Biro Humas MPR RI; Anggota DPRD Kab. Magetan; Sekretaris Daerah Kab. Magetan; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi Humas MPR; Ketua Yayasan Ar Raudlah; Kapolres; Danramil; Camat; dan Ketua Yayasan Samudra Ilmu Cendekia Jombang.

Dalam sambutannya, Guntur menyampaikan, ada empat hal pokok di negara ini yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ke-empat hal pokok itu dikenal dengan istilah Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka

Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Dalam Empat Pilar MPR RI, menurut Guntur, terkandung semangat gotong royong yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. "Mari maknai nilai-nilai Pancasila agar kita terhindar dari perpecahan, seperti dialami Uni Soviet, Yugoslavia dan negara lainnya," ujar Guntur Sasono.

Sementara Bupati Kabupaten Magetan, Dr. Drs. Suprawoto, SH, M.Si., dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal MPR yang telah memilih daerah di kaki Gunung Lawu ini sebagai tempat penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Selanjutnya, dia mengingatkan, karena sekarang ini masyarakat sudah enggan bicara Pancasila, maka lewat sosialisasi Empat Pilar ini, dia mengimbau warga masyarakat untuk selalu menjaga persatuan agar kita tidak terpecah belah. "Mari kita ambil hikmah yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI, dan makna yang tercantum dalam Pancasila," ujarnya. □

JAZ



Masta Ortom Universitas Muhammadiyah Jakarta

Mendorong Mahasiswa Berperan dalam Kebangkitan Bangsa

Peran serta itu bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga berperan membawa Indonesia untuk memberikan kontribusi di tingkat global dan internasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjadi pembicara dalam program Masa Ta'aruf Organisasi Otonom (Masta Ortom) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Bertema "Membangun Akademisi yang Berkarakter Islami dalam Menyuksesan Dakwah Muhammadiyah", Masta Ortom diikuti ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah berlangsung di halaman FISIP UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/9/2019). Hadir dalam Masta Ortom 2019 ini Rektor UMJ Prof. Syaiful Bakhri dan tokoh nasional Mayjen (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya.

Dalam Masta Ortom ini, Hidayat mendorong para mahasiswa dan aktivis kampus untuk berperan serta dalam kebangkitan bangsa dan negara. Peran serta itu bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga berperan membawa Indonesia untuk memberikan kontribusi di tingkat global dan internasional.

"Kita semua dibuka ruang untuk berperan serta. Kita bisa berperan untuk kebangkitan bangsa dan negara. Kalangan intelektual bisa membaca peluang itu. Karena itu, peran serta sangat penting bagi generasi sekarang dan yang akan datang," katanya.

Menguraikan tentang peran serta dalam kebangkitan bangsa dan negara, Hidayat Nur Wahid memberi contoh peran yang telah dimainkan para tokoh Islam, organisasi Islam, organisasi kepemudaan Islam, dalam pergerakan nasional Indonesia. "Indonesia dibangun dengan melibatkan dan keterlibatan dari tokoh-tokoh Islam, organisasi Islam, organisasi kepemudaan umat Islam," ujarnya seraya menyebut nama tokoh pemuda Muhammadiyah, Kasman Singodimejo, dalam Soempah Pemoeda dan Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikusumo.

"Karena itu tidak sekadar Jas Merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti kata Bung Karno, tetapi juga Jas Hijau yaitu jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama atau umat Islam. Karena Indonesia dibangun melalui peran serta yang begitu luar biasa dari umat Islam, organisasi Islam termasuk organisasi kepemudaan Islam," imbuhnya.

Menurut Hidayat, Indonesia saat ini memberi ruang yang sangat terbuka untuk peran serta, di antaranya dengan sumber daya manusia yang unggul. "Lihat sejarahnya, Indonesia memberi ruang kepada

Anda semua untuk berperan maksimal melalui SDM unggul," ucap Hidayat kepada para mahasiswa baru UMJ.

"Ruang itu sudah terbuka. Tinggal bagaimana mengisinya. Dalam konteks inilah perguruan tinggi dan rekan-rekan mahasiswa untuk memaksimalkan peluang itu. Kalau ingin melanjutkan peran serta yang berkeunggulan maka perlu meneladani para tokoh pendiri bangsa," sambungnya.

Peran serta itu, lanjut Hidayat, bisa melalui jalur kampus atau melalui organisasi. Aktif berorganisasi artinya menyiapkan diri untuk bisa berperan, baik sekarang maupun di



masa datang. Para pendiri bangsa adalah aktivis organisasi. "Karena itu berorganisasi jangan dimubazirkan, tapi menjadi sarana dan wahana bagi mahasiswa berperan serta," ujarnya.

Hidayat menambahkan, peran serta bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global dan internasional. Sebab, ke depan, Indonesia bukan "katak dalam tempurung", tetapi terlibat dalam dunia global dan internasional. "Di mata dunia, Indonesia sangat dihormati, baik dalam konteks demokratisasi maupun Islam moderat. Ini menjadi pintu besar untuk dimaksimalkan. Negara-negara lain ingin Indonesia lebih berperan. Kita bisa berperan bukan hanya di dunia Islam, tetapi juga dunia internasional," katanya. □

BSC

Bangsa Lahir dari Kaum Profesional

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan terima kasih kepada GENPRO Wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama dengan MPR untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini, menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai ormas, organisasi pemuda, kampus, dan kelompok masyarakat lainnya. Dilakukan dengan berbagai metode, antara lain: Training of Trainers, Lomba Cerdas Cermat, Pagelaran Seni Budaya, Focus Group

bukan dengan cara indoktrinasi, tapi secara demokrasi”, tegasnya. Sosialisasi yang sekarang dilakukan berlandaskan pada UU. No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan undang-undang itu maka seluruh anggota MPR diberi amanat untuk melakukan sosialisasi.

Apa yang disosialisasikan, menurut pria yang gemar berolahraga bulutangkis itu, adalah bagian dari tuntutan Gerakan Reformasi 1998. Salah satu tuntutan reformasi pada masa itu, jelas HNW, adalah melakukan perubahan UUD Tahun 1945. “Hanya saja tidak boleh

kepentingan politik, sehingga kemudian menuduh kelompok lain dengan stigma yang tak relevan. Pancasila, kata HNW, menjadi rujukan untuk menghadirkan Indonesia sebagaimana mestinya.

Di hadapan generasi yang fokus pada dunia wirausaha dan kreatifitas itu, HNW mengatakan, bangsa Indonesia dilahirkan oleh kaum profesional dan mencintai Indonesia. Mereka yang menjadi anggota BPUPKI adalah orang-orang yang ahli, seperti Mohammad Hatta yang ahli ekonomi lulusan Belanda, demikian pula ahli-ahli hukum yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Discussion, Lomba Academic Constitutional Drafting, Bela Negara, dan Outbound.

HNW menyampaikan hal itu saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ratusan anggota dan pengurus GENPRO Sulawesi Selatan, di Makassar, 15 September 2019. Sosialisasi yang dilakukan oleh MPR, menurut alumni Pondok Modern Gontor, itu sudah dilakukan sejak dia menjadi Ketua MPR periode 2004-2009. “Waktu itu namanya Sosialisasi Putusan MPR”, ungkap HNW. Bagi HNW, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan itu tak mungkin bisa berhasil bila hanya dilakukan oleh MPR. Salah satu alasannya, karena MPR tak mempunyai perwakilan sampai di daerah-daerah.

Untuk itu, HNW mengajak eksekutif untuk ikut melakukan hal yang sama, seperti di masa Orde Baru dengan membentuk BP-7 dan melaksanakan Penataran P4. “Meski demikian metode sosialisasi yang dilakukan oleh MPR

mengubah Pembukaan UUD,” tuturnya.

Penanaman pemahaman nilai-nilai kebangsaan ditegaskan oleh HNW sangat penting. Gerakan itu untuk membangunkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. “Juga untuk mengantisipasi tantangan global”, ucapnya. Dia mengingatkan bagaimana Uni Soviet sebagai negara adidaya pada masanya bisa pecah. Terpecahnya negara yang disegani oleh Amerika Serikat itu, menurut HNW, karena adanya kebijakan Glasnot dan Perestroika. “Mereka hancurkan karena tembakan, namun karena kebijakan seperti itu”, ungkapnya.

Indonesia luasnya lebih kecil dibanding Uni Soviet. Namun, Indonesia lebih banyak memiliki suku, serta sebagai negara kepulauan yang terpisah-pisah wilayahnya sehingga potensi perpecahan itu ada. Untuk itu, dia mengajak semua untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja, HNW mengingatkan, jangan sampai kita melaksanakan Pancasila karena

juga lulusan perguruan tinggi yang hebat. “Kalau bicara profesionalisme, Indonesia lahir dari mereka”, paparnya. Indonesia tumbuh dari kalangan profesionalisme tak hanya pada masa lalu. Contohnya, Prof. B.J. Habibie adalah juga seorang profesional dan mencintai Indonesia.

Untuk itu, HNW mengajak GENPRO dan yang lainnya untuk meningkatkan profesionalisme guna menjaga bangsa ini. “Ke depan Indonesia juga bisa dijaga kaum profesional yang cinta Indonesia”, harap HNW.

Menurut Ketua GENPRO Sulawesi Selatan, Rusdi Hidayat, bangsa ini sebenarnya memiliki sumber daya alam yang besar. Namun sayang hal demikian belum dikelola secara maksimal oleh bangsa sendiri. “Untuk itu, kita perlu meningkatkan sumber daya manusia”, tegasnya. Dan, GENPRO ingin menjadikan Empat Pilar sebagai pijakan dalam kehidupan. □

AWG



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

M. Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR

Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU KUHP

DALAM keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (20/9), Presiden meminta Menteri Hukum dan HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasannya, Presiden masih ingin mendapat masukan dari berbagai kalangan tentang materi RUU KUHP ini. Sidang Paripurna DPR pada Senin (23/9/2019) akhirnya menunda pengesahan RUU KUHP.

RUU KUHP memang mengundang kontroversi. Sedikitnya ada 14 pasal dalam RUU KUHP ini yang diperdebatkan. Berbagai unjukrasa digelar di berbagai daerah untuk menuntut pembatalan RUU KUHP ini. Bagaimana tanggapan DPR terhadap dinamika yang terjadi berkaitan dengan kontroversi RUU KUHP? Berikut wawancara Majelis dengan anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil yang juga anggota Panja RUU KUHP Petikannya.

Pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP menjadi UU. Apa tanggapan Bapak?

Sebenarnya kita menyesalkan adanya penundaan pengesahan RUU KUHP ini. Soalnya, dalam pembahasan di tingkat I kita sudah mengambil keputusan. Semua fraksi dalam forum itu setuju untuk membawa RUU KUHP ke tingkat II atau sidang paripurna untuk diambil keputusan. Tapi pengesahan RUU ini ditunda. Kita tidak tahu apa yang melatarbelakangi keputusan pemerintah menunda pengesahan RUU ini. Kita tidak tahu apakah karena substansi RUU yang dinilai kontroversial atau ada faktor lain, misalnya faktor politik atau tekanan dari pihak asing.

Saya menduga ada sejumlah pihak dan negara asing yang tidak rela kalau kita menggunakan KUHP ala Indonesia ini. Mereka ingin kita tetap menggunakan hukum pidana warisan kolonial. Mereka mungkin merasa “terganggu” ketika kita mengatur tindak pidana kejahatan seksual dalam RUU KUHP ini. Sekali lagi, kita sedang diuji dalam kedaulatan kita merumuskan norma-norma hukum dalam KUHP ini. Kedaulatan kita sedang diuji dan diganggu oleh mereka.

RUU KUHP ini diajukan oleh pemerintah. Tapi, pemerintah juga yang menunda pengesahan RUU KUHP ini. Bagaimana seharusnya?

Ini seperti bait lagu, “kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari”. Sebenarnya RUU KUHP ini sudah dibahas sejak lama. Bahkan ada draf-draf RUU KUHP di setiap periode DPR. Jadi selalu ada perubahan dari pemerintah sebelum diajukan ke DPR. Dalam pandangan saya, tim ahli pemerintah dari kementerian terkait cukup intensif mengkaji dan membahas RUU ini sebelum diajukan ke DPR.

Bagi kami, kalau RUU KUHP itu tidak disahkan pada periode ini tentu sangat disayangkan karena banyak tenaga, waktu, dan biaya sudah terbuang. Kalau misalnya ada pasal-pasal kontroversial dalam RUU ini, masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk melakukan uji materi ke MK. Tidak perlu ribut-ribut seperti ini. Tidak perlu ada unjukrasa di sana-sini.

Dengan adanya unjukrasa menolak RUU KUHP dan kontroversi yang ditimbulkan, apakah memang RUU KUHP ini belum clear?

Mungkin belum clear bagi sebagian orang. Bagi kami di DPR, pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat I di komisi III sudah clear semua. Semua fraksi menyetujui agar ditingkatkan dalam pengambilan keputusan

di tingkat II. Artinya, tidak ada catatan atas RUU KUHP ini. Karena itu kita minta RUU KUHP ini segera disahkan. Kalau sejumlah pihak di luar DPR menilai ada hal-hal yang kontroversial, mereka bisa mengajukan uji materi ke MK. Jalur ini lebih intelek, akademis, dan ilmiah sehingga MK bisa memutuskan apakah pasal-pasal yang kontroversial itu bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dengan hak asasi manusia, atau asas hukum pidana lainnya.

Soal substansi dari RUU KUHP ini, terutama pasal-pasal yang kontroversial seperti pasal penghinaan terhadap presiden dan perbuatan asusila seperti perzinaan, kumpul kebo, dan pencabulan, serta pasal yang melemahkan KPK atau pemberantasan korupsi. Bagaimana penjelasan Bapak?

Dalam RUU KUHP kita tidak menggunakan kata “penghinaan”. Kita menggunakan istilah “penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden”.

Pertama, meski sudah diputuskan MK, tapi MK tidak melakukan pelarangan untuk menghidupkan pasal itu. Justru dalam putusan MK, jika pasal itu dihidupkan lagi maka harus diatur deliknya, yaitu delik aduan. Artinya, presiden sendiri yang melaporkan kalau harkat dan martabatnya sebagai presiden diserang.

Kedua, kita ingin menjaga wibawa, harkat, dan martabat presiden. Harkat dan martabat presiden bisa ditafsirkan macam-macam, tergantung presiden sendiri. Kalau presiden-nya berkuping tipis, bersumbu pendek, dan hatinya sempit, mungkin akan menganggap kritik-kritik terhadap presiden sebagai menyerang harkat dan martabat. Kalau misalnya ada keinginan untuk menghapus pasal “penghinaan terhadap presiden” ini, kita juga tidak masalah.

Lalu soal perbuatan asusila seperti kumpul kebo, perzinaan, atau pencabulan baik sesama jenis maupun berlainan jenis, kita merujuk pada nilai-nilai luhur bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab, memiliki nilai dan budaya. Agama memegang peranan penting dan memengaruhi norma-norma dalam RUU KUHP ini.

Dalam pandangan bangsa Indonesia, perzinaan bebas, kumpul kebo, pencabulan, hubungan seks sesama jenis, itu merendahkan martabat kemanusiaan. Tidak ada agama di



Indonesia yang melegalkan seks bebas atau suami istri hidup tanpa ikatan perkawinan.

Karena itu, tindak pidana kejahatan kesusilaan kita atur dalam RUU KUHP. Mengapa kita atur? Karena negara harus hadir untuk melindungi warga negaranya. Pengaturan itu perlu agar orang bisa terhindar dari amuk massa. RUU KUHP ini melindungi setiap orang, baik pelaku maupun korban. Saya ingin menyampaikan kepada orang-orang yang menolak pengaturan tindak pidana kejahatan seksual tentang implikasi sosial terkait kejahatan seksual itu. Ketika perzinaan bebas, orang berbuat seks bebas, kumpul kebo bebas, lalu semua itu tidak diatur oleh negara, apakah dibiarkan saja begitu? Apakah kita mau seperti itu?

Kemudian soal pelemahan KPK. RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, hukuman minimal 4 tahun, dalam RUU KUHP kita kurangi menjadi minimal 2 tahun. Kita minimalkan 2 tahun karena ini adalah ketentuan untuk setiap orang yang tidak mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Sementara setiap orang yang punya kedudukan dan kekuasaan maka hukumannya sama seperti UU Tipikor, baik minimal maupun maksimal. Menurut saya, dalam hal korupsi ini ada isu yang di-selewengkan untuk memancing emosi sebagian orang dan dijadikan alat untuk mendelegitimasi apa yang dibuat oleh DPR.

Mereka yang menolak pasal-pasal dalam RUU KUHP ini juga mempunyai argumentasi sendiri. Bagaimana menurut Bapak?

Kita menyayangkan mereka tidak mengerti dan memahami keseluruhan dari RUU KUHP ini. Karena itu, ke depan kita harapkan DPR bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Saya pernah mengusulkan kepada Ketua DPR agar dibuat debat regulasi. Kalau di MPR ada debat konstitusi maka di DPR harus ada debat regulasi. Jadi, di sela-sela pembahasan DPR dan pemerintah, DPR mengundang perguruan tinggi dan mahasiswa untuk melakukan debat regulasi, khususnya pada UU yang kontroversial. Jika perguruan tinggi dan mahasiswa merasa UU itu tidak sesuai dengan aspirasi mereka maka mereka bisa ajukan uji materi ke MK. Suasananya lebih akademis dan ilmiah daripada unjukrasa seperti sekarang ini.

Lalu, bagaimana “nasib” RUU KUHP ini selanjutnya?

Tergantung pada DPR dan pemerintah menyikapi mau diapakan RUU KUHP ini. Fraksi kami mempunyai beberapa alternatif. Pertama, RUU KUHP disahkan di tingkat II menjadi UU. Jika disahkan, pemberlakuan UU KUHP ini adalah dua tahun setelah disahkan. Dalam masa dua tahun itu, masyarakat bisa mengajukan uji materi ke MK jika merasa ada norma-norma yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD, HAM, dan lain sebagainya.

Kedua, melanjutkan pembahasan RUU KUHP, terutama hanya pada pasal-pasal yang mengundang kontroversi. Ini hanya opsi saja.

Ketiga, DPR dapat kembali menggelar rapat kerja dengan pemerintah hanya membahas ketentuan peralihan dan penutup. Bisa saja dalam ketentuan peralihan masa tenggang pemberlakuan UU KUHP ditambah menjadi 3 tahun, atau 4 tahun, bahkan 5 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan agar ada penyesuaian-penyesuaian terhadap pasal-pasal kontroversial oleh DPR periode berikutnya. Jika penyesuaian tidak selesai pada periode ini maka dilanjutkan DPR periode mendatang dan tidak mulai dari nol atau awal lagi.

Alternatif lainnya, dalam masa tenggang, tetap dilakukan sosialisasi UU KUHP dan uji publik sehingga kalau ada yang tidak sesuai bisa dibentuk aturan atau norma baru untuk perubahan UU. Itu kita masukkan dalam ketentuan peralihan. Sekarang tergantung pada kemauan politik pemerintah dan DPR, apakah mau dilanjutkan dalam arti dibahas di periode sekarang ini atau dilanjutkan pada periode yang akan datang. Ke depan, penyusunan RUU memang mesti dievaluasi. Karena itu seperti gagasan saya tadi, perlu debat regulasi terutama UU atau pasal-pasal dalam UU itu yang kontroversial bagi publik. □

Jakarta Muharram Festival 2019



Pawai Obor dan Pertunjukan Laser Ikut Meriahkan Malam Tahun Baru Islam

DAERAH Khusus Ibu Kota Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anis Baswedan membuat sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat menggelar *Jakarta Muharram Festival 2019*. Festival berlangsung di jantung Kota Jakarta, persisnya di Bundaran Hotel Indonesia, sejak sore hingga malam hari, Sabtu (31/8).

Sebagai ajang pertama kalinya, Festival Muharram ini terbilang sukses. Sederet artis ibu kota ikut meramaikan acara tersebut. Sebut saja *Kotak, Wali, Potret, Pasha, Opick, Koes Plus Junior, Wika Salim, Kanda Brothers, Jiung Band, Takaeda*, serta *Hijab Band* ikut mengisi acara bertajuk *Muharram Concert*, yang merupakan salah satu dari rangkaian acara Jakarta Muharram Festival 2019.

Selain Muharram Concert, dalam rangka Jakarta Muharram Festival 2019 juga ditampilkan serangkaian acara lainnya, yakni: *Halal Food Festival, Beauty Jakarta Festival, Pawai Obor, dan Fire Dance*. Serta ada pula kesenian Nusantara, mulai dari *Tari Topeng, Palang Pintu, Lenong* dan *Pantun*, hingga *Ondel-ondel* feat

Perkusi Marawis.

Tak kalah menariknya pertunjukan *Water Screen Projection Laser* di Air Mancur Bundaran HI dan 3D Project Mapping Building. Ribuan anggota masyarakat terlibat dalam perhelatan tersebut. Mereka datang dari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Sehingga praktis, festival untuk memeriahkan tahun baru Islam, 1441 Hijriyah, ini menampilkan kebhinnekaan Indonesia, tetapi tidak melupakan budaya Betawi sebagai tuan rumah.

Festival ini juga mengisyaratkan bahwa Jakarta dengan segala modernitas dan

kemajuannya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religius, khususnya Islam sebagai agama mayoritas. Perayaan tahun baru Islam itu juga tidak melulu menjadi tontonan bersifat hiburan, tetapi juga menjadi tuntunan.

Keramaian Festival Muharram ini sudah tampak sejak siang hingga menjelang sore, khususnya saat akses lalu lintas kawasan Jl. Thamrin hingga Bundaran HI dan Soedirman mulai ditutup. Hilir mudik warga masyarakat yang hendak menyaksikan acara tersebut tampak meningkat signifikan sesaat menjelang senja.

Saat itu, keramaian mulai terpusat di





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bilangan Jalan MH. Thamrin, tempat berlangsungnya *Halal Food Festival*. Di situ tampak warga masyarakat berkerumun hendak membeli berbagai jenis makanan, antara lain: kerak telur, soto betawi, pecel, sate ayam, sop buntut, dan berbagai cemilan. Sejumlah *booth* kuliner yang ada di situ dihadirkan oleh dua UMKM, yaitu: UMKM Tanah Abang dan UMKM Menteng.

Tak jauh dari stan makanan halal itu, masih di kawasan Jalan MH. Thamrin, tepatnya di bilangan Bundaran Hotel Indonesia, sejumlah warga masyarakat tampak duduk dengan tertib. Di tempat ini — kaum pria kebanyakan memakai baju koko dan peci, sedangkan kaum perempuan mengenakan mukena — tampak khusus berzikir dan memanjatkan doa akhir tahun. Saking khusuknya sampai-sampai mereka tak merasa terganggu oleh hilir mudik masyarakat di sekitar tempat tersebut.

Kegiatan itu berlangsung hingga berkumandang azan Maghrib. Dan, tak berselang lama, jamaah yang jumlahnya makin bertambah banyak itu pun melaksanakan salat Maghrib berjamaah. Usai salat dilanjutkan zikir, membaca ayat-ayat suci Alquran dan diakhiri doa awal tahun.

Pawai Obor

Malam sudah menjelang beberapa saat lamanya. Pengunjung terus berdatangan untuk menyaksikan Festival Muharram, dan kawasan Bundaran HI pun tampak dipadati oleh pengunjung. Di dalam suasana yang penuh sesak itu, di acara puncak Festival Muharram itu, lantunan salawat, lagu-lagu, dan musik dari

panggung utama terus bergema.

Sekitar pukul 19.30 WIB, salah satu parade terbesar dalam Festival Muharram, yaitu pawai obor elektrik yang melibatkan 4000 peserta tampak mulai bergerak dari kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, menuju Silang Monas, dan berakhir di Bundaran HI. Para peserta pawai obor ini datang dari lima wilayah Kota Jakarta, ditambah Kepulauan Seribu. Peserta pawai terdiri dari laki-laki yang mengenakan baju koko, dan perempuan yang kebanyakan mengenakan gamis. Masing-masing peserta memegang tongkat obor. Api obor bukan api sungguhan, melainkan lampu elektrik.

Di sepanjang perjalanan para peserta arak-arakan pawai obor itu tak henti-hentinya mengumandangkan selawat, diiringi tetabuhan gendang yang dibawa oleh peserta lainnya. Mereka juga menggerakkan tongkat obor menyesuaikan dengan koreografi yang sudah dipersiapkan, sehingga tampak kompak dan elok dipandang mata.

Iring-iringan pawai obor ini berakhir di bilangan Bundaran HI, tempat berdirinya panggung besar nan megah. Di panggung tersebut juga telah hadir Gubernur Anis Baswedan yang segera menyambut kedatangan arak-arakan peserta pawai obor dengan senyumnya yang khas. Anis beserta tamu dan undangan tampak menikmati benar pawai obor itu.

Begitu tiba di kawasan Bundaran HI, para peserta pawai tak langsung membubarkan diri. Mereka berdiri di tempat tersebut sembari terus menggerakkan obor elektrik yang dibawa oleh setiap peserta, sehingga menciptakan pemandangan yang sungguh

indah. Bayangkan, ribuan obor elektrik terus bergerak, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, serta ke atas dan ke bawah. Seakan menggambarkan gejolak dan kegembiraan menyambut datangnya Tahun Baru, 1441 Hijriah.

Beberapa saat kemudian atraksi obor pun usai. Tetapi, itu bukan penanda Festival Muharram telah berakhir. Sebab, setelah atraksi obor itu dilanjutkan dengan hiburan yang menampilkan beberapa artis kenamaan Ibu Kota Jakarta. Dan, jarum jam menunjukkan pukul 21.00 WIB, sejumlah artis menyemarakkan Festival Muharram dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam tersebut.

Usai dihiburi oleh para artis, para pengunjung selanjutnya disuguhi pertunjukan tak kalah menakjubkan. Kilauan cahaya laser memancarkan berbagai bentuk dan rupa-rupa kreasi bangunan yang menciptakan keindahan, layaknya bunga api yang sanggup menghiasi langit Jakarta.

Pemandangan tersebut semakin menarik karena air mancur yang ada di Bundaran HI ikut mempertontonkan keindahan gerakannya. Berbagai macam keindahan gerakan air mancur itu mampu mengundang decak kagum dan tepuk tangan warga masyarakat yang menyaksikan. Kadang, semburan airnya menjulang tinggi, lalu tertiuip angin memercik penonton yang berada tak jauh dari bundaran air mancur. Namun, penonton tampak sangat menikmati suasana itu, meski pakaian di badan mereka basah terkena percikan air. Dan, di wajah mereka memancarkan kebahagiaan. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1414 Hijriah. □

MBO

Para Duta Bahasa Nasional Ramaikan Sidang Tahunan MPR 2019



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SIDANG Tahunan MPR 2019, selain dihadiri para teladan dari berbagai profesi dari seluruh provinsi di Indonesia, kali ini juga diramaikan oleh para Duta Bahasa Nasional 2019. Para Duta Bahasa Nasional tersebut adalah sosok-sosok pilihan perwakilan Provinsi di Indonesia.

Berkumpul di lobi Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, kehadiran para Duta Bahasa Nasional di ajang Sidang Tahunan MPR ini untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan, untuk pelestarian bahasa

nasional sebagai kekayaan bangsa.

Rizky salah seorang Duta Bahasa Nasional mengatakan, bahasa nasional yakni bahasa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, "Kehadiran kami untuk mengajak masyarakat Indonesia melestarikan bahasa Indonesia," katanya.

Untuk itu, dia berterima kasih kepada MPR yang telah memberikan kesempatan kepada para Duta Bahasa Nasional untuk hadir dan melakukan sosialisasi tentang bahasa nasional. □

DER

MPR Gelar Ragab Sepakati Perubahan Tatib



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI, Senin (23/9/2019), gelar Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi Parpol dan Kelompok DPD di MPR, juga Pimpinan Badan Pengkajian, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Sosialisasi, dan Pimpinan Lembaga Pengkajian.

Ragab yang digelar tertutup di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, tersebut dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli

Hasan (Zulhasan) didampingi para Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani.

Dalam ragab tersebut Pimpinan Badan Pengkajian Rambe Kamarul Zaman membacakan Laporan Badan Pengkajian MPR RI Tentang Usul Perubahan Tata Tertib MPR dan Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, dan kemudian direspon dengan berbagai tanggapan dari masing-masing perwakilan fraksi Parpol dan

Kelompok DPD di MPR.

Usai Ragab, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan kepada pers bahwa Ragab tersebut adalah Ragab terakhir untuk MPR periode 2014-2019. Ragab ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan besar, salah satunya usulan Perubahan Tata Tertib (Tatib) MPR di

mana salah satu poinnya adalah Pimpinan MPR berjumlah 10 orang, terdiri 1 (satu) ketua dan sembilan wakil ketua. Hasil Ragab ini akan disampaikan di Rapat Paripurna MPR Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2014-2019 yang berlangsung 27 September 2019. □

DER

Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Parlemen



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AKSI demonstrasi besar-besaran dilakukan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se Jabodetabek, dan katanya ada pula yang datang dari luar daerah, berusaha memasuki Gedung Parlemen dari berbagai arah, Selasa (24/9/2019).

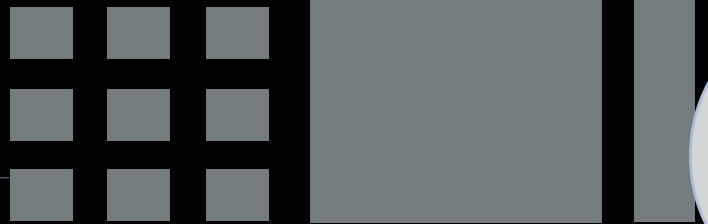
Aksi demonstrasi dengan agenda menuntut dibatalkannya UU KPK yang baru saja disahkan, dan RUU KUHP yang dianggap kontroversial. Awalnya aksi demonstrasi ini berjalan damai, namun beberapa waktu kemudian berlangsung anarkis. Pendemo memaksa masuk dengan merusak gerbang utama dan pintu gerbang belakang gedung wakil rakyat itu.

Aparatur kepolisian berusaha menghalau para demonstran

dengan menembakkan water canon dan gas air mata. Hembusan gas air mata ternyata tidak hanya berimbas pada demonstran, juga berimbas kepada setiap orang yang berada di area gedung parlemen. Ratusan orang mulai dari pegawai, wartawan, dan aparaturnya berlari menuju area lobi Gedung Nusantara IV MPR menghindari sengatan asap gas air mata. Beberapa orang bahkan terlihat tak sadarkan diri.

Beberapa pegawai di lingkungan Setjen MPR yang tak terdampak gas, membantu para korban dengan memberikan air dan pengobatan sementara. □

DER



Bangga Memerankan *Ibu Negara*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Maudy Ayunda

FILM ketiga seri film *Habibie & Ainun* dijadwalkan tayang di bioskop, 19 Desember 2019. Kalau seri sebelumnya pemeran Ibu Negara Ainun adalah Bunga Citra Lestasi (BCL), sedang untuk seri ketiga Ainun diperankan oleh artis cantik, **Maudy Ayunda**.

Ketika ditawari memerankan sosok Ibu Ainun, Maudy Ayunda mengaku, sangat grogi. "Ini masalah buat saya, karena sosok Ibu Ainun menurut saya adalah sosok yang semestinya cuma ada di negeri dongeng. Tapi, faktanya sosok itu ada di dunia nyata, dan

saya harus benar dalam memerankannya. Ini berat, beliau inspirasi saya," ujar Maudy Ayunda di Jakarta.

Maudy mengaku, sangat mengagumi karakter Ibu Ainun, seorang Ibu Negara yang sangat Indonesia. Karakter Indonesianya sangat kental. "Tidak mudah memerankan beliau," akui Maudy Ayunda. Tapi, dia berharap, sosok Ibu Ainun ini selalu muncul di Indonesia, entah siapa sosok itu nantinya. "Indonesia butuh sosok Ibu Ainun," katanya. □

DER

Gunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

ZIKRI adalah panggilan akrab **Zikri Rahmadannor**, lajang asal Kalimantan Selatan. Bersama kawan-kawannya dari provinsi seluruh Indonesia, Zikri hadir di kompleks Parlemen sebagai Duta Bahasa Nasional dalam acara Sidang Tahunan MPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

“Sebagai Duta Bahasa, saya dan kawan-kawan dari provinsi lain mengajak masyarakat Indonesia, serta mengimbau masyarakat agar menjaga dan mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia lestari,” ujarnya di Jakarta, Agustus 2019 lalu.

Menjadi Duta Bahasa, kata Zikri, tidaklah mudah. “Seorang Duta Bahasa harus menguasai bahasa Indonesia dengan cermat, apik, dan santun,” ujar Zikri. Dan, dalam pergaulan sehari-hari, ia harus mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. □

DER



Zikri Rahmadannor



Anya Dwinow

Mahasiswa Sekarang Pinter-Pinter

SELEBRITI Anya Dwinow kagum dengan kemampuan mahasiswa peserta Debat Konstitusi MPR, salah satu dalam Pekan Konstitusi MPR, Agustus 2019. Anya, begitu artis cantik ini biasa dipanggil, bisa menilai begitu karena dia berperan sebagai host acara yang memperebutkan gelar juara nasional tersebut.

“Wihh.mereka kaya anggota parlemen benaran deh..., pinter-pinter semua, luarbiasa,” katanya.

Sebagai pemandu acara Anya sempat bercanda ketika memperkenalkan dewan juri kepada peserta lomba. “Ini dia juri yang cantik, murah senyum, ibu Prof Maria Farida. Ayo kalian jangan macem-macem sama Ibu Profesor loh ya,” candanya.

Anya berharap, lomba seperti ini terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat buat generasi muda mahasiswa. “Saya berharap akan terus lanjut, bahkan lebih baik lagi di masa akan datang. Saya apresiasi untuk MPR ya dalam penyelenggaraan ini,” ucapnya. □

DER

Buku Untuk Menjawab Tantangan Kebangsaan

Ide, gagasan, dan solusi dari para anggota MPR dan para pakar bisa kita simak dalam buku *Diskusi Empat Pilar MPR*. Buku itu berisi kumpulan hasil perdebatan dari kegiatan yang digelar MPR bekerjasama dengan Wartawan Parlemen.

NI buku kedua berisi kumpulan diskusi yang diluncurkan Biro Humas Setjen MPR. Hasil diskusi rutin yang digelar setiap Senin dan Jumat itu dikemas dalam buku *Diskusi Empat Pilar, MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat*. Kegiatan diskusi dan buku yang diterbitkan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang memberi amanat kepada anggota MPR untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam buku setebal 100 halaman ini terungkap berbagai acara diskusi yang mengambil beragam tema dengan narasumber para anggota MPR ditambah komentar para pengamat dari beragam disiplin ilmu.

Tema yang diambil, pastinya dalam lingkup Empat Pilar dan masalah aktual bangsa. Lihat saja pada diskusi yang diadakan pada 4 Maret 2019, dengan narasumber terdiri dari: anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; pengurus NU Nabil Haroen; dan pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menghasilkan kesimpulan *MPR: Semua Pihak Harus Menjaga dan Merawat Kebhinnekaan*.

Diskusi diikuti ratusan wartawan itu digelar sebelum Pemilu 2019, sehingga tema yang dibedah berhubungan dengan hal itu. Tengok saja pada Bab I hingga Bab III. Bab I mengupas masalah *MPR: Golput Pemilu 2019 Tidak Akan Besar*. Lalu, Bab II menyajikan *Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Merupakan Harapan Semua*. Dan, Bab III mengulas *MPR: Hoax Bisa Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat*. Meski tidak runtut mengenai Pemilu, namun mayoritas yang dikupas masalah hajat lima tahun sekali itu.

Narasumber berupaya apa yang diobrolkan mampu memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga buku yang dilepas ke masyarakat itu berdampak positif dalam kehidupan. Dampak positif dari diskusi ini bisa kita lihat pada acara yang digelar 1 April 2019. Dalam diskusi dengan narasumber anggota MPR Fraksi Partai Golkar,

Rambe Kamarul Zaman, bersama anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan pengurus MUI Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, menghasilkan kesimpulan *MPR: Fatwa MUI Soal Golput Bisa Tingkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*.

Meski diskusi menghadirkan pembicara dari kalangan politisi, namun kegiatan yang ada tak seratus persen mengambil tema soal tata negara dan kekuasaan. Ada beberapa tema di luar kebiasaan yang diambil. Pada diskusi 8 Maret 2019, dengan narasumber

anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, anggota MPR Fraksi Nasdem Taufiqulhadi, dan mantan Kabag Humas BNN Kombes Pol. Sulistiandriatmoko, membahas soal Narkoba.

Menurut Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, *Diskusi Empat Pilar MPR* disusun dengan harapan dapat menggambarkan gagasan serta ide yang tergal di dalam setiap pelaksanaan diskusi. Sehingga pembaca dapat merasakan suasana perdebatan dalam setiap keunikan tema yang dibahas. Perdebatan yang muncul tentu tidak menjadikan perdebatan pendapat di antara narasumber, namun menjadi sebuah kesimpulan yang saling melengkapi di antara perbedaan pandangan, ide, dan gagasan.

Sesjen MPR, Ma'ruf Cahyono, menyebut, penerbitan *Diskusi Empat Pilar MPR* yang dihasilkan dari proses analitis akademis di atas dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan peradaban Indonesia yang selaras dengan konsepsi ideal tujuan negara ini didirikan.

Dialektika kebangsaan yang terjadi diharapkan dapat menciptakan alternatif solutif serta relevan dengan dinamika perkembangan zaman dan kondisi masyarakat agar dapat menjawab setiap tantangan kebangsaan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Gagasan yang terkristalisasi dalam pertemuan cakrawala perlu dibukukan agar dapat dipahami dengan mudah dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. □

AWG

